

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024 -2026



PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT NIP : 19710914 199703 1 006

Jabatan Kepala Dinas Perhubungan

Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan SK Gubernur No. 821.2/60/2022

Tanggal 11 Februari 2022

Bertugas untuk dan atas nama Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 355-357

Semarang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan serta program kerja berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Mei 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19710914 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

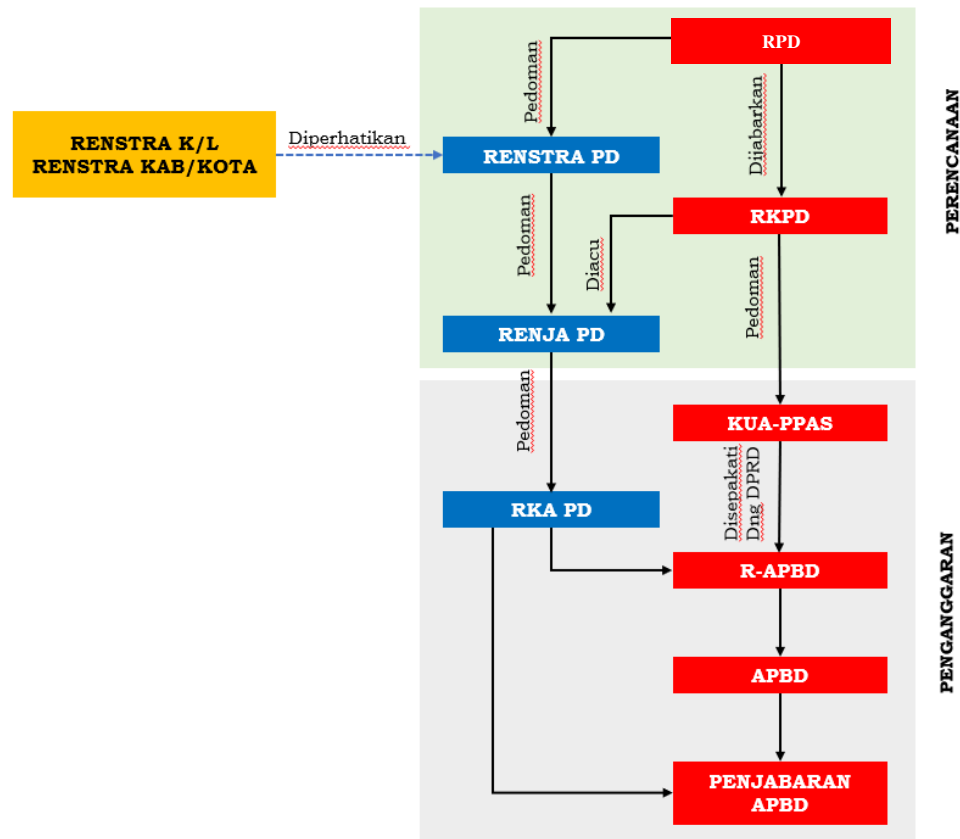
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Fungsi Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 adalah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai formulasi secara menyeluruh atau *roadmap* yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha dilakukan untuk mencapai tujuan melalui penerapan strategi-strategi yang dipilih.

Penyusunan Renstra sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 yang mengintruksikan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah transisi. Menindaklanjuti hal itu, agar pembangunan terus berjalan maka perangkat daerah perlu menyusun renstra yang selaras dengan dokumen RPD pada tingkat daerah provinsi.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan melalui tahapan sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai renstra PD, penyusunan agenda kerja serta persiapan data dan informasi 2) penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah meliputi penyusunan pohon kinerja, *cascading*, manajemen resiko dan penyusunan dokumen renstra 3) penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 5) perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dan 6) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra Dinas Perhubungan dengan RPD, Renstra K/L Renstra Kab/Kota dan Renja PD sebagaimana bagan berikut.



Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2023

Gambar I.1. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L Renstra Kab/Kota dan Renja PD

Renstra PD disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, selanjutnya Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun. Renja PD selain mempedomani Renstra PD juga mengacu dokumen perencanaan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari RPJMD. Setelah tahapan perencanaan selesai kemudian dilanjutkan pada tahap penganggaran dengan mempedomani dokumen perencanaan yang sudah disusun serta menyepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai urat nadi perekonomian di suatu wilayah, sektor transportasi mempunyai peranan sebagai penggerak dari perekonomian itu sendiri. Digambarkan bahwa semakin maju suatu wilayah maka mobilitas pada wilayah tersebut akan meningkat sehingga kebutuhan untuk transportasi juga bertambah. Hal tersebut seiring dengan sifat transportasi yang merupakan suatu permintaan yang bersifat turunan yang sering disebut *derived demand*. Permintaan jasa transportasi akan terlaksana apabila ada faktor-faktor yang mendorong sehingga transportasi sangat erat dengan aktivitas (sektor) lainnya seperti dukungan kebutuhan transportasi pada sektor kebencanaan, ketahanan pangan dalam rangkaian sistem logistik daerah, pariwisata, industri (dukungan terhadap kalster UMKM), pendidikan, kebina margaan dan sektor lainnya.

Pembangunan infrastruktur perhubungan juga mempunyai peran dalam mengatasi kesenjangan sosial dan eksklusi social dengan cara menjadikan kelompok tertentu sebagai prioritas sehingga terbentuk

keadilan gender, disabilitas, dan inklusi social (*Gender Equity, Disability, and Social Inclusion/ GEDSI*). Pembangunan infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur yang dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Hal ini selaras dengan tujuan global dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pada *Goal 5*; mencapai kesetaraan gender; *Goal 9*, membangun infrastruktur yang kokoh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi; *Goal 10* mengurangi kesenjangan pembangunan, dan *Goal 11* untuk menciptakan kota dan hunian yang inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan. Partisipasi sektor transportasi juga diharapkan dalam mengupayakan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hal tersebut seiring dengan Perubahan Iklim Global yang disebabkan oleh banyaknya GRK yang terperangkap di atmosfer sehingga mengakibatkan pemanasan global. Adanya perubahan iklim telah dirasakan oleh penduduk dunia berupa meningkatnya kejadian bencana alam, seperti hujan terus menerus, angin badai, kemarau panjang, naiknya muka air laut, meningkatnya populasi vektor penyakit yang dapat mengancam kehidupan manusia. Selain itu, Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan setiap tahun cenderung semakin meningkat. Selain jumlah kejadian, tingkat fatalitas yang mengakibatkan korban materiil dan non materiil menjadi persoalan yang menuntut keseriusan dalam penyelenggaraan keselamatan jalan. Untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana terdapat amanat untuk Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang dalam proses penetapan menjadi Peraturan Gubernur.

Kondisi seperti ini perlu diantisipasi untuk menghindari permasalahan-permasalahan pada urusan perhubungan dengan permasalahan utama adalah masih diperlukannya upaya peningkatan kualitas pelayanan transportasi dimana permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain masih diperlukannya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah untuk mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, masih diperlukan peningkatan keselamatan perjalanan transportasi utamanya peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan diruas jalan provinsi dalam mendukung pengurangan tingkat kecelakaan serta masih diperlukannya peningkatan kualitas layanan angkutan umum utamanya peningkatan layanan angkutan umum dikawasan aglomerasi perkotaan dan peningkatan pelayanan disimpul transportasi serta integrasi antar moda yang secara bertahap harus dipenuhi.

Hal tersebut sesuai dengan Sasaran Daerah ke-1 yaitu meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan dimana pada tahun 2024-2026 tujuan Dinas Perhubungan diarahkan pada Meningkatkan Kualitas Pelayanan Transportasi yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran yaitu : 1) Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi

di Jawa Tengah, 2) Meningkatkan konektivitas provinsi, 3) Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 38. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang;
 42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 43. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden sebagaimana telah diubah terakhir dengan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
 46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
 51. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2022 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 52. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
 53. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
 54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
 55. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 56. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;
 57. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
 58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
59. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
 60. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
 61. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
 62. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
 63. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 64. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 65. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional;
 66. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
 67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
 68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 69. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
71. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
72. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
73. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
74. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
75. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.2128 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
76. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
77. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
78. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
79. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
80. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
81. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
82. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
83. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
84. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 622/11/Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah;
85. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan rencana dan program / kegiatan bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, serta menetapkan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2024-2026;
2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
3. Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, 2025 dan 2026;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah baik tahunan maupun sesuai periode jangka menengah (2024-2026).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya manusia, kineja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dan serta penentuan isu-isu strategis di bidang perhubungan di Provinsi Jawa Tengah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang disertai dengan indikator kinerja serta target selama 3 Tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan dicapai.

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini memuat Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan indikator tujuan dan / atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain itu memuat indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- BAB VIII PENUTUP**
Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.
- Lampiran 1) Pohon Kinerja;
2) Cascading Perangkat Daerah;
3) Manajemen Risiko.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, kedudukan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, Bidang Pelayaran, Unit Pelaksana Teknis Daerah sebanyak 6 Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah, dan Balai Transporasi Jawa Tengah serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Lalu Lintas Jalan;
4. Bidang Angkutan Jalan;
5. Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian;
6. Bidang Pelayaran;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber : Pergub Jateng 69 Tahun 2016

Gambar II.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

A. Kepala Dinas

Adapun tugas pokok Kepala Dinas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran;
4. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

6. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
8. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan, Rekayasa Lalu Lintas Jalan dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan.

E. Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian

Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan, Perencanaan Transportasi, dan Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Jaringan Transportasi Dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Transportasi;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkeretaapian.

F. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut, Kepelabuhanan, Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan.

G. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Adapun Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki UPTD yaitu Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A dan B serta Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A.

1. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan. Balai tersebut dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

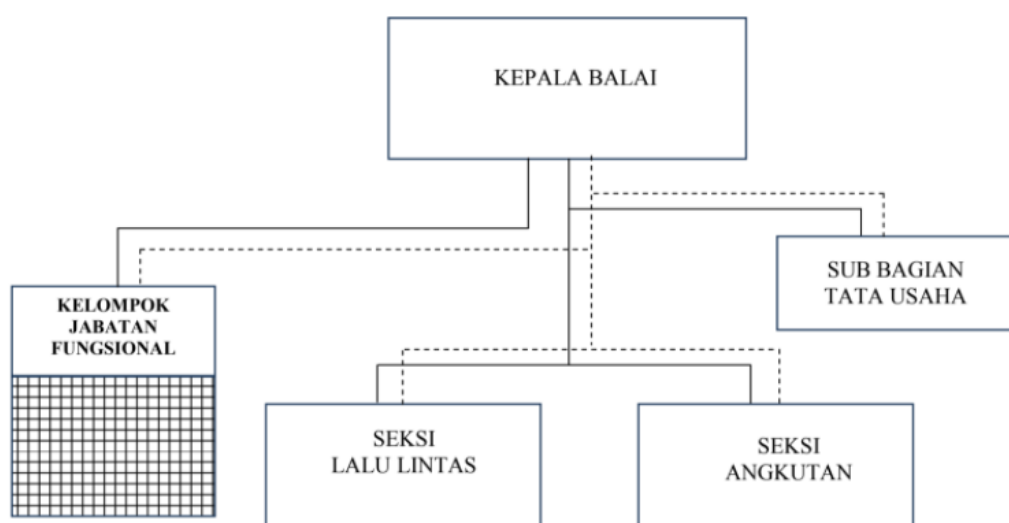
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A terdiri dari 4 Balai berdasarkan wilayah kerjanya, berikut pembagian wilayah kerja Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A :

- a. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A berkedudukan di Semarang dengan wilayah kerja 6 Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga;
- b. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A berkedudukan di Surakarta dengan wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali,

- Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten;
- c. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Magelang dengan wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung;
 - d. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Pekalongan dengan wilayah kerja 7 Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang;

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sumber : Pergub Jateng 22 Tahun 2018

Gambar II.2. Struktur Organisasi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas A

2. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas B

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan. Balai tersebut dipimpin oleh Kepala Balai yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

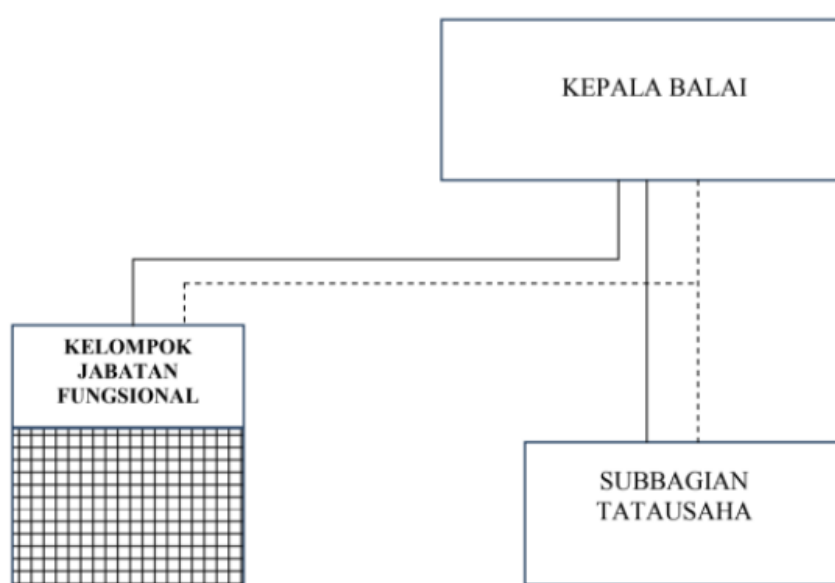
Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas B terdiri dari 2 Balai berdasarkan wilayah kerjanya, berikut pembagian wilayah kerja Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas B :

- a. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B berkedudukan di Pati dengan wilayah kerja 5 Kabupaten meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
- b. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B berkedudukan di Purwokerto dengan wilayah kerja 5 Kabupaten meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen;

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas B mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan. Tugas tersebut meliputi :

- a. Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan;
- b. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. Menyiapkan data kebutuhan, penetapan titik letak, pengawasan pembangunan fasilitas dan optimalisasi fungsi perlengkapan jalan serta penyediaan perlengkapan jalan pada jalan provinsi;
- d. Menyiapkan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di jalan provinsi;
- e. Menyiapkan data unjuk kerja jaringan jalan dan persimpangan;
- f. Menyiapkan fasilitasi pengaturan dan pengendalian lalu lintas akibat kemacetan dan bencana alam;
- g. Menyiapkan pemantauan kegiatan pembangunan yang mempunyai dampak lalu lintas dan pengawasan pelaksanaan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi;
- h. Menyiapkan data audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. Menyiapkan pelaksanaan perbantuan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas serta angkutan jalan;
- j. Menyiapkan pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan;
- k. Menyiapkan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung keselamatan, pengawasan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. Menyiapkan pelaksanaan operasional terminal penumpang tipe B meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional terminal;
- m. Menyiapkan pelaksanaan manajemen lalu lintas kawasan/daerah wilayah kerja terminal penumpang tipe B;

- n. Menyiapkan penerbitan kartu pengawasan/kartu jam perjalanan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- o. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang;
- p. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tarif;
- q. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Sumber : Pergub Jateng 22 Tahun 2018

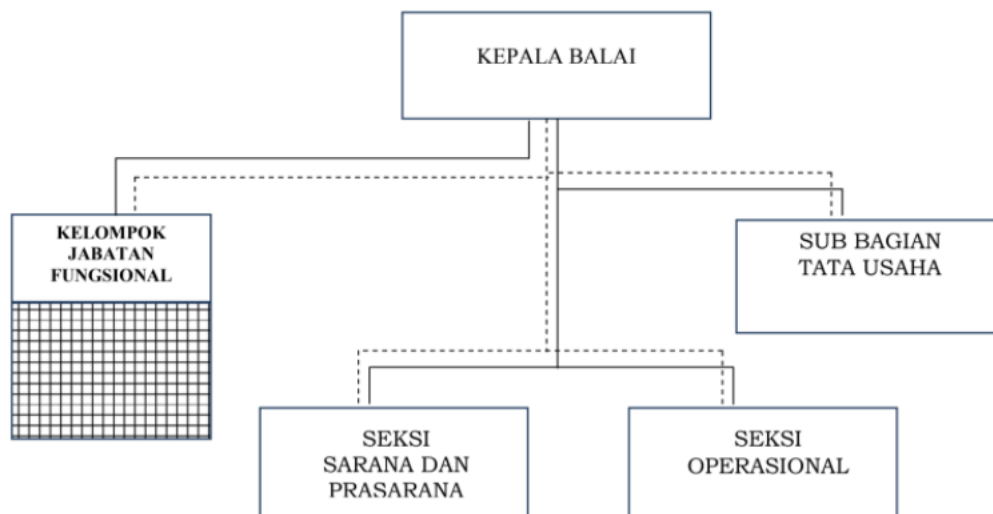
Gambar II.3. Struktur Organisasi Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Kelas B

3. Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan transportasi jawa tengah. Balai tersebut dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A melaksanakan tugas teknis operasional dan/ata kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi jawa tengah. Dalam melaksanakan tugas, Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya



Sumber : Pergub Jateng 22 Tahun 2018

Gambar II.4. Struktur Organisasi Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tata laksana (proses, prosedur dan mekanisme) diantaranya peta proses bisnis dinas perhubungan yang saat ini masih dalam proses penyusunan (menyesuaikan renstra perangkat daerah) serta standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan diantaranya adalah :

1. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/001/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Standart Operasional Prosedur Pengelolaan (*Bus Rapid Transit*) BRT Trans Jateng;
2. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/20/2020 tanggal 11 Januari 2019 tentang Standart Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/182/2019 3 Mei 2019 tentang Standart Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah;
4. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/21/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Standart Operasional Prosedur Sub Bagian Program;
5. Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/23/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Standart Operasional Prosedur Sub Keuangan pada Sekretariat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 061/17.845 tanggal 1 November 2021 tentang Standart Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Teknis Analisis Dampak lalu Lintas di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
7. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor. 067/80/2023 tentang Standart Operasional Prosedur Verifikasi Sertifikat Standart Pelaku Usaha Angkutan laut, Pelayaran Rakyat dan Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

A. Kondisi Infrastruktur Perhubungan

Untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah yang berdaya saing diperlukan peningkatan infrastruktur perhubungan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, utamanya Konektivitas Provinsi, Keselamatan Perjalanan Transportasi dan Kualitas Layanan Angkutan Umum.

1. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi

a. Angkutan Jalan

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi diantaranya Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan tidak dalam trayek yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi diataranya taxi, angkutan sewa khusus dan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) serta pelayanan angkutan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu daerah Provinsi).

1) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dins Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 551.2/321/2020 tentang Penetapan jaringan Trayek dan Kebutuha Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Jawa Tengah terdapat 272 trayek AKDP dengan kebutuhan kendaraan sebanyak 6.561 kendaraan sedangkan jumlah kendaraan pada tahun 2022 sebanyak 3.550 kendaraan. Adapun data kendaraan dari Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.1. Jumlah Bus dan Jumlah Perusahaan AKDP Di Provinsi Jawa Tengah

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kendaraan | Jumlah Perusahaan |
|----|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | Kab. Cilacap | 70 | 10 |
| 2 | Kab. Banyumas | 311 | 14 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 54 | 7 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 122 | 32 |
| 5 | Kab. Kebumen | 97 | 9 |
| 6 | Kab. Purworejo | 113 | 5 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 320 | 13 |
| 8 | Kab. Magelang | 81 | 15 |
| 9 | Kab. Boyolali | 82 | 21 |
| 10 | Kab. Klaten | 3 | 2 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 0 | 0 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 87 | 7 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 49 | 9 |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kendaraan | Jumlah Perusahaan |
|--------|-----------------|------------------|-------------------|
| 14 | Kab. Sragen | 43 | 7 |
| 15 | Kab. Grobogan | 64 | 4 |
| 16 | Kab. Blora | 7 | 1 |
| 17 | Kab. Rembang | 18 | 2 |
| 18 | Kab. Pati | 44 | 2 |
| 19 | Kab. Kudus | 98 | 7 |
| 20 | Kab. Jepara | 124 | 5 |
| 21 | Kab. Demak | 75 | 3 |
| 22 | Kab. Semarang | 109 | 2 |
| 23 | Kab. Temanggung | 219 | 2 |
| 24 | Kab. Kendal | 83 | 4 |
| 25 | Kab. Batang | 16 | 5 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 184 | 5 |
| 27 | Kab. Pemasang | 169 | 7 |
| 28 | Kab. Tegal | 152 | 5 |
| 29 | Kab. Brebes | 144 | 6 |
| 30 | Kota Magelang | 59 | 4 |
| 31 | Kota Surakarta | 109 | 8 |
| 32 | Kota Salatiga | 35 | 2 |
| 33 | Kota Semarang | 56 | 9 |
| 34 | Kota Pekalongan | 202 | 5 |
| 35 | Kota Tegal | 151 | 5 |
| Jumlah | | 3.550 | 244 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

2) Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Kondisi jumlah armada / kendaraan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung menurun, dari sekitar 4.498 kendaraan pada Tahun 2018, pada Tahun 2022 menjadi 3.312 kendaraan yang disebabkan kendaraan tidak laik jalan, rusak, dibesituakan dan tidak diremajakan. Adapun data kendaraan dari Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel II.2. Jumlah Bus Operasional dan Bus Cadangan AKAP Di Provinsi Jawa Tengah

| No | Tahun | Jumlah Bus AKAP | | | | Jumlah Bus Cadangan |
|----|-------|-----------------|-------|-------------|-------|---------------------|
| | | Ekonomi | | Non Ekonomi | | |
| | | Bus | Rit | Bus | Rit | |
| 1 | 2018 | 1.832 | 3.664 | 2.370 | 4.740 | 296 |
| 2 | 2019 | 1.832 | 3.664 | 2.370 | 4.740 | 296 |
| 3 | 2020 | 601 | 1.201 | 1.320 | 2.641 | 216 |
| 4 | 2021 | 402 | 804 | 2.670 | 5.340 | 216 |
| 5 | 2022 | 436 | 872 | 2.660 | 5.320 | 216 |

Sumber : BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah, 2023

3) Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

Pada Tahun 2022 Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dari 61 trayek dengan kebutuhan 880 kendaraan, yang sudah terdapat pelayanan sebanyak 27 trayek dengan total kendaraan 288 kendaraan. Adapun rincian trayek tersebut sebagai berikut :

Tabel II.3. Layanan Trayek AJDP Di Provinsi Jawa Tengah

| NO | KOTA ASAL TUJUAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI | RINCIAN KETETAPAN KEBUTUHAN ANGKUTAN AJDP | | | KODE PELAYANAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT (ASAL-TUJUAN) |
|--------------------------|---|--|-------------|---------------|--|
| | | JUMLAH KUOTA | SESUAI IJIN | SISA KUOTA | |
| I. REGULAR | | | | | |
| 1 | Cilacap - Pemalang | 12 | 0 | 12 | 233.0127-AJ |
| 2 | Cilacap - Purbalingga | 14 | 0 | 14 | 233.0103-AJ |
| 3 | Cilacap - Kota Pekalongan | 10 | 9 | 1 | 233.0175-AJ |
| 4 | Cilacap - Purwokerto | 16 | 9 | 7 | 233.0102-AJ |
| 5 | Cilacap - Semarang | 30 | 20 | 10 | 233.0174-AJ |
| 6 | Cilacap- Kota Tegal | 10 | 10 | 0 | 233.0176-AJ |
| 7 | Cilacap - Purworejo | 16 | 12 | 4 | 233.0106-AJ |
| 8 | Purwokerto - Surakarta | 12 | 0 | 12 | 233.0272-AJ |
| 9 | Purwokerto - Semarang | 95 | 61 | 34 | 233.0274-AJ |
| 10 | Purwokerto - Kota Pekalongan | 20 | 15 | 5 | 233.0275-AJ |
| 11 | Purwokerto - Kota Tegal | 12 | 0 | 12 | 233.0276-AJ |
| 12 | Semarang - Blora | 30 | 16 | 14 | 233.7416-AJ |
| 13 | Semarang - Kota Tegal | 10 | 6 | 4 | 233.7476-AJ |
| 14 | Semarang - Rembang | 10 | 0 | 10 | 233.7417-AJ |
| 15 | Semarang - Surakarta | 35 | 31 | 4 | 233.7472-AJ |
| 16 | Semarang - Purworejo | 14 | 0 | 14 | 233.7406-AJ |
| 17 | Semarang - Wonogiri | 20 | 0 | 20 | 233.7412-AJ |
| 18 | Temanggung - Purwokerto | 10 | 0 | 10 | 233.2302-AJ |
| 19 | Temanggung - Semarang | 10 | 0 | 10 | 233.2374-AJ |
| 20 | Pemalang - Surakarta | 10 | 6 | 4 | 233.2772-AJ |
| 21 | Pati - Klaten | 6 | 0 | 6 | 233.1810-AJ |
| 22 | Pati - Semarang | 20 | 10 | 10 | 233.1874-AJ |
| 23 | Banjarnegara - Surakarta | 10 | 5 | 5 | 233.0472-AJ |
| 24 | Banjarnegara - Semarang | 20 | 6 | 14 | 233.0474-AJ |
| 25 | Kota Pekalongan - Semarang | 14 | 0 | 14 | 233.7574-AJ |
| 26 | Kota Pekalongan - Surakarta | 10 | 0 | 10 | 233.7572-AJ |
| 27 | Purbalingga - Semarang | 12 | 7 | 5 | 233.0374-AJ |
| 28 | Purbalingga - Surakarta | 16 | 0 | 16 | 233.0372-AJ |
| 29 | Brebes - Wonogiri | 10 | 0 | 10 | 233.2912-AJ |
| 30 | Brebes - Purworejo | 4 | 0 | 4 | 233.2906-AJ |
| 31 | Brebes - Semarang | 15 | 5 | 10 | 233.2974-AJ |
| 32 | Surakarta - Cepu | 10 | 0 | 10 | 233.7216-AJ |
| 33 | Klaten - Semarang | 14 | 5 | 9 | 233.1274-AJ |
| 34 | Wonogiri - Semarang | 14 | 0 | 14 | 233.1274-AJ |
| 35 | Pekalongan - Semarang | 14 | 0 | 14 | 233.2674-AJ |
| 36 | Karanganyar - Semarang | 12 | 0 | 12 | 233.1374-AJ |
| 37 | Kebumen - Semarang | 14 | 5 | 9 | 233.0574-AJ |
| 38 | Sragen - Semarang | 10 | 0 | 10 | 233.1474-AJ |
| 39 | Kota Tegal - Surakarta | 14 | 0 | 14 | 233.7672-AJ |
| 40 | Sukoharjo - Pati | 4 | 4 | 0 | 233.1118-AJ |
| 41 | Jepara - Sukoharjo | 31 | 5 | 26 | 233.2011-AJ |
| 42 | Jepara - Surakarta | 10 | 0 | 10 | 233.2072-AJ |
| 43 | Wonosobo - Semarang | 10 | 0 | 10 | 233.0774-AJ |
| 44 | Wonosobo - Surakarta | 12 | 0 | 12 | 233.0772-AJ |
| 45 | Wonosobo - Tegal | 10 | 0 | 10 | 233.0776-AJ |
| 46 | Kudus - Wonosobo | 6 | 0 | 6 | 233.1907-AJ |
| II. DUKUNGAN KSPN | | | | | |
| 47 | Semarang - Jepara | 20 | 16 | 4 | 233.2074-AJ |
| 48 | Kota Magelang - Cilacap | 10 | 2 | 8 | 233.7101-AJ |
| 49 | Kota Magelang - Banjarnegara | 10 | 0 | 0 | 233.7104-AJ |
| 50 | Wonosobo - Cilacap | 10 | 0 | 10 | 233.0701-AJ |
| 51 | Sragen - Kota Magelang | 12 | 0 | 12 | 233.7414-AJ |
| 52 | Jepara - Kota Magelang | 19 | 12 | 7 | 233.2002-AJ |
| 53 | Jepara - Wonosobo | 4 | 0 | 4 | 233.2009-AJ |
| 54 | Rembang - Magelang (Borobudur) | 9 | 4 | 5 | 233.1708-AJ |
| 55 | Purwokerto - Kota Magelang | 16 | 0 | 16 | 233.0271-AJ |
| 56 | Magelang - Kudus | 6 | 0 | 6 | 233.0819-AJ |
| 57 | Magelang - Kota Tegal | 12 | 4 | 8 | 233.0876-AJ |
| 58 | Magelang - Semarang | 12 | 3 | 9 | 233.0874-AJ |
| 59 | Magelang - Surakarta | 6 | 0 | 6 | 233.0874-AJ |
| 60 | Magelang - Wonosobo | 10 | 0 | 10 | 233.0807-AJ |
| 61 | Pati - Magelang | 6 | 0 | 6 | 233.1808-AJ |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

4) Angkutan Tidak Dalam Trayek (Taxi dan Angkutan Sewa Khusus)

Pada Tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah jumlah kendaraan untuk Taxi sebanyak 559 Kendaraan, dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) sebanyak 2.788 Kendaraan. Adapun rincian per masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel II.4. Jumlah Angkutan Taxi, Pariwisata dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) Per Kabupaten/Kota

| Kab/Kota Pelayanan | Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Taksi | | | Kode Pelayanan Angkutan Taksi | Rincian Ketetapan Kebutuhan / Kuota Ask | | | Kode Pelayanan Angkutan Sewa Khusus |
|---------------------------------|---|----------------|---------------|--|--|----------------|---------------|---|
| | Jumlah Kuota | Sesuai Ijin | Sisa Kuota | | Jumlah Kuota | Sesuai Ijin | Sisa Kuota | |
| Kabupaten Kendal | 31 | 7 | 24 | 233.24-TX.01 | 60 | 14 | 46 | 233.24-ASK.01 |
| Kabupaten Demak | 13 | 0 | 13 | 233.21-TX.01 | 50 | 16 | 34 | 233.21-ASK.01 |
| Kabupaten Semarang (Ungaran) | 5 | 0 | 5 | 233.22-TX.01 | 207 | 138 | 69 | 233.22-ASK.01 |
| Kota Salatiga | 18 | 0 | 18 | 233.73-TX.01 | 257 | 185 | 72 | 233.73-ASK.01 |
| Kota Semarang | 499 | 225 | 274 | 233.74-TX.01 | 3.010 | 400 | 2.610 | 233.74-ASK.01 |
| Kab.Grobogan (Purwodadi) | 5 | 0 | 5 | 233.15-TX.01 | 30 | 7 | 23 | 233.15-ASK.01 |
| Kabupaten Jepara | 14 | 6 | 8 | 233.20-TX.02 | 68 | 1 | 67 | 233.20-ASK.02 |
| Kabupaten Kudus | 26 | 0 | 26 | 233.19-TX.02 | 120 | 45 | 75 | 233.19-ASK.02 |
| Kabupaten Pati | 12 | 5 | 7 | 233.18-TX.02 | 108 | 27 | 81 | 233.18-ASK.02 |
| Kabupaten Rembang | 5 | 0 | 5 | 233.17-TX.02 | 25 | 0 | 25 | 233.17-ASK.02 |
| Kabupaten Blora | 5 | 0 | 5 | 233.16-TX.02 | 25 | 0 | 25 | 233.16-ASK.02 |
| Kota Surakarta | 17 | 0 | 17 | 233.72-TX.03 | 937 | 253 | 684 | 233.72-ASK.03 |
| Kabupaten Boyolali | 115 | 68 | 47 | 233.09-TX.03 | 145 | 7 | 138 | 233.09-ASK.03 |
| Kabupaten Sukoharjo | 12 | 0 | 12 | 233.11-TX.03 | 90 | 400 | 310 | 233.11-ASK.03 |
| Kabupaten Karanganyar | 5 | 0 | 5 | 233.12-TX.03 | 35 | 272 | 237 | 233.12-ASK.03 |
| Kabupaten Wonogiri | 5 | 0 | 5 | 233.14-TX.03 | 75 | 3 | 72 | 233.14-ASK.03 |
| Kabupaten Sragen | 5 | 0 | 5 | 233.13-TX.03 | 50 | 67 | 3 | 233.13-ASK.03 |
| Kabupaten Klaten | 5 | 0 | 5 | 233.10-TX.03 | 80 | 24 | 56 | 233.10-ASK.03 |
| Kabupaten Purworejo | 52 | 34 | 18 | 233.06-TX.04 | 200 | 33 | 167 | 233.06-ASK.04 |
| Kabupaten Wonosobo | 30 | 28 | 2 | 233.07-TX.04 | 60 | 7 | 53 | 233.07-ASK.04 |
| Kota Magelang | 29 | 16 | 13 | 233.71-TX.04 | 125 | 9 | 116 | 233.71-ASK.04 |
| Kabupaten Magelang | 66 | 23 | 43 | 233.08-TX.04 | 177 | 161 | 16 | 233.08-ASK.04 |
| Kabupaten Temanggung | 34 | 5 | 29 | 233.23-TX.04 | 91 | 20 | 71 | 233.23-ASK.04 |
| Kabupaten Banjarnegara | 25 | 25 | 0 | 233.049- TX.05 | 50 | 4 | 46 | 233.04-ASK.05 |
| Kabupaten Purbalingga | 30 | 27 | 3 | 233.03-TX.05 | 60 | 54 | 6 | 233.03-ASK.05 |
| Kabupaten Banyumas | 135 | 70 | 65 | 233.02-TX.05 | 384 | 227 | 157 | 233.02-ASK.05 |
| Kabupaten Cilacap | 32 | 9 | 23 | 233.01-TX.05 | 77 | 118 | 41 | 233.01-ASK.05 |
| Kabupaten Kebumen | 3 | 0 | 3 | 233.05-TX.05 | 63 | 5 | 58 | 233.05-ASK.05 |
| Kota Pekalongan | 24 | 2 | 22 | 233.75-TX.06 | 175 | 31 | 144 | 233.75-ASK.06 |
| Kabupaten Batang | 5 | 0 | 5 | 233.25-TX.06 | 100 | 31 | 69 | 233.25-ASK.06 |
| Kabupaten Pekalongan | 5 | 0 | 5 | 233.26-TX.06 | 102 | 28 | 74 | 233.26-ASK.06 |
| Kabupaten Brebes | 5 | 0 | 5 | 233.29-TX.06 | 189 | 52 | 137 | 233.29-ASK.06 |
| Kabupaten Tegal | 7 | 0 | 7 | 233.76-TX.06 | 280 | 44 | 236 | 233.76-ASK.06 |
| Kota Tegal | 10 | 9 | 1 | 233.28-TX.06 | 174 | 23 | 151 | 233.28-ASK.06 |
| Kabupaten Pemalang | 5 | 0 | 5 | 233.27-TX.06 | 150 | 82 | 68 | 233.27-ASK.06 |
| JUMLAH | 1.294 | 559 | 735 | | 7.829 | 2.788 | 6.237 | |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

5) Angkutan Pedesaan

Angkutan pedesaan adalah angkutan pada jaringan trayek pedesaan yang melayani suatu kawasan pedesaan dan tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan. Dalam Hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan terhadap jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi, adapun trayek Angkutan pedesaan di Provinsi

Jawa Tengah sesuai dengan analisa awal kebutuhan adalah sebagai berikut :

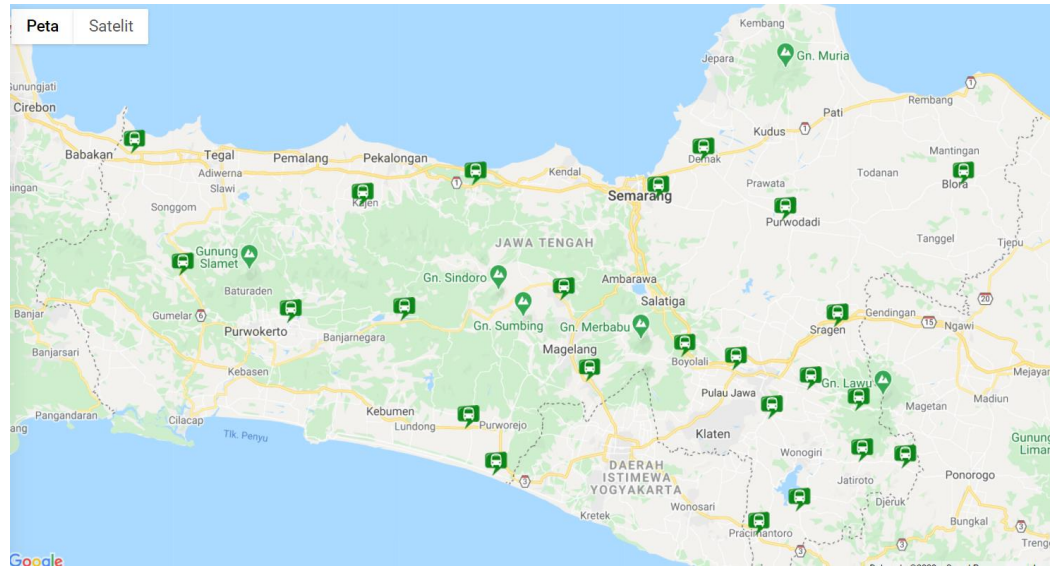
Tabel II.5. Kebutuhan Trayek Angkutan Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi

| No | TRAYEK | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Terminal Boja (Kendal) – Limbangan – Sumowono (Kab. Semarang) | Kab.Kendal dan Kab. Semarang |
| 2 | Bringin (Kab Semarang) – Ngajaran – Pringapus – Mendiro –Kawengen - Banyumeneng (Kab Demak) | Kab. Semarang, Kab. Demak |
| 3 | Terminal Tingkir (Salatiga) – Suruh – Karanggede – Waduk Kedungombo (Kab. Boyolali) | Kota Salatiga, Kab. Boyolali |
| 4 | Godong (Kab Grobogan) – Karangrayung – Juwangi – Waduk Kedungombo (Kab. Boyolali) | Kab. Grobogan, Kab. Boyolali |
| 5 | Majenang - Salem | Kab. Cilacap, Kab. Brebes |
| 6 | T. Juwana (tipe c) -Jakenan-Pucakwangi-Todanan-Terminal Ngawen (tipe c) | Kab. Pati, Kab. Blora |
| 7 | T. Lasem(tipe c)-Pamotan-T.Jatirogo (tipe c) | Kab. Rembang, Kab. Tuban |
| 8 | Terminal Watu Kelir (Kab Sukoharjo) – Pasar Krisak (Kab Wonogiri) | Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri |
| 9 | Solo – Sukoharjo – Songgorunggi – Mento – Klerong – Jatipuro – Jatiyoso (Kab Karanganyar) | Kota Surajarta, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar |
| 10 | Jatisrono (Kab Wonogiri) - Jatipuro (Kab. Karanganyar) | Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar |
| 11 | Sragen -Ngawi | Kab. Sragen, Kab. Ngawi |
| 12 | Sawangan (Kab Magelang) - Selo (Kab Boyolali) | Kab. Magelang, Kab. Boyolali |
| 13 | Muntilan (Kab Magelang) – Ngluwar – Bligo – Salam – Tempel - Jombor (Yogya) | Kab. Magelang, Jogja |
| 14 | Kaloran (Kab Temanggung) – Sumowono (Kab Semarang) | Kab. Temanggung, Kab. Semarang |
| 15 | Sapuran (Kab Wonosobo) – Kepil – Bruno (Kab Purworejo) | Kab. Wonosobo, Kab. Purworejo |
| 16 | Majenang (Kab Cilacap) – Salem (Kab Brebes) | Kab. Cilacap, Kab. Brebes |
| 17 | Sokaraja (Kab Banyumas) - Kemangkun – Bukateja (Kab Purbalingga) | Kab. Banyumas, kab. Purbalingga |
| 18 | Wanayasa (Kab Banyumas) - Batur - Dieng - Batas Wonosobo | Kab. Banyumas, Kab. Wonosobo |
| 19 | Baturaden (Kab Bayumas) – Serang Kab Purbalingga | Kab. Banyumas, kab. Purbalingga |
| 20 | Jatibarang - Balapulang | Kab. Brebes, Kab. Tegal |
| 21 | Pekalongan - Batang - Tulis - Bandar | Kota Pekalongan, Kab. Batang |
| 22 | Ketanggungan - Jatibarang - Slawi | Kab. Brebes, Kab. Tegal |
| 23 | Jatibarang - Margasari | Kab. Brebes, Kab. Tegal |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

b. Terminal Penumpang Tipe B

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B Di Jawa Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 24 terminal. Adapun berikut persebaran Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah :



Sumber : <http://gis.perhubungan.jatengprov.go.id/>, 2023

Gambar II.5. Persebaran Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah

Namun demikian dari 24 Terminal Penumpang Tipe B dimaksud, terdapat 3 terminal yang tidak layak operasi dikarenakan kondisinya belum memenuhi persyaratan administrasi (terkait aset) dan teknis minimal operasional terminal yaitu Terminal Nampurejo di Kabupaten Purworejo (Terminal Tipe B Nampurejo dalam proses penghapusan dan saat ini sudah tidak operasi, dengan Revisi SK Gub Nomor 551.22/31 Tahun 2019 karena sudah ada Terminal baru di Kutoarjo), Terminal Bintoro Kabupaten Demak dan Terminal Kartosuro di Kabupaten Sukoharjo. Di sisi lain dari 24 Terminal Penumpang Tipe B terdapat 6 terminal yang status asetnya belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel II.6. Kondisi Infrastruktur Simpul Terminal Penumpang Tipe B

| No | Nama Terminal | Kab / Kota | Kondisi | Status Aset |
|----|---------------|------------------|---------------------|---|
| 1 | Penggaron | Kota Semarang | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 2 | Purwodadi | Kab. Grobogan | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 3 | Gagak Rimang | Kab. Blora | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 4 | Bintoro | Kab. Demak | Tidak Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI |
| 5 | Banyuputih | Kab. Batang | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 6 | Kajen | Kab. Pekalongan | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 7 | Madureso | Kab. Temanggung | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 8 | Drs. Prayitno | Kab. Magelang | Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI |
| 9 | Penggung | Kab. Boyolali | Layak Operasi | Milik Pemprov (2019) |
| 10 | Pilangsari | Kab. Sragen | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 11 | Tegalgede | Kab. Karanganyar | Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab |
| 12 | Tawangmangu | Kab. Karanganyar | Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab |
| 13 | Jatisrono | Kab. Wonogiri | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 14 | Baturetno | Kab. Wonogiri | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 15 | Pracimantoro | Kab. Wonogiri | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 16 | Purwantoro | Kab. Wonogiri | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 17 | Kutoarjo | Kab. Purworejo | Proses Pembangunan | Milik Pemprov (2020) |

| No | Nama Terminal | Kab / Kota | Kondisi | Status Aset |
|----|---------------|-------------------|---|---|
| 18 | Nampurejo | Kab. Purworejo | Tidak Layak Operasi (saat ini sudah tidak operasional dan dalam proses penghapusan) | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso (sudah tidak beroperasi dari tahun 2022) |
| 19 | Kartosuro | Kab. Sukoharjo | Tidak Layak Operasi | Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso |
| 20 | Sukoharjo | Kab. Sukoharjo | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 21 | Banjarnegara | Kab. Banjarnegara | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 22 | Purbalingga | Kab. Purbalingga | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 23 | Bumiayu | Kab. Brebes | Layak Operasi | Milik Pemprov |
| 24 | Tanjung | Kab. Brebes | Layak Operasi | Milik Pemprov |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selain itu pada Tahun 2022 dilakukan survai Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pada Terminal Penumpang Tipe B berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel II.7. Tingkat Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Tipe B Tahun 2022

| No | Terminal | Kab/Kota | % Pemenuhan SPP Terminal Penumpang Tipe B | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|---|-----------|--------------------------|--------|--------------|-------------|
| | | | Ketersediaan Sarana Prasarana | | Kondisi Sarana Prasarana | | | |
| | | | Ada | Tidak Ada | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Penggaron | Kota Semarang | 64,00% | 36,00% | 48,29% | 41,67% | 6,62% | 3,42% |
| 2 | Purwodadi | Kab. Grobogan | 74,68% | 25,32% | 39,70% | 25,38% | 16,32% | 18,59% |
| 3 | Bintoro | Kab. Demak | 43,91% | 56,09% | 15,13% | 18,76% | 1,15% | 64,96% |
| 4 | Gagak Rimang | Kab. Blora | 56,30% | 43,70% | 40,34% | 43,55% | 7,78% | 8,33% |
| 5 | Pengagung | Kab. Boyolali | 49,25% | 50,75% | 29,70% | 65,81% | 4,49% | 0,00% |
| 6 | Pilangsari | Kab. Sragen | 55,34% | 44,66% | 31,71% | 63,93% | 4,36% | 0,00% |
| 7 | Kartosuro | Kab. Sukoharjo | 48,21% | 51,79% | 23,93% | 70,04% | 4,87% | 1,15% |
| 8 | Sukoharjo | Kab. Sukoharjo | 53,95% | 46,05% | 31,28% | 64,23% | 4,49% | 0,00% |
| 9 | Tegalgede | Kab. Karanganyar | 43,53% | 56,47% | 20,85% | 73,63% | 3,85% | 1,67% |
| 10 | Tawangmangu | Kab. Karanganyar | 43,27% | 56,73% | 22,09% | 73,42% | 3,21% | 1,28% |
| 11 | Baturetno | Kab. Wonogiri | 50,75% | 49,25% | 30,77% | 64,23% | 4,36% | 0,64% |
| 12 | Jatisrono | Kab. Wonogiri | 47,54% | 52,46% | 26,92% | 67,44% | 5,00% | 0,64% |
| 13 | Pracimantoro | Kab. Wonogiri | 47,54% | 52,46% | 26,50% | 69,02% | 3,85% | 0,64% |
| 14 | Purwantoro | Kab. Wonogiri | 46,26% | 53,74% | 25,64% | 69,23% | 4,49% | 0,64% |
| 15 | Madureso | Kab. Temanggung | 53,95% | 46,05% | 48,25% | 45,26% | 0,51% | 5,98% |
| 16 | Drs. Prayitno | Kab. Magelang | 49,04% | 50,96% | 41,20% | 53,80% | 4,36% | 0,64% |
| 17 | Kutoarjo | Kab. Purworejo | Masih proses pembangunan, belum beroperasi | | | | | |
| 18 | Nampurejo | Kab. Purworejo | Proses penghapusan dan saat ini sudah tidak operasi | | | | | |
| 19 | Banjarnegara | Kab. Banjarnegara | 51,39% | 48,61% | 21,79% | 69,23% | 5,77% | 3,21% |
| 20 | Purbalingga | Kab. Purbalingga | 55,45% | 44,55% | 35,26% | 58,33% | 6,41% | 0,00% |
| 21 | Banyuputih | Kab. Batang | 53,42% | 46,58% | 42,05% | 42,05% | 4,36% | 11,54% |
| 22 | Kajen | Kab. Pekalongan | 61,86% | 38,14% | 38,63% | 56,37% | 4,36% | 0,64% |
| 23 | Tanjung | Kab. Brebes | 46,37% | 53,63% | 40,34% | 43,76% | 4,36% | 11,54% |
| 24 | Bumiayu | Kab. Brebes | 43,70% | 56,30% | 40,17% | 53,21% | 5,98% | 0,64% |
| Rata-rata Jawa Tengah | | | 51,80% | 48,20% | 32,75% | 56,02% | 5,04% | 6,19% |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Rata-rata tingkat pemenuhan sarana prasarana berdasarkan Standar Pelayanan Penyelenggaraan (SPP) Terminal Penumpang Angkutan Jalan untuk 6 aspek (pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan / keteraturan, kenyamanan, kemudahan / keterjangkauan dan kesetaraan)

pada Tahun 2022 sebesar 51,80%. Adapun rata-rata kondisi sarana prasarana eksisting Terminal Penumpang Tipe B pada Tahun 2022 dalam kondisi baik sebesar 40,17%.

Sedangkan jumlah kendaraan masuk di Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022 sebanyak 452.746 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan bus besar dengan jumlah 271.242 kendaraan. Terminal dengan jumlah kendaraan masuk terbanyak ada di terminal Tipe B Purbalingga sebanyak 51.309 kendaraan.

Tabel II.8. Jumlah Kendaraan Masuk Terminal Tipe B di Jawa Tengah Tahun 2022

| No. | Nama Terminal | Kabupaten / Kota | Kendaraan Masuk | | | | Jumlah |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|---------|
| | | | Bis Besar | Bis Sedang | Bis Kecil | Mobil Penumpang Umum | |
| 1 | Penggaron | Kota Semarang | 11.449 | 1.079 | 605 | 1.343 | 14.476 |
| 2 | Purwodadi | Grobogan | 15.166 | 20.423 | - | - | 35.589 |
| 3 | Bintoro | Kab. Demak | 5.194 | 2.609 | 3.100 | - | 10.903 |
| 4 | Gagak Rimang | Kab. Blora | 23.376 | - | - | - | 23.376 |
| 5 | Penggung | Kab. Boyolali | 40.981 | 330 | - | - | 41.311 |
| 6 | Pilangsari | Kab. Sragen | 18.918 | 118 | 2.057 | - | 21.093 |
| 7 | Kartosuro | Sukoharjo | 17.442 | 6.178 | - | - | 23.620 |
| 8 | Sukoharjo | Sukoharjo | 22.631 | 5.227 | - | 2.229 | 30.087 |
| 9 | Tegalgede | Karanganyar | 3.672 | 2.251 | 440 | 3.829 | 10.192 |
| 10 | Tawangmangu | Karanganyar | 8.914 | 4.163 | 2.370 | - | 15.447 |
| 11 | Baturetno | Kab. Wonogiri | 7.990 | - | - | - | 7.990 |
| 12 | Jatisrono | Kab. Wonogiri | 11.969 | - | - | - | 11.969 |
| 13 | Pracimantoro | Kab. Wonogiri | 11.533 | 687 | - | - | 12.220 |
| 14 | Purwantoro | Kab. Wonogiri | 16.499 | - | - | - | 16.499 |
| 15 | Madureso | Temanggung | 12.466 | 10.848 | 1.555 | - | 24.869 |
| 16 | Dr. Prayitno Muntilan | Kab. Magelang | - | - | 6.801 | - | 6.801 |
| 17 | Kutoarjo | Purworejo | - | - | - | - | - |
| 18 | Nampurejo | Purworejo | - | - | - | - | - |
| 19 | Banjarnegara | Banjarnegara | 17.717 | 7.805 | 15.655 | 1.589 | 42.766 |
| 20 | Purbalingga | Purbalingga | 3.843 | 5.973 | 5.229 | 36.264 | 51.309 |
| 21 | Banyuputih | Batang | 4.777 | 6.611 | 10.327 | - | 21.715 |
| 22 | Kajen | Kab. Pekalongan | 9.161 | 1.335 | 4.271 | - | 14.767 |
| 23 | Tanjung | Brebes | 7.379 | - | 6.427 | - | 13.806 |
| 24 | Bumiayu | Brebes | 165 | 1.712 | 64 | - | 1.941 |
| | JUMLAH | | 271.242 | 77.349 | 58.901 | 45.254 | 452.746 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dalam mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas direncanakan penuntasan pembangunan terminal Tipe B Kutoarjo Kabupaten Purworejo, peningkatan Terminal Tipe B Gagak Rimang Kabupaten Blora, Terminal Tipe B Purwodadi Kabupaten Grobogan, Terminal Tipe B Banyuputih Kabupaten Batang, Terminal Tipe B Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, Terminal Tipe B Kajen Kabupaten Pekalongan dan Terminal Baturetno Kabupaten Wonogiri serta pemeliharaan pada semua terminal tipe B di Jawa Tengah.

Selain itu Pada Tahun 2017 telah disusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ), dimana

dalam salah satu rekomendasinya adalah pembangunan simpul transportasi Terminal Penumpang Tipe B.

Tabel II.9. Indikasi Rencana Kebutuhan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah

| No | Kab/Kota | Jumlah (Terminal) | Keterangan |
|--------|-----------------|-------------------|--|
| 1 | Kab. Kendal | 1 | |
| 2 | Kab. Rembang | 1 | Potensi alih status dari terminal tipe C menjadi terminal tipe B |
| 3 | Kab. Pati | 1 | |
| 4 | Kab. Jepara | 1 | Potensi alih status dari terminal tipe C menjadi terminal tipe B |
| 5 | Kab. Magelang | 1 | Sudah ada terminal Drs. Prayitno (lahan PT.KAI) |
| 6 | Kab. Temanggung | 1 | Sudah ada terminal madureso |
| 7 | Kab. Kebumen | 1 | |
| 8 | Kab. Cilacap | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Cilacap Bagian Timur • Cilacap Bagian Barat |
| 10 | Kab. Banyumas | 1 | |
| 11 | Kab. Brebes | 1 | Sudah ada terminal tanjung dan bumiayu |
| 12 | Kab. Purworejo | 1 | Proses Pembangunan, Tahap III Tahun 2023 (Terminal Kutoarjo) |
| Jumlah | | 12 | |

Sumber : RJLLAJ, 2017

Hal tersebut selaras dengan Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah dimana jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2022 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 7 kabupaten/kota dan tipe B di 10 kabupaten/kota.

Tabel II.10. Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Kabupaten / Kota | Terminal Tipe A | | Terminal Tipe B | |
|----|---------------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|
| | | Eksisting | Revisi RTRW Provinsi | Eksisting | Revisi RTRW Provinsi |
| | Kedungsepur | | | | |
| 1 | Kab. Kendal | | | | Ada |
| 2 | Kab. Demak | Demak* | Ada | Bintoro | Ada |
| 3 | Kab. Semarang | Bawen | Ada | | |
| 4 | Kota Semarang | Mangkang | Ada | Penggaron | Ada |
| 5 | Kota Salatiga | Tingkir | Ada | | |
| 6 | Kab. Grobogan | | Ada | Purwodadi | Ada |
| | Subosukowonosraten | | | | |
| 7 | Kab. Sukoharjo | | | Kartosuro, Sukoharjo | Ada |
| 8 | Kab. Boyolali | | Ada | Penggung | Ada |
| 9 | Kota Surakarta | Tirtonadi | Ada | | |
| 10 | Kab. Karanganyar | | | Tegalgede, Tawangmangu | Ada |
| 11 | Kab. Wonogiri | Giri Adipura | Ada | Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, dan Baturetno | Ada |
| 12 | Kab. Sragen | | Ada | Pilangsari | Ada |
| 13 | Kab. Klaten | Ir. Soekarno | Ada | | |
| | Bregasmalang | | | | |
| 14 | Kab. Brebes | | | Bumiayu dan Tanjung | Ada |
| 15 | Kab. Tegal | | | | Ada |
| 16 | Kota Tegal | Tegal | Ada | | Ada |
| 17 | Kab. Pemalang | Induk Pemalang | Ada | | Ada |

| No | Kabupaten / Kota | Terminal Tipe A | | Terminal Tipe B | |
|----|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| | | Eksisting | Revisi RTRW Provinsi | Eksisting | Revisi RTRW Provinsi |
| | Petanglong | | | | |
| 18 | Kab. Pekalongan | | | Kajen | Ada |
| 19 | Kab. Batang | | | Banyuputih | Ada |
| 20 | Kota Pekalongan | Pekalongan | Ada | | |
| | Barlinmascakeb | | | | |
| 21 | Kab. Banjarnegara | | Ada | Banjarnegara | Ada |
| 22 | Kab. Purbalingga | Bobotsari | Ada | Purbalingga | Ada |
| 23 | Kab. Banyumas | Purwokerto | Ada | | Ada* |
| 24 | Kab. Cilacap | Bangga Bangun Desa | Ada | | Ada |
| 25 | Kab. Kebumen | Kebumen | Ada | | Ada |
| | Purwomanggung | | | | |
| 26 | Kab. Purworejo | Purworejo | Ada | Kutoarjo* dan Nampurejo** | Ada |
| 27 | Kab. Wonosobo | Mendolo | Ada | | |
| 28 | Kab. Magelang | | | Drs. Prayitno | Ada |
| 29 | Kota Magelang | Tidar | Ada | | |
| 30 | Kab. Temanggung | | | Madureso | Ada |
| | Jekutibanglor | | | | |
| 31 | Kab. Jepara | | Ada | | Ada |
| 32 | Kab. Kudus | Jati | Ada | | |
| 33 | Kab. Pati | | Ada | | Ada |
| 34 | Kab. Rembang | | Ada | | Ada |
| 35 | Kab. Blora | Cepu | Ada | Gagak Rimang | Ada |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

Sehingga untuk dapat meningkatkan konektivitas provinsi perlu adanya peningkatan terminal tipe C menjadi Terminal tipe B baik secara dokumen perencanaan Kab/Kota (RTRW Kab/Kota) dan realisasi dari dokumen tersebut. Hal tersebut sebagai sinergi pengembangan kawasan utamanya Peningkatan status Terminal Tipe C Sukorejo Kabupaten Kendal, Terminal Tipe C Lasem Kabupaten Rembang, Terminal Tipe C di Kabupaten Jepara (Welahan/Pecangaan) dan Terminal Tipe C Kabupaten Cilacap.

c. Halte Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Untuk mendukung konektivitas jaringan transportasi aglomerasi perkotaan diperlukan peningkatan cakupan wilayah yang telah terlayani koridor Trans Jateng. Fasilitas yang mempengaruhi cakupan wilayah adalah pemenuhan jumlah halte yang representatif untuk memudahkan penumpang naik dan turun bus Trans Jateng. Antara Tahun 2018 – 2022 telah terbangun 280 halte di 6 koridor Trans Jateng. Pada Bulan Agustus 2023 direncanakan mulai beroperasi koridor ke-7 Trans Jateng pada koridor Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri, dengan kebutuhan halte sejumlah 122 unit, dimana sejumlah 32 unit sudah tersedia / terbangun karena berhimpitan dan merupakan fasilitas integrasi dengan layanan angkutan umum perkotaan eksisting di beberapa koridor Batik Solo Trans /BST.

Tabel II.11. Jumlah Shelter Pelayanan Trans Jateng Tahun 2022

| Koridor Trans Jateng | Inventarisasi Halte | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| | Kebutuhan | Terbangun | | Belum Terbangun* |
| | | Aset Pemprov | Aset Kab/Kota/Swasta | |
| Kota Semarang – Kabupaten Semarang (Bawen) | 94 | 40 | 52 | 2 |
| Kabupaten Banyumas (Purwokerto) - Purbalingga | 62 | 60 | 2 | 0 |
| Kota Semarang – Kendal (Weleri) | 53 | 40 | 13 | 0 |
| Kabupaten Magelang – Purworejo (Kutoarjo) | 49 | 36 | 0 | 13 |
| Surakarta – Sragen (Sumberlawang) | 85 | 17 | 0 | 68 |
| Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong) | 69 | 20 | 0 | 49 |
| Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri (Rencana Operasional Agustus 2023) | 122 | Rencana dibangun mulai 2023 | 32 | 90 |
| Total | 534 | 213 | 99 | 222 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Catatan : * Halte yang belum terbangun di beberapa tempat sudah dilengkapi rambu bus stop/MMT

Pemenuhan shelter direncanakan pada 4 (empat) koridor yaitu Koridor Kabupaten Magelang –Purworejo (Kutoarjo); Koridor Surakarta – Sragen (Sumberlawang); Koridor Kota Semarang – Grobogan (Gubug – Godong) dan Koridor Surakarta – Sukoharjo –Wonogiri.

d. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP

1) Pelabuhan

Mendasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 Tahun 2017, terdapat 14 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 2 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 Pelabuhan Pengumpan Regional dan 3 Pelabuhan Pengumpan Lokal. Adapun rincian dari pelabuhan dimaksud sebagaimana berikut :

Tabel II.12. Hirarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah

| No. | Pelabuhan | Hierarki | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------------------|--|
| 1. | Tanjung Emas, Kota Semarang | Utama | |
| 2. | Tanjung Intan, Kabupaten Cilacap | Pengumpul | |
| 3. | Tegal, Kota Tegal | Pengumpul | |
| 4. | Batang, Kabupaten Batang | Pengumpan Regional | <ul style="list-style-type: none"> • 2027 menjadi Pengumpul • Sebagian lahan reklamasi masih dalam proses di BPN |
| 5. | Sluke, Kabupaten Rembang | Pengumpan Regional | <ul style="list-style-type: none"> • 2020 menjadi Pengumpul • Lahan masih dalam proses di Pengadilan |
| 6. | Tasik Agung, Kabupaten Rembang | Pengumpan Regional | <ul style="list-style-type: none"> • Pada kolam pelabuhan terdapat karang hidup |
| 7. | Jepara, Kabupaten Jepara | Pengumpan Regional | |
| 8. | Karimunjawa, Kabupaten Jepara | Pengumpan Regional | |
| 9. | Juwana, Kabupaten Pati | Pengumpan Regional | <ul style="list-style-type: none"> • Dermaga terletak di alur sungai (kondisi saat ini dilihat dari |

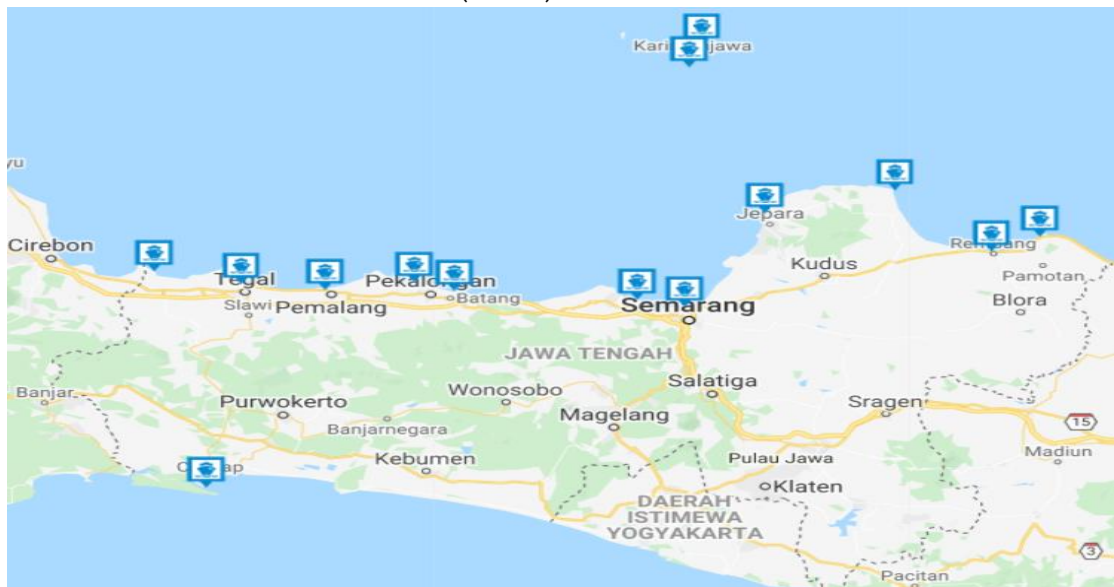
| No. | Pelabuhan | Hierarki | Keterangan |
|-----|------------------------------|--------------------|---|
| | | | <p>pelayanan sebagai pelabuhan perikanan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil studi FS/kelayakan Ta. 2022 pengembangan Pelabuhan Juwana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tidak memenuhi kelayakan sebagai Pelabuhan Pengumpan Regional dan direkomendasikan untuk menjadi Pelabuhan Perikanan. |
| 10. | Kendal, Kabupaten Kendal | Pengumpan Regional | <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tumpang tindih aset (terdapat layanan Pelabuhan penyeberangan dan Pelabuhan niaga) • Bagian dari Wilayah Kerja Tanjung Emas |
| 11. | Legonbajak, Kabupaten Jepara | Pengumpan Regional | |
| 12. | Brebes, Kabupaten Brebes | Pengumpan Lokal | <ul style="list-style-type: none"> • 2027 menjadi Pengumpan Regional |
| 13. | Pekalongan | Pengumpan Lokal | <ul style="list-style-type: none"> • 2027 menjadi Pengumpan Regional |
| 14. | Pemalang | Pengumpan Lokal | <ul style="list-style-type: none"> • 2027 menjadi Pengumpan Regional |

Sumber :

- KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), 2017

- Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada Tahun 2020 Kementerian Perhubungan mulai melakukan reviu KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).



Sumber : <http://gis.perhubungan.jatengprov.go.id/>, 2020

Gambar II.6. Persebaran Pelabuhan Di Provinsi Jawa Tengah

Sedangkan mendasarkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025, rencana hierarki pelabuhan sebagai berikut: Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang dan Tanjung Intan Cilacap), 6 Pelabuhan Pengumpul (Kendal, Tegal, Jepara, Batang, Sluke Rembang dan Juwana Pati), sisanya merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional sejumlah 8 pelabuhan dan Pelabuhan Pengumpan Lokal sejumlah 15 pelabuhan. Pelabuhan ini dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah

terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pelabuhan Pengumpan Regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, namun sampai dengan saat ini kewenangan dimaksud belum diserahkan secara P3D dari Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Perhubungan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proses saat ini pada tahap persiapan proses P3D utamanya terkait dengan personil, pendanaan dan pemetaan aset. Namun sesuai dengan hasil konsultasi dengan BKN Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional sudah kedaluarsa dengan demikian bisa dianggap sebagai pengalihan biasa; Diperkirakan pengalihan Pelabuhan Pengumpan Regional selesai di Tahun 2024, untuk penanganan di Tahun 2025-2026 untuk operasional Pelabuhan Pengumpan Regional (utamanya belanja pegawai, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta listrik).

Dalam menukung kawasan industri terdapat rencana pengembangan/pembangunan pelabuhan kendal dan pelabuhan batang. Progres pengembangan/pembangunan pelabuhan kendal saat ini untuk dermaga niaga eksisting dalam proses pembahasan konsesi antara KSOP tanjung Emas, Dishub Kendal dan BUP. Untuk Kendal Sea Port masih tahap penyelesaian perizinan pembangunan pelabuhan oleh Kawasan Ekonomi Khusus Kendal & BUP yang akan mengoperasikan pelabuhan (JV PSA singapora & BUP Swasta Nasional). Rencana *groundbreaking* tgl 1 Juni 2023. Progres pengembangan/pembangunan pelabuhan batang saat ini yaitu sudah adanya penugasan Pemerintah kepada PT. Pelindo untuk membangun jetty dan fasilitas pendukung melalui surat Dirjen Perhubungan Laut kepada Direktur Utama PT. Pelindo Nomor : PR.003/1/7/DJPL/2023 tanggal 6 Maret 2023 dimana saat ini *Feasibility Studi (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)* sudah selesai dilakukan. Untuk Pembangunan Jetty masih berjalan sesuai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan yaitu selesai pada akhir triwulan keempat (TW4) tahun 2024. Namun ada kemungkinan percepatan atau alternatif yang membuat pembangunan Jetty dapat selesai pada triwulan keempat (TW2) tahun 2024. Dalam pembangunan/pengembangan pelabuhan batang diperlukan dukungan percepatan perizinan dari Kementerian Perhubungan, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah guna mencapai target operasi pada Bulan Juni 2024.

Data Produksi Pelabuhan Di Jawa Tengah Tahun 2018 – 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.13. Data Produksi Pelabuhan Di Jawa Tengah Tahun 2018 - 2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pelabuhan | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Pelabuhan Tanjung Emas | | | | | |
| | a. Kunjungan kapal (<i>call</i>) | 3.410 ^{a)} | 3.804 | 2.663 | 3.634 | 3.537 |
| | b. GRT (GT) | 24.902.093 ^{a)} | 30.236.211 | 22.999.480 | 21.505.841 | 28.396.326 |
| | c. Kargo (ton) | 13.919.940 ^{a)} | 14.682.120 | 14.185.650 | 4.292.136 | 6.342.781 |
| | d. Kontainer (<i>Teus</i>) | 539.158 ^{a)} | 658.303 | 355.774 | 797.020 | 810.544 |
| | e. Penumpang (orang) | 280.142 ^{a)} | 390.693 | 134.997 | 182.342 | 341.244 |
| | f. <i>Dweelling Time</i> TPKS Impor | 4,5 | 4,91 | 3,84 | 3,93 | 3,65 |
| | g. <i>Dweelling Time</i> TPKS Expor | 3,4 | 2,48 | 2,78 | 3,52 | 3,05 |
| 3 | Pelabuhan Tanjung Intan | | | | | |
| | a. Kunjungan kapal (<i>call</i>) | 354 ^{a*)} | 1.240 | 1.441 | 1.030 | 150 *) |
| | b. GRT (GT) | 1.971.910 ^{a*)} | 23.713.251 | 28.826.775 | 18.658.236 | 2.355.920 |
| | c. Kargo (ton) | 6.276.236 ^{a*)} | 16.586.884 | 8.524.893 | 7.525.056 | 3.530.857 |

Sumber : Diolah dari PT. Pelindo, 2023

Selama tahun 2022 *dweelling time* Pelabuhan Tanjung Emas (sebagai Pelabuhan utama di Jawa Tengah) mencapai 3,65 hari (impor) yang mengalami kenaikan kinerja jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,93 hari. Sedangkan untuk ekspor juga mengalami kenaikan kinerja dari 3,52 hari menjadi 3,05 hari.

2) Perusahaan Angkutan Laut Dan Jasa Terkait Angkutan Di Perairan di Jawa Tengah

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Dalam memperlancar proses kegiatan di bidang Pelayaran terdapat kegiatan usaha atau yang sering disebut usaha jasa terkait. Usaha Jasa Terkait diantaranya berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas. Di Jawa Tengah terdapat 700 Angkutan Laut Dan Jasa Terkait Angkutan Di Perairan di Jawa Tengah. Data sebagaimana tabel :

Tabel II.14. Rekapitulasi Data Perusahaan Tahun 2022

| NO | KOTA/KAB | Bongkar Muat | Depo | EMKL | JPT | Tally | Penyewaan Peralatan Angkutan Laut | Angkutan Perairan Pelabuhan | Pelra | Angk. Laut | Amgk. Laut AKDP | Angk. Laut Khusus | TOTAL |
|----|-------------|--------------|------|------|-----|-------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------|-------------------|-------|
| 1 | Batang | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Boyolali | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cilacap | 23 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 52 |
| 4 | Demak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jepara | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 6 | Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kendal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Klaten | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Kudus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Pati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Pekalongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Pemalang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Purbalingga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Rembang | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Semarang | 28 | 11 | 12 | 395 | 3 | 0 | 0 | 39 | 67 | 1 | 1 | 557 |

| NO | KOTA/KAB | Bongkar Muat | Depo | EMKL | JPT | Tally | Penyewaan Peralatan Angkutan Laut | Angkutan Perairan Pelabuhan | Pelra | Angk. Laut | Amgk. Laut AKDP | Angk. Laut Khusus | TOTAL |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|-------------------|------------|
| 16 | Sragen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Sukoharjo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Surakarta | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Tegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Temanggung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Wonogiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | 79 | 11 | 15 | 429 | 5 | 5 | 0 | 50 | 103 | 1 | 2 | 700 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

3) Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mengoperasikan Kapal Motor Cepat (KMC) Kartini I yang melayani dari dan ke destinasi wisata Karimunjawa. Operasional KMC Kartini I mulai Tahun 2004 sebagai kapal perintis, namun sampai dengan Tahun 2020 secara teknis kapal tersebut sudah berumur \pm 16 tahun. Sehingga semakin membutuhkan perawatan rutin berupa *Overhaul* dan *Docking* rutin tahunan sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Surat Izin HSC (*Hight Speed Craft*). Selain itu saat ini pelayanan dari dan ke Karimunjawa sudah dilayani kapal penyeberangan swasta dan pelayanan penerbangan. Sehingga fungsi keperintisan KMC Kartini I sudah selesai, oleh karena itu diusulkan proses *Scrapping* kapal tersebut.

Sampai dengan tahun 2022 sudah dilakukan proses penghapusan aset kapal KMC Kartini dimana melalui proses Gubernur berkirim surat ke DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor:030/0010432 Tanggal 27 Juli 2020, Perihal Permohonan Persetujuan Penjualan Kapal Motor Cepat (KMC) Kartini karena sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah/bangunan yang bernilai lebih Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sebelum memperoleh persetujuan Gubernur terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan DPRD. Komisi C DPRD Provinsi Jateng pada prinsipnya menyetujui pelepasan KMC. Kartini 1 namun perlu adanya aprisial ulang mengingat masa berlaku aprisial selama 1 (satu) tahun, sehingga angka realitas sesuai dengan kondisi KMC Kartini 1 sebenarnya hal tersebut sebagaimana hasil rapat 16 September 2021 Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait. Pada Tanggal 25 Mei 2022 dilaksanakan rapat Komisi C DPRD Provinsi Jateng dengan OPD terkait dengan hasil Agar dilakukan kajian alternatif pelepasan aset KMC. Kartini 1 melalui mekanisme hibah atau Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Dinas Perhubungan telah melakukan komunikasi untuk pelaksanaan hibah KMC Kartini 1 dengan peninjauan minat kepada STIMAR AMNI Semarang, Lanal Semarang dan Poltektrans SDP Palembang. Terkait hibah KMC Kartini 1 ke STIMAR AMNI Semarang perlu dikaji dan diteliti secara cermat terhadap Akta Pendirian, AD/ART dan dokumen pendukung lainnya yang membuktikan bahwa AMNI adalah lembaga pendidikan yang bersifat non komersial

dan untuk peninjauan hibah KMC Kartini 1 ke Lanal Semarang atau Poltektrans SDP Palembang masih dalam proses.

Tabel II.15. Gambaran Pelayanan Dari dan Ke Karimunjawa Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai ^{a)} | 75.525 | 75.679 | 72.962 | 98.173 | 98.293 |
| 2. | Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang) | 1.796 | 2.725 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang) | 103.617 | 102.684 | 98.998 | 112.378 | 118.599 |
| 4. | Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang) | off | off | off | off | off |
| Jumlah Penumpang Terangkut | | 180.938 | 181.088 | 171.960 | 210.551 | 216.892 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 Tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 lintas penyeberangan sungai antar kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.16. Daftar Lintas Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi

| No | Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Sisi Dermaga | Fasilitas Penyeberangan | | | Dokumen Kapal | |
|----|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | Dermaga | Lampu Penerangan High Mast (Alur) | Lampu Penerangan (Dermaga) | Pas Sungai | Surat Keterangan Ukur |
| 1. | Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Lutungmati (Batang) | Non Permanen *) | - | 3 Unit (2019) | - | - |
| | | Desa Tegalsari (Kendal) | Non Permanen *) | - | 3 Unit (2018) | 2022 | 2022 |
| 2. | Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Yosorejo (Batang) | Non Permanen | - | 3 Unit (2021) | - | - |
| | | Desa Jatipurwo (Kendal) | Non Permanen *) | - | 6 Unit (2021) | - | - |
| 3. | Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal | Desa Tegalwangi (Brebes) | Non Permanen | 1 Unit (2022) | 3 Unit (2022) | - | - |
| | | Desa Bojong Prupuk Utara (Kab. Tegal) | Non Permanen | - | 4 Unit (2022) | - | - |
| 4. | Sungai Gangsa Kab. Brebes – Kota Tegal | Desa Randusanga Wetan (Brebes) | Non Permanen | - | 5 Unit (2019) | - | - |
| | | Desa Kajongan (Kota Tegal) | Non Permanen | - | 1 Unit (APBD Tegal) | - | - |
| 5. | Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo | Desa Sangkrah (Kota Surakarta) | Non Permanen | - | Belum Ada | - | - |
| | | Desa Gading (Sukoharjo) | Non Permanen | - | Belum Ada | - | - |

Keterangan : *) pelaksanaan direncanakan TA. 2023

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Fasilitas pelabuhan sungai utamanya dermaga sungai rencana akan dibangun pada periode 2024-2026 pada sisi dermaga Desa Yosorejo (Batang) dan dermaga Desa Randusanga Wetan (Brebes).

Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.432 Tahun 2017 juga terdapat 26 dermaga penyeberangan di Jawa Tengah yaitu : Pelabuhan Kendal, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa, (Cilacap di Sleko, Prenca, Alas Malang, Motehan, Sodong, Wijayapura, Lomanis, Cigintung, Perkuyan, Kutawaru, Klaces, Patimuan, Karanganyar), Waduk Gajah Mungkur di Dermaga wisata Waduk GM, Waduk Sempor, Waduk Mrica, Waduk Penjalin, Waduk Malahayu, (Wadaslintang di Dermaga Tritis, Kumijing, Plunjaran, Kalibening TPI2, TPI 4, Sumberejo, Prasasti (Kebumen), Erorej), (Kedung Ombo di Kedunguter Sragen, Kemukus Sragen, WKO Boyolayar Sragen, Embun Bening Kec.Geyer Kab. Grobogan, Wana Wisata desa Blawong Kemusu Boyolali)

e. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Perhubungan Udara

Jumlah Bandara di Provinsi Jawa Tengah ada 6 (enam) Bandara yaitu Bandara Internasional Ahmad Yani di Kota Semarang, Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali, Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap, Bandara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara, Bandara Ngloram di Kabupaten Blora dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga.

1) Bandara Internasional Ahmad Yani di Kota Semarang

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas IB
- b) *Runway* (54 : 2.680 m x 45 m (120.600 m²)
F/D/X/T)
- c) *Taxiway* (51 : 140 m x 15 m (2.100 m²)
R/D/X/T)
- d) *Apron* (27 : 296.24 m x 98 m (29.031.52
F/D/X/T) m²)
- e) Pesawat Terbesar : 5 PESAWAT JENIS B-737 / F-100; 2 PESAWAT JENIS CN-235, 2 HELICOPTER
- f) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : 5.546 m²
Kargo : 99 m²

Rute pergerakan penerbangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang saat ini diantaranya dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta; Bandara internasional Syamsudin Noor Banjarmasin; Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Kalimantan Timur; Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar; Bandara Iskandar Pangkal Bun; Bandara Internasional Hang Nadim Batam; Bandara Rahadi Osman Ketapang; dan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar.

Data pergerakan pesawat Bandara Internasional Ahmad Yani Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.17. Data Pergerakan Pesawat Bandara Internasional Ahmad Yani Tahun 2016-2022

| Pergerakan Pesawat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Datang | | | | | |
| - Domestik | 22.147 | 17.628 | 8.380 | 5.030 | 7.090 |
| - Internasional | 829 | 752 | 87 | 84 | 298 |
| Jumlah | 22.976 | 18.380 | 8.467 | 5.114 | 7.388 |
| Berangkat | | | | | |
| - Domestik | 22.125 | 17.621 | 8.340 | 5.104 | 7.313 |
| - Internasional | 835 | 757 | 158 | 15 | 70 |
| Jumlah | 22.960 | 18.378 | 8.498 | 5.119 | 7.383 |
| Total | 45.936 | 36.758 | 16.965 | 10.233 | 14.740 |

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura I, 2023

Pergerakan Pesawat pada Bandara Internasional Ahmad Yani baik domestik dan internasional pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena pandemi *covid-19* sehingga adanya pembatasan kegiatan masyarakat; dan untuk tahun 2021 dan 2022 mulai terjadi peningkatan kembali seiring dengan Pemberlakuan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan dalam transportasi.

Adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.18. Data Produksi Penumpang Bandara Internasional Ahmad Yani Tahun 2018-2022

| Penumpang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Datang | | | | | |
| - Domestik | 2.477.550 | 1.843.417 | 675.680 | 440.626 | 817.293 |
| - Internasional | 107.646 | 114.558 | 18.097 | 3 | 5 |
| Jumlah | 2.858.196 | 1.957.975 | 693.777 | 440.629 | 817.298 |
| Berangkat | | | | | |
| - Domestik | 2.446.652 | 1.813.494 | 660.383 | 435.461 | 800.816 |
| - Internasional | 108.902 | 114.140 | 17.631 | 6 | 72 |
| Jumlah | 2.555.554 | 1.927.634 | 678.014 | 435.467 | 800.888 |
| Transit | 19.499 | 21.194 | 6.278 | 8.883 | 13.299 |
| Total | 5.160.249 | 3.906.803 | 1.378.069 | 884.979 | 1.631.485 |

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura II, 2023

Tabel II.19. Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Internasional Ahmad Yani Tahun 2018-2022

| Angkutan Barang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Bongkar | | | | | |
| - Domestik | 12.377.571 | 7.542.831 | 3.707.178 | 2.979.118 | 1.378.827 |
| - Internasional | 934.692 | 1.183.049 | 138.640 | 1.199.425 | 3.515.300 |
| Jumlah | 13.312.263 | 8.725.880 | 3.845.818 | 4.178.543 | 4.894.127 |
| Muat | | | | | |
| - Domestik | 9.729.070 | 8.245.616 | 5.449.892 | 3.784.213 | 4.843.837 |
| - Internasional | 509.556 | 903.372 | 101.059 | 12.606 | 62.779 |
| Jumlah | 10.238.626 | 9.148.988 | 5.550.951 | 3.796.819 | 4.906.616 |
| Total | 23.550.889 | 17.874.868 | 9.396.769 | 7.975.362 | 9.800.743 |

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura II, 2023

2) Bandara Internasional Adi Sumarmo di Kabupaten Boyolali

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas IIA
- b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 2.600 m x 45 m (117.000 m²)
- c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 240 m x 23 m (5.520 m²)
- d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 102.5 m x 90 m (9.225 m²)
- e) Pesawat Terbesar : -
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 - Terminal : 9.483 m²
 - Kargo : 883 m²

Rute pergerakan penerbangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang saat ini diantaranya dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta; Bandara Internasional Supadio Pontianak ; dan Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar.

Data pergerakan pesawat Bandara Adi Sumarmo Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.20. Data Pergerakan Pesawat Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2018-2022

| Pergerakan Pesawat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Datang | | | | | |
| - Domestik | 11.846 | 9.007 | 4.291 | 9.013 | 3.260 |
| - Internasional | 309 | 416 | 42 | 5 | 109 |
| Jumlah | 12.155 | 9.423 | 4.333 | 9.018 | 3.369 |
| Berangkat | | | | | |
| - Domestik | 11.900 | 9.011 | 4.293 | 9.013 | 10.459 |
| - Internasional | 296 | 415 | 44 | 5 | 108 |
| Jumlah | 12.196 | 9.426 | 4.337 | 9.018 | 3.367 |
| Total | 24.351 | 19.849 | 8.670 | 18.036 | 13.936 |

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura II, 2023

Pergerakan Pesawat pada Bandara Internasional Adi Sumarmo baik domestik dan internasional pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena pandemi *covid-19* sehingga adanya pembatasan kegiatan masyarakat; dan untuk tahun 2021 dan 2022 mulai terjadi peningkatan kembali seiring dengan Pemberlakuan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan dalam transportasi.

adapun data produksi penumpang dan kargo bandara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.21. Data Produksi Penumpang Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2018-2022

| Penumpang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Datang | | | | | |
| - Domestik | 1.320.095 | 781.260 | 255.211 | 216.766 | 412.468 |
| - Internasional | 56.341 | 77.214 | 9.230 | 4 | 16.835 |
| Jumlah | 1.376.436 | 1.720.493 | 264.451 | 216.770 | 429.303 |
| Berangkat | | | | | |
| - Domestik | 1.188.811 | 783.833 | 260.269 | 210.590 | 427.305 |
| - Internasional | 57.431 | 78.186 | 7.968 | 4 | 16.904 |
| Jumlah | 1.246.242 | 862.019 | 268.237 | 210.594 | 444.209 |
| Transit | - | - | - | - | - |
| Total | 2.622.678 | 1.720.493 | 532.688 | 427.360 | 873.512 |

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura II, 2023

Tabel II.22. Data Produksi Kargo (Kilogram) Bandara Internasional Adi Sumarmo Tahun 2018-2022

| Angkutan Barang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Bongkar | | | | | |
| - Domestik | 3.946.631 | 1.665.444 | 553.158 | 361.954 | 300.891 |
| - Internasional | 1.050 | 4.240 | 0 | 15.158 | - |
| Jumlah | 3.947.681 | 1.669.684 | 553.158 | 377.112 | 300.891 |
| Muat | | | | | |
| - Domestik | 4.574.463 | 3.469.883 | 2.177.792 | 1.494.769 | 1.459.396 |
| - Internasional | 1.847 | 1.319 | - | - | - |
| Jumlah | 4.576.310 | 34.712.020 | 2.177.792 | 1.494.769 | 1.459.396 |
| Total | 8.523.991 | 5.140.886 | 2.730.950 | 1.871.881 | 1.760.287 |

Sumber : Diolah dari PT. Angkasa Pura II, 2023

3) Bandara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
- b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.400 m x 30 m (42.000 m²)
- c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 105 m x 18 m (1.890 m²)
- d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 190 m x 94 m (17.974 m²)
- e) Pesawat Terbesar : -
- f) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : 777 m²
Kargo : -

Data pergerakan pesawat Bandara Tunggul Wulung Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 yang terdiri dari pesawat niaga dan bukan niaga (pesawat latihan) sebagai berikut :

Tabel II.23. Data Pergerakan Pesawat Bandara Tunggul Wulung Tahun 2018-2022

| Pergerakan Pesawat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Datang | 8.040 | 7.892 | 3.963 | 3223 | 3.351 |
| Berangkat | 8.041 | 7.888 | 3.964 | 3223 | 3.352 |
| Total | 16.081 | 15.780 | 7.926 | 6.446 | 6.703 |

Sumber : UPBU Tunggul Wulung, 2023

Bandara Tunggul Wulung hanya melayani penerbangan domestik adapun data produksi penumpang

dan kargo bandara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.24. Data Produksi Penumpang Bandara Tunggal Wulung Tahun 2018-2022

| Penumpang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-------|-------|-------|------|------|
| Datang | 4.401 | 4.426 | 627 | 355 | 139 |
| Berangkat | 5.260 | 4.924 | 795 | 337 | 173 |
| Total | 9.661 | 9.350 | 1.422 | 692 | 312 |

Sumber : UPBU Tunggal Wulung, 2023

Tabel II.25. Data Produksi Bagasi dan Kargo (Kilogram) Bandara Tunggal Wulung Tahun 2018-2022

| Angkutan Barang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|--------|--------|-------|------|------|
| Bongkar | 25.999 | 38.725 | 5.383 | 52 | 18 |
| Muat | 28.651 | 29.447 | 5.008 | 514 | 144 |
| Total | 54.650 | 54.947 | 8.660 | 566 | 162 |

Sumber : UPBU Tunggal Wulung, 2023

4) Bandara Dewadaru Karimunjawa di Kabupaten Jepara

- a) Klasifikasi Bandara : Bandar Kelas III
- b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.400 m x 30 m (42.000 m²)
- c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 62 m x 15 m (930 m²)
- d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 91 m x 50 m (4.550 m²)
- e) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 - Terminal : 220 m²
 - Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun Tahun 2019 perpanjangan *Runway* dari 1.200 m x 30 m menjadi 1.400 m x 30 m, pengembangan terminal penumpang dari 120 m² menjadi 220 m² dan Tahun 2020 pekerjaan pagar pengaman bandara serta pekerjaan talud bandara . Panjang *Runway* dimaksud hanya bisa melayani 69,44 % (50 orang dari total kapasitas sebesar 72 orang) pada saat *Take Off*. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 16.010 m² untuk Perpanjangan *Runway* menjadi 1.600 m x 30 m. Pada Tahun 2022 terdapat perluasan gedung terminal penumpang dengan luas bangunan lantai 1 seluas 980 m² dan lantai 2 seluas 880 m²

Data pergerakan pesawat Bandara Dewadaru Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.26. Data Pergerakan Pesawat Bandara Dewadaru Tahun 2018 - 2022

| Pergerakan Pesawat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Datang | 302 | 344 | 31 | 4 | - |
| Berangkat | 302 | 344 | 31 | 4 | - |
| Total | 604 | 688 | 62 | 8 | - |

Sumber : UPBU Dewadaru, 2023

Pada tahun 2020-2022 terdapat penurunan pergerakan pesawat hal ini karena adanya pandemi Covid-19 pada triwulan 1 tahun 2020 dan setelah itu bandara Dewadaru masih belum melayani penerbangan reguler (bandara hanya melayanani penerbangan emergency/untuk kasus penerbangan darurat) selain itu juga terdapat pengembangan bandara.

Bandara Dewadaru hanya melayani penerbangan domestik. adapun data produksi penumpang bandara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.27. Data Produksi Penumpang Bandara Dewadaru Tahun 2018-2022

| Penumpang | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|-------|--------|-------|------|------|
| Datang | 4.022 | 6.978 | 900 | 20 | - |
| Berangkat | 4.601 | 7.896 | 962 | 27 | - |
| Total | 8.623 | 14.874 | 1.862 | 47 | - |

Sumber : UPBU Dewadaru, 2023

5) Bandara Ngloram di Kabupaten Blora

- a) Klasifikasi Bandara : -
- b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.600 m x 30 m (48.000 m²)
- c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) : 141,5 m x 23 m (3.254,5 m²)
- d) *Apron* (27 F/D/X/T) : 90 m x 60 m (5.400 m²)
- e) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis
- f) Fasilitas Sisi Darat :
 - Terminal : -
 - Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun 2019 perpanjangan *Runway* dari 800 m x 30 m menjadi 1.200 m x 30 m, pagar keliling dan saluran sedangkan Tahun 2020 pekerjaan perpanjangan *Runway* dari 1.200 m x 30 m menjadi 1.600 m x 30 m, Pembuatan *Tuning Area* dan Rekonstruksi *Apron*. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.792 m² untuk jalan akses ke bandara, jalan akses kendaraan PK-PPK, Gedung PK-PPK dan Gedung operasional. Pada Tahun 2022 Bandara Ngloram kembali diperluas melalui pengadaan lahan yang digunakan untuk keselamatan penerbangan.

Bandara Ngloram di Kabupaten Blora operasional Bulan November 2021 dan di resmikan pada tanggal 17 Desember 2021 namun operasional Bandara Ngloram berhenti beroperasi sementara waktu sejak Maret 2022 dikarenakan ada renovasi Bandara halim Perdana Kusuma yang merupakan rute penerbangan dari Blora ke Jakarta namun pada agustus 2022 penerbangan dibuka kembali dengan Rute Pondok cabe – Purbalingga dengan maskapi

Wings Air. Selain itu dengan selesainya revitalisasi bandara Halim Bandara halim Perdana Kusuma, penerbangan Bandara halim Perdana Kusuma – Bandara Ngloram dibuka kembali Pada 27 Januari 2023 dengan jadwal penerbangan setiap rabu dan Jumat. Adapun data produksi pesawat dan penumpang Bandara Ngloram dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.28. Data Pergerakan Pesawat Bandara Ngloram Tahun 2021-2022

| Pergerakan Pesawat | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|
| Datang | 10 | 8 |
| Berangkat | 10 | 8 |
| Total | 20 | 16 |

Sumber : UPBU Dewadaru, 2023

Tabel II.29. Data Produksi Penumpang Bandara Ngloram Tahun 2021-2022

| Penumpang | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|
| Datang | 448 | 204 |
| Berangkat | 483 | 234 |
| Total | 931 | 438 |

Sumber : UPBU Dewadaru, 2023

6) Bandara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga

- a) Klasifikasi Bandara : -
- b) *Runway* (54 F/D/X/T) : 1.600 m x 30 m (48.000 m²)
- c) *Taxiway* (51 R/D/X/T) :
- d) Komersiil : 160 m x 15 m (2.400 m²)
TNI AU : 150 m x 15 m (2.250 m²)
- e) *Apron* (27 F/D/X/T) :
- f) Komersiil : 103 m x 67 m (6.901 m²)
TNI AU : 79 m x 82 m (6.478 m²)
- g) Pesawat Terbesar : ATR 72-600 atau yg sejenis,
Boeng 737-200
- h) Fasilitas Sisi Darat :
Terminal : -
Kargo : -

Kegiatan pengembangan yang dilakukan pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membebaskan lahan ± 30.023 m² untuk operasional Tahap I panjang *Runway* 1.600 m. sedangkan Pada Tahun 2020 progres pengembangan Bandara Jenderal Besar Soedirman *Runway* 1.600 m x 30 m dan pembangunan *Apron* dan *Taxiway*. Pada Tahun 2021 dilakukan pengembangan sisi udara, parkir terminal dan jalan.

Bandara Jenderal Besar Soedirman diresmikan pada tanggal 11 Juni 2021 namun sudah operasional sejak 3 Juni 2021 dengan Citilink menjadi maskapai pertama yang melakukan penerbangan komersial di bandara tersebut. Rute yang dilayani mencakup Surabaya-Purbalingga dan

Purbalingga-Jakarta (via Bandara Halim Perdanakusuma) dengan frekuensi dua kali dalam seminggu, yakni pada hari Kamis dan Sabtu menggunakan ATR 72-600. Namun operasional Jenderal Besar Soedirman berhenti beroperasi sementara waktu sejak Desember 2021 dikarenakan ada renovasi Bandara Halim Perdana Kusuma yang merupakan rute penerbangan dari dan ke Jakarta. Pada Agustus 2022 penerbangan dibuka kembali dengan Rute Pondok Cabe – Purbalingga dengan maskapai Wings Air. Selain itu dengan selesainya revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma, penerbangan Bandara Halim Perdana Kusuma – Bandara Ngurah Rai dibuka kembali pada 10 November 2022 dengan jadwal penerbangan setiap Selasa dan Kamis. Adapun data produksi pesawat dan penumpang Bandara Jenderal Besar Soedirman dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.30. Data Pergerakan Pesawat Jenderal Besar Soedirman Tahun 2021-2022

| Pergerakan Pesawat | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|
| Datang | 34 | 18 |
| Berangkat | 34 | 18 |
| Total | 68 | 36 |

Sumber : Angkasa Pura II, 2023

Tabel II.31. Data Produksi Penumpang Bandara Jenderal Besar Soedirman Tahun 2021-2022

| Penumpang | 2021 | 2022 |
|-----------|-------|-------|
| Datang | 751 | 736 |
| Berangkat | 692 | 783 |
| Total | 1.443 | 1.519 |

Sumber : Angkasa Pura II, 2023

f. Infrastruktur Pendukung Konektivitas Perkeretaapian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum mempunyai / menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Panjang jalur Kereta Api di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sepanjang 1.680,26 Km / Sp, terdiri dari 929,498 Km / Sp jalur aktif dan 750,757 Km / Sp jalur non aktif. Dari 929,498 Km / Sp jalur aktif 292,44 Km / Sp merupakan jalur tunggal dan 637,06 Km / Sp jalur ganda. Adapun rincian panjang jalur Kereta Api sebagai berikut :

Tabel II.32. Rincian Panjang Jalur Kereta Api Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Km/Sp)

| No. | Uraian | Panjang |
|----------|--|---------|
| I. | AKTIF | 929,498 |
| I.A. | GANDA | 637,058 |
| I.A.1. | DAOP III CIREBON | 72,14 |
| I.A.1.a. | Batas Jabar (Cirebon) - Batas daop III IV (Brebek) | 36,91 |
| I.A.1.b. | Perbatasan Jabar (Cirebon) - Ketanggungan - Perbatasan DAOP III V | 35,23 |
| I.A.2. | DAOP IV SEMARANG | 292,59 |
| I.A.2.a. | Batas daop III IV (Brebek) - Semarang Tawang | 152,489 |
| I.A.2.b. | Semarang Tawang - Gambringan | 60,309 |
| I.A.2.c. | Gambringan - Perbatasan Jatim (Bojonegoro) | 79,792 |
| I.A.3. | DAOP V PURWOKERTO | 167,316 |
| I.A.3.a. | Perbatasan DAOP III V (Brebek) - Prupuk - Kroya | 89,292 |
| I.A.3.b. | Kroya - Kutoarjo - Batas Daop V VI (Purworejo) | 78,024 |
| I.A.4. | DAOP VI YOGYAKARTA | 105,012 |
| I.A.4.a. | Solo Balapan - Klaten - Brambanan | 43,256 |
| I.A.4.b. | Solo Balapan - Kedungbanteng - Perbatasan Jatim (Ngawi) | 41,72 |
| I.A.4.c. | Batas Daop V VI (Purworejo) - Wojo | 20,036 |
| I.B. | TUNGGAL | 292,44 |
| I.B.1. | DAOP IV SEMARANG | 65,032 |
| I.B.1.a. | Gundih - Gambringan | 9,915 |
| I.B.1.b. | Brumbung - Gundih - Batas daop IV VI (Grobogan) | 55,117 |
| I.B.2. | DAOP V PURWOKERTO | 89,774 |
| I.B.2.a. | Batas daop IV VI (Grobogan) - Solo Balapan | 39,614 |
| I.B.2.b. | Solo Balapan - Kadipiro - Bandara Adi Sumarmo | 13,5 |
| I.B.2.c. | Purwosari - Solo Kota - Sukoharjo - Wonogiri | 36,66 |
| I.B.3. | DAOP VI YOGYAKARTA | 137,634 |
| I.B.3.a. | Tegal - Slawi - Prupuk | 38,5 |
| I.B.3.b. | Perbatasan Jabar (Banjar) - Kroya | 75,344 |
| I.B.3.c. | Maos - Cilacap | 20,755 |
| I.B.3.d. | Gumilir - Karangtalun | 3,035 |
| II. | NON AKTIF | 750,757 |
| II.A. | DAOP IV SEMARANG | 475,773 |
| II.A.1. | Pekalongan - Wonopringgo | 6,52 |
| II.A.2. | Weleri - Besokor | 3,7 |
| II.A.3. | Kaliwungu - Kendal - Kalibodri | 17,64 |
| II.A.4. | Semarang Tawang - Semarang-Gudang | 1,32 |
| II.A.5. | Kedungjati - Tuntang - Ambarawa | 36,76 |
| II.A.6. | Ambarawa - Bedono - Batas DAOP | 13,14 |
| II.A.7. | Semarang - Demak - Kudus - Juana -Rembang-Jatirogo (Perbatasan Jawa Timur) | 150,31 |
| II.A.8. | Kudus - Mayong - Pecangaan | 23,7 |
| II.A.9. | Mayong - Welahan | 5,9 |
| II.A.10. | Juana - Tayu | 24,56 |
| II.A.11. | Rembang - Blora - Cepu | 71,99 |
| II.A.12. | Demak - Purwodadi - Blora | 104,2 |
| II.A.13. | Purwodadi - Ngrombo | 7,733 |
| II.A.14. | Wirosari - Kradenan | 8,3 |
| II.B. | DAOP V PURWOKERTO | 142,16 |
| II.B.1. | Maos - Purwokerto Timur | 28,99 |
| II.B.2. | Purwokerto - Purwokerto Timur - Wonosobo | 92,98 |
| II.B.3. | Banjarsari - Purbalingga | 6,52 |
| II.B.4. | Cilacap - Pelabuhan Cilacap | 1,98 |
| II.B.5. | Kutoarjo - Purworejo | 11,69 |

| No. | Uraian | Panjang |
|---------|----------------------------------|----------|
| II.C. | DAOP VI YOGYAKARTA | 132,82 |
| II.C.1. | Magelang - Secang – Ambarawa | 62,88 |
| II.C.2. | Secang - Temanggung – Parakan | 27,19 |
| II.C.3. | Purwosari – Kartasura – Boyolali | 23,02 |
| II.C.4. | Wonogiri – Baturetno | 19,73 |
| | TOTAL | 1.680,26 |

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2023

Jumlah stasiun di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 115 stasiun, pada DAOP IV Semarang sebanyak 43 stasiun, DAOP V Purwokerto sebanyak 40 stasiun dan DAOP VI Yogyakarta sebanyak 27 stasiun dan DAOP III sebanyak 5 Stasiun. Adapun rincian dan kode stasiun untuk masing-masing DAOP sebagai berikut :

Tabel II.33. Rincian dan Kode Stasiun Pada Masing-Masing DAOP di Provinsi Jawa Tengah

| No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis | No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis |
|--------|-------------------|------|---------|-----------|--------|----------------------|------|---------|-----------|
| DAOP 3 | | | | | 10 | Sidareja | SDR | Kelas 1 | Penumpang |
| 1 | Brebes | BB | Kelas 1 | Penumpang | 11 | Slawi | SLW | Kelas 2 | Penumpang |
| 2 | Ketanggungan | KGG | Kelas 2 | Penumpang | 12 | Prupuk | PPK | Kelas 2 | Penumpang |
| 3 | Tanjung | TGN | Kelas 3 | Penumpang | 13 | Bumiayu | BMA | Kelas 2 | Penumpang |
| 4 | Larangan (Ke Pwt) | LRA | Kelas 3 | Operasi | 14 | Gandrungmangun | GDM | Kelas 2 | Penumpang |
| 5 | Songgom | SGG | Kelas 3 | Operasi | 15 | Linggapura | LG | Kelas 3 | Operasi |
| DAOP 4 | | | | | 16 | Kreték | KRT | Kelas 3 | Operasi |
| 1 | Tegal | TG | Besar A | Penumpang | 17 | Patuguran | PAT | Kelas 3 | Operasi |
| 2 | Semarang Poncol | SMC | Besar A | Penumpang | 18 | Karangsari | KRR | Kelas 3 | Operasi |
| 3 | Semarang Tawang | SMT | Besar A | Penumpang | 19 | Karanggandul | KGD | Kelas 3 | Operasi |
| 4 | Pekalongan | PK | Besar C | Penumpang | 20 | Notog | NTG | Kelas 3 | Operasi |
| 5 | Cepu | CU | Besar C | Penumpang | 21 | Kebasen | KBS | Kelas 3 | Operasi |
| 6 | Pemalang | PML | Kelas 1 | Penumpang | 22 | Randegan | RDN | Kelas 3 | Operasi |
| 7 | Weleri | WLR | Kelas 1 | Penumpang | 23 | Kemranjen | KJ | Kelas 3 | Operasi |
| 8 | Ngrombo | NBO | Kelas 1 | Penumpang | 24 | Sumpiuh | SPH | Kelas 3 | Penumpang |
| 9 | Gundih | GD | Kelas 1 | Penumpang | 25 | Tambak | TBK | Kelas 3 | Operasi |
| 10 | Brumbung | BBG | Kelas 1 | Penumpang | 26 | Ijo | IJ | Kelas 3 | Operasi |
| 11 | Comal | CO | Kelas 2 | Operasi | 27 | Sruweng | SRW | Kelas 3 | Operasi |
| 12 | Sragi | SRI | Kelas 2 | Operasi | 28 | Wonosari | WNS | Kelas 3 | Operasi |
| 13 | Batang | BTG | Kelas 2 | Operasi | 29 | Kutowinangun | KWN | Kelas 3 | Penumpang |
| 14 | Ujungnegoro | UJN | Kelas 2 | Operasi | 30 | Prembun | PRB | Kelas 3 | Operasi |
| 15 | Krengseng | KNS | Kelas 2 | Operasi | 31 | Butuh | BTH | Kelas 3 | Operasi |
| 16 | Kalibodri | KBD | Kelas 2 | Operasi | 32 | Sikampung | SKP | Kelas 3 | Operasi |
| 17 | Kaliwungu | KLN | Kelas 2 | Operasi | 33 | Lebeng | LBG | Kelas 3 | Operasi |
| 18 | Mangkang | MKG | Kelas 2 | Operasi | 34 | Jeruklegi | JRL | Kelas 3 | Operasi |
| 19 | Jerakah | JRK | Kelas 2 | Operasi | 35 | Kawunganten | KWG | Kelas 3 | Operasi |
| 20 | Alastua | ATA | Kelas 2 | Operasi | 36 | Cipari | CPI | Kelas 3 | Operasi |
| 21 | Gambringan | GBN | Kelas 2 | Penumpang | 37 | Meluwung | MLW | Kelas 3 | Operasi |
| 22 | Kradenan | KNN | Kelas 2 | Penumpang | 38 | Kasugihan | KH | Kelas 3 | Operasi |
| 23 | Doplang | DPL | Kelas 2 | Operasi | 39 | Karangkandri | KKD | Kelas 3 | Operasi |
| 24 | Randublatung | RBG | Kelas 2 | Penumpang | 40 | Gumilir | GM | Kelas 3 | Operasi |
| 25 | Larangan (Ke Smt) | LR | Kelas 3 | Barang | Daop 6 | | | | |
| 26 | Suradadi | SD | Kelas 3 | Operasi | 1 | Solo Balapan | SLO | Besar A | Penumpang |
| 27 | Petarukan | PTA | Kelas 3 | Operasi | 2 | Solo Jebres | SK | Besar C | Penumpang |
| 28 | Kuripan | KRP | Kelas 3 | Operasi | 3 | Purwosari | PWS | Besar C | Penumpang |
| 29 | Plabuan | PLB | Kelas 3 | Operasi | 4 | Klaten | KT | Kelas 1 | Penumpang |
| 30 | Tegowanu | TGW | Kelas 3 | Operasi | 5 | Brambanan | BBN | Kelas 1 | Penumpang |
| 31 | Gubug | GUB | Kelas 3 | Penumpang | 6 | Bandara Adi Soemarmo | SMO | Kelas 1 | Penumpang |
| 32 | Karang Jati | KGT | Kelas 3 | Penumpang | 7 | Ceper | CE | Kelas 2 | Penumpang |
| 33 | Sedadi | SDI | Kelas 3 | Penumpang | 8 | Sragen | SR | Kelas 2 | Penumpang |
| 34 | Tanggung | TGG | Kelas 3 | Operasi | 9 | Jenar | JN | Kelas 3 | Penumpang |
| 35 | Kedungjati | KEJ | Kelas 3 | Penumpang | 10 | Wojo | WJ | Kelas 3 | Penumpang |

| No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis | No | Nama Stasiun | Kode | Kelas | Jenis |
|--------|--------------|------|---------|-----------|----|----------------|------|---------|-----------|
| 36 | Padas | PDS | Kelas 3 | Operasi | 11 | Srowot | SWT | Kelas 3 | Penumpang |
| 37 | Telawah | TLW | Kelas 3 | Penumpang | 12 | Delanggu | DL | Kelas 3 | Penumpang |
| 38 | Karangsono | KSO | Kelas 3 | Penumpang | 13 | Gawok | GW | Kelas 3 | Penumpang |
| 39 | Jambon | JBN | Kelas 3 | Penumpang | 14 | Solo Kota | STA | Kelas 3 | Penumpang |
| 40 | Panunggalan | PNL | Kelas 3 | Operasi | 15 | Sukoharjo | SKH | Kelas 3 | Penumpang |
| 41 | Sulur | SL | Kelas 3 | Operasi | 16 | Pasar Nguter | PNT | Kelas 3 | Penumpang |
| 42 | Wadu | WDU | Kelas 3 | Operasi | 17 | Wonogiri | WNG | Kelas 3 | Penumpang |
| 43 | Kapuan | KPA | Kelas 3 | Operasi | 18 | Palur | PL | Kelas 3 | Operasi |
| DAOP 5 | | | | | 19 | Kemiri | KMR | Kelas 3 | Operasi |
| 1 | Purwokerto | PWT | Besar A | Penumpang | 20 | Masaran | MSR | Kelas 3 | Operasi |
| 2 | Kutoarjo | KTA | Besar A | Penumpang | 21 | Kebon Romo | KRO | Kelas 3 | Operasi |
| 3 | Kroya | KYA | Besar B | Penumpang | 22 | Kedung Banteng | KDB | Kelas 3 | Operasi |
| 4 | Maos | MA | Besar C | Penumpang | 23 | Kalioso | KO | Kelas 3 | Operasi |
| 5 | Kebumen | KM | Besar C | Penumpang | 24 | Salem | SLM | Kelas 3 | Penumpang |
| 6 | Karangtalun | KRL | Besar C | Barang | 25 | Sumberlawang | SUM | Kelas 3 | Operasi |
| 7 | Cilacap | CP | Kelas 1 | Penumpang | 26 | Goprak | GPK | Kelas 3 | Operasi |
| 8 | Karanganyar | KA | Kelas 1 | Penumpang | 27 | Kadipiro | KDO | Kelas 3 | Penumpang |
| 9 | Gombong | GB | Kelas 1 | Penumpang | | | | | |

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2023

2. Infrastruktur Pendukung Keselamatan Perjalanan Transportasi

Jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2018-2022, rata-rata korban jiwa setiap tahunnya sebesar ±4.000 jiwa dimana rata-rata per hari terdapat 11 orang yang meninggal dunia di jalan. Indeks Fatalitas Kecelakaan Per 100.000 Penduduk pada Tahun 2022 sebesar 11,91, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Mempertimbangkan hal tersebut peningkatan keselamatan di jalan harus dijadikan sebagai salah satu prioritas penanganan yang dilakukan secara komprehensif. Adapun selengkapnya data terkait tingkat fatalitas kecelakaan di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut

Tabel II.34. Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2018-2022

| Tahun | Jumlah Kematian (Jiwa) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk |
|-------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 2018 | 4.116 | 34.490.835 | 11,93 |
| 2019 | 4.215 | 34.718.204 | 12,14 |
| 2020 | 3.508 | 36.516.035 | 9,61 |
| 2021 | 3.750 | 36.742.501 | 10,21 |
| 2022 | 4.409 | 37.032.410 | 11,91 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Data kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah fluktuatif dari tahun ke tahun, adapun jumlah kejadian kecelakaan terbanyak 30.730 Kejadian pada Tahun 2022 dan jumlah kejadian kecelakaan paling sedikit 19.016 Kejadian di Tahun 2018.

Tabel II.35. Data Kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah

| No | Uraian | Jumlah | | | | | Ket |
|----|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| A | Kecelakaan Lalu Lintas | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kejadian | 19.016 | 25.962 | 21.396 | 22.521 | 30.730 | Kasus |
| 2 | Korban Meninggal Dunia | 4.116 | 4.141 | 3.508 | 3750 | 4.409 | Orang |
| 3 | Korban Luka Berat | 97 | 96 | 48 | 77 | 77 | Orang |
| 4 | Korban Luka Ringan | 21.679 | 30.555 | 24.495 | 25.847 | 35.869 | Orang |
| 5 | Kerugian Materiil (Rp.000) | 14.138.632 | 17.858.087 | 14.746.525 | 16.836.435 | 24.819.905 | Rupiah |
| B | Jenis Kecelakaan Lalu Lintas | | | | | | |
| 1 | Laka Tunggal | 1.049 | 5.491 | 4.290 | 4.781 | 6.119 | Kejadian |
| 2 | Depan - Depan | 2.961 | 3.144 | 2.464 | 3.035 | 3.995 | Kejadian |
| 3 | Depan - Belakang | 3.059 | 3.510 | 2.812 | 3.348 | 4.567 | Kejadian |
| 4 | Depan - Samping | 6.052 | 7.282 | 6.911 | 5.927 | 9.474 | Kejadian |
| 5 | Beruntun / Karambol | 734 | 539 | 385 | 391 | 514 | Kejadian |
| 6 | Tabrak Manusia | 1.762 | 2.138 | 1.743 | 1.741 | 2.282 | Kejadian |
| 7 | Tabrak Lari | 1.540 | 1.521 | 1.222 | 1.679 | 1.814 | Kejadian |
| 8 | Tabrak Hewan | 1 | 11 | 10 | 9 | 6 | Kejadian |
| 9 | Lain-Lain | 1.858 | 2.326 | 1.559 | 1.748 | 1.992 | Kejadian |
| | Jumlah | 19.016 | 25.962 | 21.396 | 22.659 | 30.763 | Kejadian |
| C | Profesi Pelaku Laka Lintas | | | | | | |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 507 | 771 | 556 | 547 | 671 | Orang |
| 2 | Karyawan / Swasta | 5.218 | 7.177 | 5.593 | 5.172 | 7.215 | Orang |
| 3 | Mahasiswa / Pelajar | 3.203 | 4.299 | 2.807 | 3.779 | 5.660 | Orang |
| 4 | Pengemudi | 95 | 103 | 68 | 68 | 116 | Orang |
| 5 | TNI | 45 | 86 | 68 | 54 | 59 | Orang |
| 6 | Polri | 103 | 119 | 99 | 89 | 80 | Orang |
| 7 | Lain-Lain | 7.389 | 9.955 | 9.261 | 10.260 | 12.798 | Orang |
| | Jumlah | 16.560 | 22.510 | 18.452 | 19.969 | 26.599 | Orang |
| D | Usia Pelaku Laka Lintas | | | | | | |
| 1 | < 15 Tahun | 795 | 102 | 97 | 91 | 179 | Orang |
| 2 | 16 - 30 Tahun | 8.030 | 2.191 | 1.495 | 1.724 | 3.016 | Orang |
| 3 | 31 - 40 Tahun | 2.850 | 9.787 | 7.989 | 9.829 | 11.794 | Orang |
| 4 | 41 - 50 Tahun | 3.139 | 5.130 | 4.329 | 4.869 | 5.694 | Orang |
| 5 | > 51 Tahun | 1.746 | 5.300 | 4.542 | 5.106 | 5.916 | Orang |
| | Jumlah | 16.560 | 22.510 | 18.452 | 21.619 | 26.599 | Orang |
| E | SIM Pelaku Laka Lintas | | | | | | |
| 1 | A | 2.010 | 2.142 | 1.878 | 2.141 | 2.229 | Unit |
| 2 | A UMUM | 20 | 18 | 13 | 11 | 25 | Unit |
| 3 | B1 | 581 | 649 | 593 | 659 | 526 | Unit |
| 4 | B1 UMUM | 616 | 616 | 428 | 467 | 459 | Unit |
| 5 | BII | 162 | 150 | 133 | 138 | 191 | Unit |
| 6 | B II UMUM | 997 | 831 | 746 | 836 | 1.488 | Unit |
| 7 | C | 7.481 | 9.572 | 7.918 | 8.870 | 8.503 | Unit |
| 8 | SIM Internasional | - | - | - | - | - | Unit |
| 9 | Tanpa SIM | 4.693 | 8.532 | 6.742 | 23.669 | 13.178 | Unit |
| | Jumlah | 16.560 | 22.510 | 18.451 | 36.791 | 26.599 | Unit |

| No | Uraian | Jumlah | | | | | Ket |
|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| F | Kendaraan Yang Terlibat Laka Lantas | | | | | | |
| 1 | Sepeda Motor | 23.183 | 30.763 | 26.028 | 29.531 | 37.759 | Unit |
| 2 | Mobil Penumpang | 2.978 | 3.438 | 2.720 | 3.020 | 3.688 | Unit |
| 3 | Mobil Bus | 1.157 | 737 | 280 | 307 | 280 | Unit |
| 4 | Mobil Barang | 2.789 | 3.373 | 3.002 | 3.892 | 4.267 | Unit |
| 5 | Kendaraan Khusus | 66 | 78 | 17 | 82 | 53 | Unit |
| 6 | Kendaraan Tidak Bermotor | 1.460 | 1.546 | 1.512 | 1.504 | 2.188 | Unit |
| | Jumlah | 31.633 | 39.935 | 33.559 | 38.336 | 48.235 | Unit |
| G | Lokasi Kejadian Laka Lantas | | | | | | |
| 1 | Berdasarkan Kawasan | | | | | | |
| a | Kawasan Pemukiman | 13.352 | 16.898 | 14.306 | 15.118 | 21.948 | Perkara |
| b | Kawasan Perbelanjaan | 2.011 | 454 | 212 | 2.698 | 1.005 | Perkara |
| c | Perkantoran | 340 | 2.535 | 2.145 | | 2.249 | Perkara |
| d | Kawasan Wisata | 90 | 124 | 112 | 104 | 129 | Perkara |
| e | Kawasan Industri | 34 | 27 | 23 | 155 | 18 | Perkara |
| f | Lain-lain | 3.189 | 5.924 | 4.598 | 4.581 | 5.414 | Perkara |
| | Jumlah | 19.016 | 25.962 | 21.396 | 22.656 | 30.763 | Perkara |
| 2 | Berdasarkan Status Jalan | | | | | | |
| a | Nasional | 3.817 | 4.299 | 4.266 | 4.598 | 5.701 | Perkara |
| b | Propinsi | 5.850 | 6.653 | 5.075 | 5.282 | 6.344 | Perkara |
| c | Kab/Kota | 8.189 | 11.135 | 9.821 | 10.474 | 16.133 | Perkara |
| d | Jalan TOL | 50 | 383 | 162 | 224 | 243 | Perkara |
| e | Lainnnya | 1.110 | 3.492 | 2.072 | 227 | 2.342 | Perkara |
| | Jumlah | 19.016 | 25.962 | 21.396 | 20.805 | 30.763 | Perkara |
| 3 | Berdasarkan Fungsi Jalan | | | | | | |
| a | Arteri | 4.174 | 5.302 | 5.220 | 4.345 | 5.219 | Perkara |
| b | Kolektor | 9.233 | 11.779 | 9.069 | 11.345 | 15.026 | Perkara |
| c | Lokal | 4.923 | 7.059 | 6.050 | 6.128 | 9.552 | Perkara |
| d | Lingkungan | 668 | 1.268 | 941 | 691 | 766 | Perkara |
| e | Lain-Lain | 18 | 554 | 116 | 12 | 200 | Perkara |
| | Jumlah | 19.016 | 25.962 | 21.396 | 22.521 | 30.763 | Perkara |
| H | Faktor Penyebab Laka Lantas | | | | | | |
| 1 | Manusia | 14.221 | 19.089 | 17.006 | 15.710 | 25.585 | Perkara |
| 2 | Alam | 507 | 434 | 216 | 651 | 666 | Perkara |
| 3 | Kelaikan Kendaraan | 1.622 | 2.471 | 388 | 206 | 211 | Perkara |
| 4 | Kelaikan Jalan | 2.666 | 3.968 | 3.786 | 4.005 | 4.301 | Perkara |
| | Jumlah | 19.016 | 25.962 | 21.396 | 20.572 | 30.763 | Perkara |
| I | Kecelakaan Lalu Lintas Menonjol | | | | | | |
| 1 | Jumlah Kejadian | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | Kasus |
| 2 | Korban Meninggal Dunia | 36 | 13 | 13 | 27 | 41 | Orang |
| 3 | Korban Luka Berat | 2 | - | 1 | 3 | 2 | Orang |
| 4 | Korban Luka Ringan | 35 | - | 20 | 27 | 22 | Orang |

| No | Uraian | Jumlah | | | | | Ket |
|----|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 5 | Kerugian Materiil (Rp.000) | 265.800 | 12.000 | 52.200 | 125.000 | 215.000 | Rupiah |

Sumber : Polda Jateng, 2023

Dengan kondisi ini perlu upaya peningkatan kinerja komponen yang mempengaruhi Kejadian Kecelakaan Transportasi yang diantaranya Pemasangan fasilitas keselamatan jalan, Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK); Pelaksanaan ramp check; Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan; Penanganan perlintasan sebidang dan Pemenuhan fasilitas penyeberangan sungai.

a. Fasilitas Keselamatan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/11/Tahun 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 173 ruas (2.440,12 Km). Terbagi dalam 6 (enam) Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah, adapun masing-masing Balai mengampu Ruas Jalan Provinsi sebagai berikut :

Tabel II.36. Jumlah dan Panjang Ruas Jalan Provinsi Per BPSPP Wilayah

| No | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan (BPSPP) | Lokasi | Jumlah Ruas | Panjang (Km) | Prosentase Panjang Ruas Jalan (%) |
|--------|--|------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1 | BPSPP Wilayah I Kelas A | Semarang | 28 | 413,92 | 16,96% |
| 2 | BPSPP Wilayah II Kelas B | Pati | 23 | 347,39 | 14,23% |
| 3 | BPSPP Wilayah III Kelas A | Surakarta | 39 | 506,78 | 20,77% |
| 4 | BPSPP Wilayah IV Kelas A | Magelang | 28 | 380,39 | 15,59% |
| 5 | BPSPP Wilayah V Kelas B | Banyumas | 28 | 320,25 | 13,12% |
| 6 | BPSPP Wilayah VI Kelas A | Pekalongan | 27 | 471,78 | 19,33% |
| Jumlah | | | 173 | 2.440,12 | 100% |

Sumber : diolah dari Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 622/11 tahun 2022

Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (Surakarta) paling banyak mengampu Ruas Jalan Provinsi sebanyak 39 Ruas Jalan dengan Panjang 506,78 Km (20,77%).

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Ruas Jalan Provinsi merupakan kegiatan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah utamanya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), adapun perkembangan jumlah pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dari Tahun 2016-2020 sebagai berikut :

Tabel II.37. Perkembangan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas
Perlengkapan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi

| No | Uraian | Kebu- tuhan | Tahun | | | | | Keter- sediaan s.d 2022 | Sisa Kebu- tuhan | Keter- sediaan % |
|----|------------------------------|----------------|--------|---------|------|--------|--------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 1 | Rambu (Buah) | 19.701 | 373 | 600 | - | 478 | 245 | 13.940 | 5.761 | 70,76 |
| 2 | RPPJ (Unit) | 1.380 | 50 | 60 | - | 46 | - | 1.270 | 110 | 92,03 |
| 3 | Marka (m') | 2.404.741 | 12.001 | 102.000 | - | 52.444 | 73.976 | 961.896 | 1.442.845 | 40 |
| 4 | Guardrail (Beam) | 22.062 | 112 | 290 | 30 | 176 | 31 | 9.064 | 12.998 | 41,08 |
| 5 | LPJU (Unit) | 32.263 | 263 | 513 | 150 | 174 | 355 | 13.897 | 18.366 | 43,07 |
| 6 | APILL (Unit) | 250 | 8 | 6 | - | 2 | - | 212 | 38 | 84,80 |
| 7 | Warning Light (Unit) | 802 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 449 | 353 | 55,99 |
| 8 | Deliniator (Buah) | 3.406 | - | 465 | 291 | 333 | 915 | 2.004 | 1.402 | 58,83 |
| 9 | Cermin Tikungan (Unit) | 259 | 1 | 18 | 17 | 16 | - | 189 | 70 | 72,97 |

Sumber : Diolah dari GIS Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pengadaan dan pemasangan LPJU terjadi peningkatan yang signifikan dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 dari 263 Unit ke 513 Unit, namun menurun Kembali pada Tahun 2020 menjadi 150 Unit karena anggaran pada Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan COVID-19 berupa dukungan pelaksanaan Posko Pengendalian di Pintu Masuk Jawa Tengah dan implementasi Bus Sehat Trans Jateng.

Terdapat beberapa prioritas pemenuhan perlengkapan jalan utamanya pada Tahun 2024 untuk mendukung Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata; pada tahun 2025 untuk mendukung jalur penghubungan pansela, jalur tengah dan pantura Jawa Tengah dan pada tahun 2026 untuk mendukung jalur sejajar pantura.

b. Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi

Penanganan daerah rawan kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi di masing-masing Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah menjadi kegiatan strategis terkait dengan peningkatan keselamatan jalan. Dinas Perhubungan telah menyusun kajian Rencana Aksi Keselamatan (RAK) LLAJ sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencan Umum Nasional Keselamatan (RUNK) LLAJ. Adapun jumlah lokasi Daerah Rawan Kecelakaan terdata pada Ruas Jalan Provinsi sebagaimana dokumen Kajian RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah sebanyak 86 lokasi pada 66 ruas jalan. Adapun jumlah Daerah Rawan Kecelakaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.38. Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah

| No | Balai | DRK | % |
|--------|---------------------------|-----|-------|
| 1 | BPSPP Wilayah I Kelas A | 18 | 20,93 |
| 2 | BPSPP Wilayah II Kelas B | 16 | 18,60 |
| 3 | BPSPP Wilayah III Kelas A | 9 | 10,47 |
| 4 | BPSPP Wilayah IV Kelas A | 14 | 16,28 |
| 5 | BPSPP Wilayah V Kelas B | 4 | 4,65 |
| 6 | BPSPP Wilayah VI Kelas A | 25 | 29,07 |
| JUMLAH | | 86 | 100% |

Sumber : Diolah dari Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari tabel diatas Pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (Pekalongan) paling banyak daerah rawan kecelakaan pada Ruas Jalan Provinsi sebanyak 25 lokasi (29,07%). Secara rinci Daerah rawan kecelakaan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.39. Jumlah Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) Pada BPSPP Wilayah

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|---|--|--|---------------|--|
| BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH I | | | | |
| 1 | Ambarawa-Bandungan | -7.227324, 110.345952 | Kab. Semarang | 1. Penambahan Warning Light 2. Penambahan rambu peringatan 3. Penambahan pita penggaduh |
| 2 | Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan | -7.260675, 110.517879 | Kab. Semarang | 1. Rambu Chevron 4 2. Warning Light 3. Rumble Strip 4. PJU 1 Section 5. Rambu Hati-Hati 6. Marka Tepi, Marka Tengah dan Zebra Cross SMPN 1 |
| 3 | Ruas Jalan Semarang-Purwodadi Grobogan | -7.041666, 110.821512 | Kab. Grobogan | 1. Perlu dilakukan pemasangan rambu batas kecepatan sesuai 2. Perlu penambahan rambu peringatan DRK dan RPPJ 3. Pemasangan Warning Light 4. Pemasangan rumble strip mendekati simpang |
| 4 | Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan | -7.235245, 110.539805 Beringin- Salatiga | Kab. Semarang | 1. Penambahan rambu batas kecepatan 2. Rambu Chevron 3. Warning Light 4. Pita Penggaduh |
| 5 | Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung) | -7.040556 110.048694 (Weleri - Pagaruyung - Sukorejo) | Kab. Kendal | 1. Guardrail (Jumlah Beam) 2. Delineator 3. Rambu Belok Belok 4. Rambu Hati Hati 5. PJU |
| 6 | Gubug-Kapung- Kedungjati/ BTS. Kab. Semarang | -7.260700, 110.517914 | Kab. Semarang | 1. Warning Light 2. Rppj 3. Marka Tepi : 4. Pita Penggaduh 5. Chevron |
| 7 | Jalan Raya Semarang Purwodadi, Lekok, Penawangan, Kab. Grobogan. | -7.024890 110.500694 s/d 7.024892, 110.500712 | Kab. Grobogan | |
| 8 | Jalan Raya Desa Kemantren Godong Purwodadi | -7.025084, 110.7785 s/d -7.025942, 110,781019 | Kab. Grobogan | |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|--|---|--|---------------|--|
| 9 | Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung) | -7.038088, 110.049982 | Kab. Kendal | 1. Gruardrail 2. Rambu DRK 3. Chevron |
| 10 | Lemahbang-Kaloran (Kab. Semarang) | -7.222158, 110.373094 | Kab. Semarang | |
| 11 | Sukorejo - Plantungan / Blimbing | -7.086051, 110.008363 | Kab. Kendal | |
| 12 | Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Tanjakan Salib Putih) | -7.356289, 110.482881 | Kota Salatiga | |
| 13 | Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Pertigaan Kopeng Arah Cuntel) | -7.397128, 110.421409 | Kab. Semarang | |
| 14 | Temanggung - Kaloran / Bts.Kab. Semarang (Pertigaan 09) | -7.271013, 110.235394 | Kab. Semarang | |
| 15 | Semarang - Godong (Pertigaan Pasar Tegowanu) | -7.049705, 110.599495 | Kab. Grobogan | |
| 16 | Ungaran - Cangkiran (Perempatan Sumurjurang) | -7.104357, 110.388205 | Kota Semarang | |
| BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH II | | | | |
| 17 | Kudus – Margoyoso / BTS. Kab. Jepara (SK KALIWUNGU / BTS. KAB KUDUS - KALINYAMATAN) | -6.640988, 110.709716 (Ruas Jalan Jepara - Kudus) | Kab. Jepara | 1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pengecatan ulang marka 3. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative 4. pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 5. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas |
| 18 | Kudus-Margoyoso/BTS. Kabupaten Jepara (SK JALAN KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA) | -6.640988, 110.709716 (Jepara - Kudus) | Kab. Jepara | 1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pengecatan ulang marka 3. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 4. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas |
| 19 | Pati-Tayu | -6.651748, 111.061809 (Desa Mojoagung KM 87+600) | Kab. Pati | 1. Pita penggaduh 2. Rambu turunan dan jalan naik 3. Papan Peringatan DRK 4. Perimbasan ranting pohon yang menutupi PJU |
| | | -6.5606007 LS,111.0412319BT (Desa Sendangrejo KM 98+950) | Kab. Pati | 1. Rambu simpang 3 2. Rambu DRK 3. Pengecatan marka jalan 4. Pita penggaduh 5. Zebra cross 6. Penambahan Warning Lamp 7. Tambal lubang jalan |
| | | -6.610464, 111.053448 (Ngeplak Kidul, Margoyoso KM 92+300) | Kab. Pati | 1. Rambu Traffic Light 2. Rambu DRK 3. Dilakukan pengaspalan jalan 4. Pita penggaduh 5. Ditambahkan PJU 6. Pelapisan ulang bahu jalan |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|---|--|--|---------------|---|
| | | | | pada sisi kanan sepanjang 50 meter (area Traffic Light) |
| 20 | Keling/BTS.Kab. Jepara_Tayu | -6.5345489 LS,110.9416022 BT (Desa Plaosan KM 113+700) Jl. Keling-Tayu | Kab. Pati | 1. Rambu hati-hati 2. Rambu DRK 3. Rambu tikungan tajam 4. Pita penggaduh 5. Penambahan Warning Lamp 6. Penambahan PJU |
| 21 | Kundurán – Ngawen – Blora | -6.99763 LS,111.38161 BT (POM BENSIN NGAWEN) | Kab. Blora | 1. Pita penggaduh 2. Paku jalan sepanjang 3. Rambu peringatan hati hati 4. Rambu papan peringatan DRK 5. Sosialisasi lewat spanduk dan Razia lalu lintas (operasi gabungan) 6. Penanganan WL yang mati |
| | | -7.01918 LS,111.30716 BT | Kab. Blora | 1. WL (warning lamp) 2. Rambu DRK 3. Dilakukan pemarkaan baru 4. Pita penggaduh 5. Paku jalan sekitar 6. Ditambahkan PJU 7. Pelapisan bahu jalan pada sisi kanan yang beda tinggi dengan jalan utama |
| | | (Simpang 4 Trembul Rejo Ngawen) | Kab. Blora | 1. Rambu Peringatan hati- hati 2. Rambu papan peringatan DRK 3. Rambu Peringatan banyak anak menyebrang 4. Rambu Petunjuk fasilitas penyebrangan 5. Pembuatan zebra cross 6. Pita penggaduh sebelum dan sesudah lokasi 7. Paku jalan 8. Penambahan Warning Lamp 9. Penambahan PJU |
| | | -6.5345489 LS,111.9416022 BT (SMP NEGERI 1 NGAWEN) | Kab. Blora | 1. Rambu hati-hati 2. Rambu petunjuk fasilitas penyebrangan 3. Rambu papan peringatan DRK 4. Rambu peringatan banyak anak menyebrang 5. Pita penggaduh (sebelum dan sesudah lokasi) 6. Penambahan Warning Lamp 7. Penambahan PJU 8. Paku jalan sekitar 300 m |
| 22 | Jl. Purwodadi (Kudus) | -6.837328, 110.832453 | Kab. Kudus | |
| 23 | Jl. Pati - Tayu (Ketanen) | -6.6502, 111.0615 | Kab. Pati | |
| 24 | Jl. Kudus – Jepara Ds. Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus (SK JALAN KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA) | -6.46217, 110,47017 SD -6.772689, 110,783815 | Kab. Kudus | |
| BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III | | | | |
| 25 | Boyolali-Selo- Jrakah/BTS.Kab. Magelang | -7.7057516, 110.508244 (Tikungan Ngeplang) | Kab. Boyolali | 1. Pelebaran Jalan 2. Pergeseran RPPJ Wisata 3. Penambahan Rambu |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|----|---|---|----------------|---|
| | | | | peringatan tikungan, tanjakan, turunan, pertigaan 4. Pemeliharaan cermin tikungan 5. Penambahan Marka Tepi 6. Pemasangan Guardrail untuk mengganti gundukan tanah dan batu 7. Pemasangan papan peringatan terkait tumpahan solar |
| | | -7.506692, 110.502837 (Irung Petruk) | Kab. Boyolali | 1. Penambahan papan peringatan, rambu tikungan, jalan berkelok (Irung Petruk) 2. Penambahan chevron (Irung Petruk) 3. Penambahan penerangan jalan (Irung Petruk) 4. Penambahan rambu batas kecepatan (30km/jam) (Irung Petruk) |
| 26 | Boyolali-Selo-Jrakah/BTS.Kab. Magelang | -7.495766, 110.428196 (Selo -Jrakah) | Kab. Boyolali | 1. Penertiban warung diatas drainase yang berlokasi di tanjakan 2. Penambahan rambu peringatan, tikungan, tanjakan 3. Penambahan penerangan jalan |
| 27 | Ruas Jalan Jatinom-Boyolali (Simpang 4 Jatinom depan Gapura Pesantren Al Manshurin) | -7.628043, 110.604904 | Kab. Boyolali | 1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlunya pemasangan rambu peringatan adanya simpang 4 3. Perlunya pemasangan warning light 4. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 5. Penegakan hukum terhadap pengguna jalan pelaku aggressive driving |
| 28 | Ruas Jalan Ahmad Yani, Surakarta (Ringin Semar) | -7.5593912, 110.834791 | Kota Surakarta | 1. Perlu dilakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terhadap pengurangan titik konflik pada bundaran 2. Perlu dilakukan survei pencacah lalu lintas dan dilakukan simulasi alternative pemasangan APILL dalam pengaturan lalu lintas 3. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas |
| 29 | Wonogiri Ngadirojo | -7.813228, 110.957312 (simpang 3 Bulusulur) | Kab. Wonogiri | 1. Marka Solid 2. Paku jalan 3. Rambu Larangan Mendahului 4. Rambu Batas Akhir Larangan Mendahului |
| 30 | Nguter/ Bts. Kabupaten Sukoharjo – Wonogiri | -7.76989, 110.88792 (dekat Ponpes Mambaul Hikmah) | Kab. Wonogiri | 1. Rambu Peringatan Simpang 3 2. Rambu Peringatan Pejalan kaki 3. Variable Message Sign 4. Rambu Larangan Mendahului |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|--|--|---|-----------------|--|
| | | | | 5. Rambu Batas Akhir larangan mendahului 6. Marka Solid 7. Paku jalan |
| 31 | RUAS SUKOHARJO-NGUTER/BTS. KAB. WONOGIRI | -7.704206,110.855046 | Kab. Sukoharjo | |
| 32 | Jl. Lawu 172 | -7.615597, 111,002065 s/d -7.616102, 111.003456; | | 1. Penambahan rambu hati-hati pada -7.525960, 110.817646 dan -7.525205, 110.817605; 2. Penambahan Warning Light (2 buah) pada -7.525363, 110.817639 dan -7.525767, 110.817586; 3. Penambahan marka tengah solid; 4. Penambahan marka tepi; 5. Penambahan rambu stop di -7.525593, 110.817692 6. Penambahan LPJU 1 section |
| BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH IV | | | | |
| 33 | Salaman-Bener/BTS. Kab Purworejo Kab magelang | -7.5733, 110.0769 | Kab. Magelang | 1. Pemasangan LPJU 2. Perbaiki rambu tanjakan (arah magelang) 3. Penambahan rambu batas kecepatan |
| 34 | BTS.Kab Magelang/ Bener-Maron (Kab purworejo) | -7.596748, 110.064989 Kalijambe (Maron-Bener) | Kab. Purworejo | 1. Penambahan penerangan jalan 2. Penebalan marka 3. Perbaiki cermin tikung 4. Penambahan pita penggaduh 5. Penambahan papan peringatan 6. Rambu batas kecepatan 7. Pemasangan Rambu Chevron 8. Delineator 9. Reflektor guardrail 10. Warning Light 11. Pagar Pengaman jalan |
| 35 | Parakan-Patean / BTS. Kab. Kab temanggung Kendal | -7.127659, 110.080347 Candiroti- Bejen (temanggung) | Kab. Temanggung | 1. Overlay dan Pelebaran jalan 2. Pemasangan Marka jalan 3. Penambahan penerangan jalan 4. Penambahan pita penggaduh 5. Penambahan jalur penyelamat 6. Penambahan papan peringatan |
| | | -7.15873, 110.06397 | Kab. Temanggung | 1. Guardrail 2. Warning Light : 3. Pemasangan LPJU 4. Pemasangan rambu lalu lintas 5. Pemasangan cermin tikungan 6. Penebalan marka |
| 36 | Kertek-Kepil (wonosobo) | -7.389134, 109.963765 Simpang 3 Kertek | Kab. Wonosobo | 1. Perbaiki dan perawatan jalur penyelamat 2. Perawatan warning light 3. Overlay jalan menuju jalur penyelamat 4. Pagar Pengaman Jalan 5. Rambu Chevron 6. Delineator 7. Reflektor guardrail 8. Marka Zebra Cross |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|----|--|--|----------------|--|
| | | | | 9. RPPJ 10. Rambu Peringatan 11. Papan Peringatan |
| 37 | Magelang-Ngablak/ BTS. Kab Semarang Kab Semarang | -7.519074, 110.355771 Magelang- Salatiga (Pakis) | Kab. Magelang | 1. Pemasangan LPJU 2. Penambahan delineator 3. Pemasangan marka tepi 4. Perawatan rambu 5. Penambahan Rambu batas kecepatan |
| 38 | Kejajar-Dieng (Kab Wonosobo) | -7.209880, 109.924685 | Kab. Wonosobo | 1. Penambahan LPJU 2. Penambahan papan peringatan sebelum dan sesudah Rest Area 3. Penambahan rambu batas kecepatan 4. Penambahan papan peringatan gunakan gigi rendah 5. Penambahan delineator 6. Penambahan papan peringatan kendaraan yang akan naik 7. penambahan papan peringatan DRK 8. Perbaikan dan penambahan marka 9. Penambahan Warning Light 10. Penambahan papan peringatan tanjakan/turunan panjang |
| 39 | Wonosobo-Kejajar Kab Wonosobo | -7.244305, 109.951289 | Kab. Wonosobo | 1. Penambahan Warning Light 2. Penambahan Rambu Simpang Tiga 3. Penambahan papan peringatan |
| 40 | Bener-Maron (Bts. Purworejo) Kab Purworejo | -7.6140, 110.0621 | Kab. Purworejo | 1. Penambahan rambu peringatan 2. Penambahan rambu batas kecepatan 3. Penambahan RPPJ Wisata 4. Penambahan Warning light 5. Perbaikan marka 6. Penambahan rambu larangan parkir 7. Koordinasi dengan satpol PP terkait warung pada jembatan 8. Penambahan guardrail 9. Penggantian cermin tikung 10. Perbaikan warning light 11. Perbaikan marka 12. Penambahan rambu peringatan tanjakan dan turunan |
| 41 | Magelang Ngablak / BTS. Kab Semarang | -7.355943, 110.482977 Ruas Jalan Magelang - Salatiga (Simpang Empat Kumpulrejo / Salib Putih) | Kota Salatiga | 1. Pembatasan Lalu Lintas terhadap kendaraan angkutan barang disertai pemasangan rambu peringatan pembatasan angkutan barang 2. Pembangunan kembali U-Turn yang ideal 3. Kajian yang komprehensif terhadap jalur penyelamat di lokasi tersebut |
| 42 | Magelang-Ngablak/BTS. Kab. Semarang | -7.444890, 110.351335 | Kab. Magelang | 1. Guardrail 2. Warning Light 3. Pemasangan rambu lalu lintas |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|---|---|--|-------------------|--|
| | | | | 4. Pemasangan Delineator 5. Penebalan marka |
| 43 | Jalan Jurusan Purworejo – Magelang Ikut Desa. Kaliboto Kec. Bener Kab. Purworejo. | -7.381970, 110.030719 | Kab. Purworejo | |
| 44 | Jl Candiroto – Bejen tepatnya depan kantor Perhutani Dsn Saren Ds/Kec Bejen Kab Temanggung Prop Jawa Tengah | -7.127659, 110.080347 | Kab. Temanggung | 1. Pemasangan rambu kurangi kecepatan 2. Pemasangan rambu turunan Panjang 3. Pemasangan rambu gunakan gigi rendah |
| 45 | Jl Wadaslintang - Selokromo (Tanjakan Desa Panerusan) | -7.560116, 109.820249 | Kab. Wonosobo | 1. Penambahan rambu peringatan hati hati, tanjakan, turunan 2. Pengecatan marka 3. Penambahan papan peringatan pindah ke gigi rendah 4. Penambahan penerangan jalan 1 section 5. Penambahan chevron 6. Penambahan cermin tikung |
| 46 | Jl. Magelang - Salatiga, Pakis, Magelang | -7.448945, 110,342838 s.d -7.446988, 110.347183; | Kab. Magelang | 1. Pemasangan rambu hati hati 2. Pemasangan rambu turunan panjang |
| BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH V | | | | |
| 47 | Batur -Dieng Kab Banjarnegara | -7.20698, 109.9163 Wanayasa- Dieng | Kab. Banjarnegara | 1. Penambahan delineator 2. Penambahan guardrail 3. Penambahan LPJU 4. Perbaiki dan penambahan marka 5. Penambahan papan peringatan DRK |
| 48 | Bobotsari- belik/ BTS. Kab Pemalang | -7.239676, 109.332104 | Kab. Purbalingga | 1. Penambahan rambu peringatan 2. Penambahan pita pengaduh 3. Penambahan Warning Light 4. Penambahan Rambu Batas Kecepatan |
| 49 | Bobotsari – Belik/ BTS.Kab. Pemalang | -7.244421, 109.334357 | Kab. Purbalingga | 1. Guardrail 2. Warning Light : 2 3. Penggantian lampu PJU dengan lampu LED 4. Pengecatan ulang marka di sekitar lokasi 5. Penambahan rambu petunjuk jalur penyelamat 6. Penambahan rambu peringatan pengarah tikungan kiri/ kanan 7. Penambahan rambu dilarang mendahului 8. Penyediaan rumble strips sebelum jalur penyelamat 9. Rambu Kurangi Kecepatan |
| 50 | Sokaraja - Kalimanah | -7.443694, 109.326025 | Kab. Banyumas | 1. Guardrail 2. Warning Light : 3. Penggantian lampu PJU dengan lampu LED 4. Pengecatan ulang marka di sekitar lokasi 5. Penambahan rambu peringatan hati-hati 6. Penambahan rambu peringatan DRK 7. Penambahan rambu batas kecepatan 8. Penyediaan rumble strips |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|--|--|---|-----------------|--|
| | | | | sebelum dan sesudah lokasi DRK |
| BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH VI | | | | |
| 51 | Bandungsari-Salem Kab brebes | -7.239676, 109.332104 (Gunung Lio-Brebes) | Kab. Brebes | 1. Penambahan LPJU 2. Pemasangan guardrail 3. Penambahan rambu peringatan hati - hati dan tanah longsor 4. Penambahan rambu Chevron |
| | | -7.093521, 108.807580 (Jembatan Bandungsari) | Kab. Brebes | 1. Rambu peringatan rawan longsor 2. Overlay Jalan 3. Pemberian marka 4. Pemasangan guardrail |
| | | -7.096942, 108.803907 (Tanjakan Depan SD) | Kab. Brebes | 1. Pemasangan rambu peringatan tanjakan dan tikungan 2. Pemasangan rambu chevron 3. Penambahan marka tepi |
| | | -7.092746, 108.807137 | Kab. Brebes | 1. Penambahan Guardrail |
| | | -7.135487, 108.790767 | Kab. Brebes | 1. Penambahan RPPJ 2. Pemasangan Cermin Tikung |
| 52 | Pemalang - Randudongkal | -6.975978, 109.381052 | Kab. Pemalang | 1. Papan Peringatan 2. WL 3. Rambu Peringatan Hati2 4. Rambu Menyeberang |
| 53 | Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga | -7.133070, 109.304597 | | 1. Penebangan pohon di tanjakan cilukba 2. Cutting tanjakan cilukba 3. Pemasangan Guardrail 4. Pemasangan RLL dilarang mendahului 5. Rambu Peringatan dgn kata-kata 6. Pemasangan PJU |
| 54 | Ketanggungan – Songgom | 6°57'14.12"S 108°53'25.62"T | Kab. Brebes | 1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok |
| | | 6°59'39.85"S 108°55'11.92"T | Kab. Brebes | 1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok |
| | | 7° 5'33.22"S 108°59'1.73"T | Kab. Brebes | 1. Pemasangan rambu peringatan tikungan berkelok |
| | | 7° 6'16.14"S 108°59'1.01"T | Kab. Brebes | 1. Pemasangan rambu peringatan tikungan tajam |
| 55 | Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga (Rest Area Indah Sari) | -7.169092, 109.318664 | Kab. Pemalang | 1. WL 2. Papan Peringatan 3. Rumble Strip |
| 56 | Moga - Morongso / Bts.Kab.Tegal (SMK Al Falah) | -7.122779, 109.243573 | Kab. Pemalang | 1. Rambu Peringatan 2. Rambu Menyeberang 3. Warning Light 4. Rumble Strip 5. Zoss |
| 57 | Jl raya Pekajangan – Kedungwuni | | Kab Pekalongan | |
| 58 | Jl raya Kedungwuni – Podo Kec. Kedungwuni. | | Kab Pekalongan | |
| 59 | Batang - Wonotunggal - Surjo (Pertigaan Takzaka) | -7.040339, 109.802370 | Kab. Batang | |
| 60 | Kebonagung - Bts.Kab. Batang (Pertigaan SDN Karang Sari) | -7.031623, 109.615187 | Kab. Pekalongan | |
| 61 | Banyuputih - Plantungan / Bts Kab. Kendal (SDN Sukomangli) | -7.0552957,109.9022149 | Kab. Batang | |

| NO | RUAS JALAN | KOORDINAT | Kab/Kota | REKOMENDASI KEBUTUHAN |
|----|--|-----------------------|---------------|--|
| 62 | Pemalang - Randudongkal (Bantarbolang) | -7.053953, 109.379521 | Kab. Pemalang | 1. Cermin Tikung 2. Chevron (4 Bh) 3. Perbaikan Guardrail + reflektor 4. Marka 5. Rambu Peringatan |
| 63 | Jatinegara/Bts.Kab.Pemalang - Slawi (Pertigaan Desa Bogares Kidul) | -6.990626, 109.164985 | Kab. Tegal | |
| 64 | Bumiayu - Sirampog (Pasar Sirampog) | -7.210080, 109.087037 | Kab. Tegal | 1. Cermin Tikung 2. Papan Peringatan 3. Rambu Peringatan 4. Marka 5. LPJU |
| 65 | Jl. Raya Ds. Randudongkal - Pemalang | | Kab. Pemalang | |
| 66 | Jl. Raya Ds. Belik - Pemalang | | Kab. Pemalang | |

Sumber : Diolah dari Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemenuhan fasilitas keselamatan pada Daerah rawan kecelakaan tersebut akan dilakukan bertahap oleh Dinas Perhubungan.

c. Pelaksanaan *Ramp Check*

Ramp check bertujuan untuk meningkatkan kendaraan yang berkeselamatan. Sesuai dengan kewenangannya pelaksanaan *ramp check* dilakukan pada 23 Terminal Tipe B. Selama tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan pada 37.564 kendaraan dengan hasil 28.559 kendaraan tidak terdapat pelanggaran dan 9.005 kendaraan melakukan pelanggaran yang didominasi pelanggaran administrasi.

Tabel II.40. Pelaksanaan *Ramp Check* di Terminal Tipe B Pada Masing-Masing BPSPP Wilayah Tahun 2022

| No | Uraian | Jumlah Kendaraan | | | Pelanggaran | | |
|----------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Diperiksa | Tidak Melanggar | Melanggar | Administrasi | Operasional | Teknis |
| 1 | BPSPP WIL I | 2.229 | 762 | 1.467 | 1.357 | 0 | 110 |
| a. | Penggaron | 244 | 118 | 126 | 87 | 0 | 39 |
| b. | Bintoro | 928 | 90 | 838 | 834 | 0 | 4 |
| c. | Purwodadi | 1.057 | 554 | 503 | 436 | 0 | 67 |
| 2 | BPSPP WIL II | 989 | 980 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| a. | Gagak Rimang | 989 | 980 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | BPSPP WIL III | 21.596 | 14.130 | 7.466 | 6.006 | 0 | 1.341 |
| a. | Terminal Sukoharjo | 4.336 | 1.491 | 2.845 | 1515 | 0 | 1330 |
| b. | Terminal Jatisrono | 3.250 | 2.746 | 504 | 502 | 0 | 2 |
| c. | Terminal Baturetno | 2.251 | 2.082 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| d. | Terminal Purwantoro | 1.218 | 795 | 423 | 423 | 0 | 0 |
| e. | Terminal Penggung | 2.372 | 1.686 | 686 | 680 | 0 | 6 |
| f. | Terminal Tegalgede | 1.346 | 58 | 1.288 | 1.288 | 0 | 0 |
| g. | Terminal Pilangsari | 1.992 | 1.945 | 47 | 45 | 0 | 2 |
| h. | Terminal Tawangmangu | 1.627 | 613 | 1.014 | 894 | 0 | 1 |
| i. | Terminal Pracimantoro | 1.293 | 806 | 487 | 487 | 0 | 0 |

| No | Uraian | Jumlah Kendaraan | | | Pelanggaran | | |
|---------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Diperiksa | Tidak Melanggar | Melanggar | Administrasi | Operasional | Teknis |
| 4 | BPSPP WIL IV | 6.734 | 6.650 | 84 | 64 | 0 | 20 |
| a. | Terminal Drs. Prayitno | 3.481 | 3.444 | 37 | 29 | 0 | 8 |
| b. | Terminal Madureso | 3.253 | 3.206 | 47 | 35 | 0 | 12 |
| c. | Terminal Kutoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BPSPP WIL V | 3.998 | 3.808 | 190 | 131 | 0 | 59 |
| a. | Terminal Purbalingga | 2.275 | 2.194 | 81 | 60 | 0 | 21 |
| b. | Terminal Banjarnegara | 1.723 | 1.614 | 109 | 71 | 0 | 38 |
| 6 | BPSPP WIL VI | 3.485 | 2.229 | 1.256 | 786 | 0 | 470 |
| a. | Kajen | 905 | 596 | 309 | 183 | 0 | 126 |
| b. | Banyuputih | 1.260 | 800 | 460 | 265 | 0 | 195 |
| c. | Tanjung | 720 | 491 | 229 | 141 | 0 | 88 |
| d. | Bumiayu | 600 | 342 | 258 | 197 | 0 | 61 |
| TOTAL 1 sd 6 | | 39.031 | 28.559 | 10.472 | 8.353 | 0 | 2.000 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

d. Peningkatan jumlah kendaraan laik jalan

Untuk meningkatkan keselamatan transportasi diperlukan peningkatan jumlah kendaraan yang laik jalan. Uji laik jalan merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Adapun kewenangan Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten/Kota. Semakin banyak Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji sebagai salah satu indikator penting terwujudnya keselamatan di jalan.

Tabel II.41. Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2022 di Jawa Tengah

| No. | Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) | KBWU Yang Diuji | KBWU Yang Lulus Uji | KBWU Yang Tidak Lulus Uji |
|-----|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 1. | Kota Semarang | 65.138 | 65.138 | 0 |
| 2. | Kab. Semarang | 16.360 | 16.101 | 269 |
| 3. | Kota Salatiga | 5.649 | 4.929 | 720 |
| 4. | Kab. Demak | 11.403 | 10.861 | 544 |
| 5. | Kab. Grobogan | 10.082 | 10.082 | 0 |
| 6. | Kab. Kendal | 8.133 | 8.038 | 95 |
| 7. | Kab. Batang | 7.520 | 7.474 | 45 |
| 8. | Kab. Pekalongan | 6.106 | 6.048 | 75 |
| 9. | Kota Pekalongan | 7.019 | 6.963 | 53 |
| 10. | Kota Tegal | 6.421 | 6.421 | 87 |
| 11. | Kab. Tegal | 18.131 | 17.876 | 255 |
| 12. | Kab. Pemalang | 11.889 | 11.554 | 0 |
| 13. | Kab. Brebes (Pagojengan) | 4.002 | 3.996 | 6 |
| 14. | Kab. Brebes (Kluwut) | 12.736 | 12.732 | 4 |
| 15. | kab. Boyolali | 7.514 | 7.223 | 291 |
| 16. | Kota Surakarta | 23.549 | 23.534 | 15 |
| 17. | Kab. Sukoharjo | 12.864 | 12.549 | 315 |
| 18. | Kab. Wonogiri | 12.082 | 12.014 | 68 |
| 19. | Kab. Klaten | 15.015 | 14.209 | 811 |

| No. | Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) | KBWU Yang Diuji | KBWU Yang Lulus Uji | KBWU Yang Tidak Lulus Uji |
|---------------|---|-----------------|---------------------|---------------------------|
| 20. | Kab. Sragen | 12.136 | 12.122 | 14 |
| 21. | Kab. Karanganyar | 13.785 | 13.738 | 44 |
| 22. | Kab. Kudus | 9.730 | 9.715 | 15 |
| 23. | Kab. Pati | 9.599 | 9.555 | 44 |
| 24. | Kab. Rembang | 8.663 | 8.494 | 169 |
| 25. | Kab. Blora | 3.392 | 3.392 | 0 |
| 26. | Kab. Jepara | 16.111 | 15.528 | 583 |
| 27. | Kota Magelang | 7.244 | 6.449 | 795 |
| 28. | Kab. Magelang | 19.156 | 19.156 | 0 |
| 29. | Kab. Kebumen | 8.060 | 8.060 | 0 |
| 30. | Kab. Purworejo | 5.554 | 5.267 | 287 |
| 31. | Kab. Temanggung | 8.266 | 8.085 | 181 |
| 32. | Kab. Wonosobo | 11.098 | 10.286 | 812 |
| 33. | Kab. Banyumas | 13.886 | 11.606 | 2.267 |
| 34. | Kab. Cilacap (Majenang) | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 35. | Kab. Cilacap | 11.951 | 11.776 | 175 |
| 36. | Kab. Purbalingga | 12.455 | 11.933 | 522 |
| 37. | Kab. Banjarnegara | 12.914 | 12.914 | 0 |
| Jumlah | | 446.658 | 436.863 | 9.561 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

e. Penanganan perlintasan sebidang

Perlintasan kereta api sebidang adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain (pada umumnya jalan raya) yang dibuat sebidang. Pada perlintasan sebidang inilah kerap terjadi kecelakaan, sehingga diperlukan adanya fasilitas pengaman yang dapat menjamin keselamatan kereta api maupun pengguna jalan sebagai penerima pelayanan transportasi.

Provinsi Jawa Tengah terdapat 1.369 perlintasan jalan dengan kereta api, Sebagian besar perlintasan tersebut berada di ruas jalan kabupaten/kota sebanyak 1.303 perlintasan, adapun rincian perlintasan di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel II.42. Data Perlintasan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Status Jalan | Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api | | Perlintasan Tidak Sebidang | | | | Perlintasan Sebidang | | | |
|--------|--------------|--|-------|----------------------------|-------|-----------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | Fly Over | | Underpass | | Berpalang Pintu & Dijaga | | Tidak Ada Palang Pintu | |
| | | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % | Jmlh | % |
| 1. | Nasional | 39 | 2,85 | 10 | 41,67 | 6 | 7,06 | 22 | 5,93 | 1 | 0,11 |
| 2. | Provinsi | 27 | 1,97 | 1 | 4,17 | 1 | 1,18 | 24 | 6,47 | 1 | 0,11 |
| 3. | Kab/Kota | 1303 | 95,18 | 13 | 54,17 | 78 | 91,76 | 325 | 87,60 | 887 | 99,78 |
| Jumlah | | 1369 | 100 | 24 | 100 | 85 | 100 | 371 | 100 | 889 | 100 |

Sumber : BTP Jawa Bagian Tengah, 2023

Perlintasan Kereta Api yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 27 perlintasan, terdiri dari 25 perlintasan sebidang dan 2 perlintasan tidak sebidang yaitu di Jalan A. Yani Surakarta (*Underpass*) dan di

Jalana Semarang Godong (*Fly Over Ganefo*). Adapun data perlintasan Kereta Api sebidang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel II.43. Data Perlintasan Di Ruas Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

| No | Jalan / Daerah | LHR | JPL | KM | Kab / Kota | Kelengkapan | Fasilitas Keselamatan | EWS |
|-----|---|-------|-------|---------|-----------------|-----------------|--|------------|
| | Perlintasan Sebidang | | | | | | | |
| | DAOP 3 Cirebon | | | | | | | |
| 1. | Ketanggungan - Kersana - Bantarsari | 1.361 | 263 | 264+138 | Kab. Brebes | Berpalang Pintu | Faskes : WL, Rambu (2016) | Belum Ada |
| | DAOP 4 Semarang | | | | | | | |
| 2. | Wiradesa - Kajen | 588 | 115 | 94+425 | Kab. Pekalongan | Berpalang Pintu | Faskes : WL, Rambu (2016) | Belum Ada |
| 3. | Tegowanu - Tanggung - Kapung | 738 | 33 | 23+025 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu | Faskes : WL, Rambu (2016), Marka (2023) | Ada (2018) |
| 4. | Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang | 345 | 39 | 30+840 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu, (2016) | Belum Ada |
| 5. | Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts Kab. Semarang | 345 | 27 | 33+832 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2016) | Belum Ada |
| 6. | Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang | 981 | 81 | 58+880 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2016) Marka (2023) | Belum Ada |
| 7. | Purwodadi - Geyer / Bts Kab. Semarang | 981 | 6 | 006+833 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2020) | Belum Ada |
| 8. | Singget / Bts Kab. Grobogan - Doplang - Cepu | 641 | 99 | 65+202 | Kab. Blora | Berpalang Pintu | Faskes : WL, Rambu, LPJU (2017) | Belum Ada |
| 9. | Wirosari - Sulursari - Singget / Bts Kab. Blora | 528 | 72 | 42+634 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2018), LPJU | Belum Ada |
| 10. | Kuwu - Galeh / Bts Kab. Sragen | 383 | 54 | 32+897 | Kab. Grobogan | Berpalang Pintu | Faskes : WL & Rambu (2018) | Ada (2019) |
| | DAOP 5 Purwokerto | | | | | | | |
| 11. | Buntu - Kroya - Slarang | 997 | 409 | 402+292 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2016) | Belum Ada |
| 12. | Menganti - Kesugihan | 811 | 2 | 387+325 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu | Faskes : WL dan Rambu (2018), LPJU (2018) | Ada (2018) |
| 13. | Menganti - Kesugihan | 811 | 464 | 387+966 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu | Faskes : WL dan Rambu (2017) Marka , LPJU (2018) | Ada (2018) |
| 14. | Sidareja - Cukangleuleus | 705 | 441 | 339+819 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2019) | Belum Ada |
| 15. | Sidareja - Cukangleuleus | 705 | 446 | 346+950 | Kab. Cilacap | Berpalang Pintu | Perlintasan Baru (Sebelumnya Jalan Kab.) | |
| 16. | Sidareja - Cukangleuleus | 705 | 446 H | 353+612 | Kab. Cilacap | Tidak Ada Pintu | Perlintasan Baru | Belum Ada |

| No | Jalan / Daerah | LHR | JPL | KM | Kab / Kota | Kelengkapan | Fasilitas Keselamatan | EWS |
|-----|--|----------|-------|---------|-----------------|------------------|--|------------|
| | | | | | | | (Sebelumnya Jalan Kab.) | |
| 17. | Kutoarjo - Ketawang | 970 | 610 | 479+174 | Kab. Purworejo | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2016),WL (2023) | Belum Ada |
| | DAOP 6 Yogyakarta | | | | | | | |
| 18. | Gemolong / Bts Kab. Grobogan | 767 | 123 | 80+144 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu, Marka dan WL (2021) | Belum Ada |
| 19. | Gemolong / Bts Kab. Grobogan | 767 | 138 | 84+703 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu, Marka dan WL (2021) | Belum Ada |
| 20. | Gemolong - Andong / Bts Kab. Boyolali | 1.024 | 146 | 89+038 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2021) & LPJU | Belum Ada |
| 21. | Sragen - Batujamus / Bts.Kab.Karanganyar | 1.311 | 72 | 233+038 | Kab. Sragen | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu (2017) & LPJU | Belum Ada |
| 22. | Karangwuni / Bts.Prov. Diy | 1.144,24 | 251 | 130+530 | Kab. Klaten | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu, Markadan WL (2021) | Ada (2021) |
| 23. | Lingkar Timur Sukoharjo | 848,93 | 19 | 14+990 | Kab. Sukoharjo | Berpalang Pintu | Faskes : Rambudan Marka (2021) WL (2019) | Belum Ada |
| 24. | Lingkar Timur Sukoharjo | 848,93 | 9 | 10+185 | Kab. Sukoharjo | Berpalang Pintu | Faskes : Rambu dan Marka (2021 dan WL (2022) | Ada (2022) |
| 25. | Palur - Karanganyar | 1.939 | 108 | 256+761 | Kab.Karanganyar | Berpalang Pintu | - | |
| | Perlintasan Tidak Sebidang | | | | | | | |
| 1 | Jl. A. Yani (Surakarta) | | - | - | Kota Surakarta | <i>Underpass</i> | | |
| 2. | Semarang – Godong | | 15&17 | 13+257 | Kab. Demak | <i>Fly Over</i> | | |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang di jalan Provinsi akan diupayakan pemenuhan secara bertahap sesuai dengan Perauran Direktur Jenderal Perhubungan Darat No SK. 407/AJ.401/DRJD/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan Pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api.

f. Pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai.

Mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 Tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 5 lintas penyeberangan sungai antar kabupaten/kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Ketersediaan faslitas keselamatan untuk penyeberangan yang menjadi kewenangan provinsi sebagaimana tabel berikut :

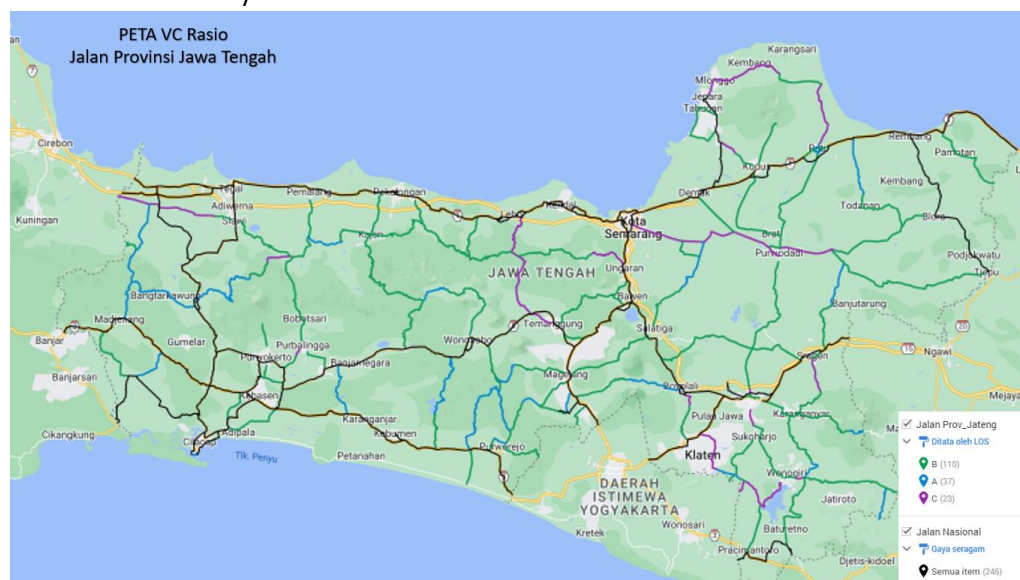
Tabel II.44. Fasilitas Keselamatan Penyeberangan Sungai Kewenangan Provinsi

| No | Aktivitas Lintas Penyeberangan Sungai Lintas Kabupaten/Kota | Sisi Dermaga | Fasilitas Keselamatan Penyeberangan Sungai | | |
|----|---|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|
| | | | Life Jacket | Rambu Keselamatan | Papan Sop Penyeberangan |
| 1. | Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Lutungmati (Batang) | - | - | - |
| | | Desa Tegalsari (Kendal) | - | - | - |
| 2. | Sungai Kalikutho Kab. Batang – Kab. Kendal | Desa Yosorejo (Batang) | 1 | - | - |
| | | Desa Jatipurwo (Kendal) | 2 | - | - |
| 3. | Sungai Pemali Kab. Brebes – Kab. Tegal | Desa Tegalwangi (Brebes) | - | - | - |
| | | Desa Bojong Prupuk Utara (Kab. Tegal) | - | - | - |
| 4. | Sungai Gangsa Kab. Brebes – Kota Tegal | Desa Randusanga Wetan (Brebes) | 5 | - | - |
| | | Desa Kajongan (Kota Tegal) | 5 | - | - |
| 5. | Sungai Bengawan Solo Surakarta – Sukoharjo | Desa Sangkrah (Kota Surakarta) | - | - | - |
| | | Desa Gading (Sukoharjo) | - | - | - |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

g. Kinerja Ruas Jalan Provinsi

Kinerja Ruas Jalan Provinsi selain ditinjau dari aspek keselamatan lalu lintas juga ditinjau dari aspek kelancaran lalu lintas, berikut gambaran kinerja Ruas Jalan Provinsi berdasarkan V/C rasio :



Sumber : Diolah dari DPUBMCK Prov.Jateng, 2023

Gambar II.7. Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi Tahun 2022

Pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pada Tahun 2016 terdapat 13 ruas jalan provinsi yang rawan macet (Tingkat Pelayanan C atau VCR > 0,44). Terjadi dinamika arus lalu lintas pada Tahun 2019-2021 yang diantaranya disebabkan oleh beroperasinya Tol Trans Jawa pada Tahun 2018 dan Pandemi COVID-19 di awal Tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.45. Perkembangan VCR Pada Ruas Jalan Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 2016 - 2022

| No. | Ruas Jalan | Status | Fungsi | VCR 2016 | VCR 2019 | VCR 2020 | VCR 2021 | 2022 | | |
|-----|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| | | | | | | | | KAP. | VOL. | VCR |
| 1. | Purbalingga - Bobotsari | P | K2 | 0,53 | 0,70 | 0,18 | 0,19 | 2984,43 | 930,94 | 0,31 |
| 2. | Semarang - Godong | P | K2 | 0,54 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 2.778,44 | 1.793,41 | 0,65 |
| 3. | Nguter - Wonogiri | P | K2 | 0,54 | 1,59 | 0,41 | 0,42 | 3.464,56 | 1.214,23 | 0,35 |
| 4. | Sukorejo (Blimbing) - Boja - Cangkiran | P | K2 | 0,55 | 0,60 | 0,37 | 0,40 | 2.402,40 | 764,75 | 0,32 |
| 5. | Kudus - Margoyoso | P | K2 | 0,56 | 0,90 | 0,73 | 0,68 | 2.911,27 | 1.325,11 | 0,46 |
| 6. | Kretek - Kepil | P | K2 | 0,58 | 0,57 | 0,34 | 0,35 | 2.416,14 | 904,30 | 0,37 |
| 7. | Sukoharjo - Weru - Watu Kelir | P | K2 | 0,59 | 0,46 | 0,17 | 0,18 | 2.507,03 | 834,02 | 0,33 |
| 8. | Purwodadi - Wirosari | P | K2 | 0,82 | 1,26 | 0,48 | 0,29 | 2.706,46 | 1.305,64 | 0,48 |
| 9. | Patean (Kdt) - Parakan | P | K2 | 0,51 | 0,42 | 0,27 | 0,27 | 1.821,60 | 1.099,11 | 0,60 |
| 10. | Palur - Karanganyar | P | K2 | 0,89 | 0,36 | 0,14 | 0,14 | 1.722,08 | 1.938,89 | 0,30 |
| 11. | Kalimanah - Purbalingga (Bmu) | P | K2 | 0,51 | 0,22 | 0,36 | 0,33 | 3.079,91 | 1.686,07 | 0,55 |
| 12. | Surakarta - Gemolong - Geyer (Skt) | P | K2 | 0,94 | 0,10 | 0,49 | 0,48 | 2.697,00 | 767,09 | 0,28 |
| 13. | Jati - Klambu (Ptb) | P | K2 | 0,51 | 1,21 | 0,40 | 0,42 | 2.531,58 | 1.033,38 | 0,41 |

Sumber : Diolah Dari DPUBMCK Prov. Jateng, 2023

Mendasarkan data dari Dinas PUBMCK Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 terdapat 23 ruas jalan yang berpotensi macet (Tingkat Pelayanan C atau VCR > 0,44) sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.46. Indikasi Ruas Jalan Provinsi Yang Berpotensi Terjadi Kemacetan/Rawan Macet pada Tahun 2022

| No. | Ruas Jalan | Kab/Kota | Kelas Jalan | KAP. | VOL. | VCR |
|-----|--|------------------|-------------|-------|-------|------|
| 1. | Lingkar Selatan Purwodadi | Kab. Grobogan | II C | 1.720 | 2.567 | 0,67 |
| 2. | Semarang - Godong | Kab. Grobogan | II B | 1.793 | 2.778 | 0,65 |
| 3. | Parakan - Patean (Bts. Kab. Temanggung) | Kab. Temanggung | II C | 1.099 | 1.821 | 0,6 |
| 4. | Sragen - Batujamus (Bts. Kab. Karanganyar) | Kab. Sragen | II C | 1.310 | 2.194 | 0,6 |
| 5. | Wonogiri - Manyaran - Blimbing | Kab. Wonogiri | II C | 1.242 | 2.070 | 0,6 |
| 6. | Pati - Tayu | Kab. Pati | II C | 1.595 | 2.749 | 0,58 |
| 7. | Boyolali - Klaten | Kab. Boyolali | II C | 1.495 | 2.654 | 0,56 |
| 8. | Kalimanah - Purbalingga | Kab. Purbalingga | II C | 1.686 | 3.079 | 0,55 |
| 9. | Ketanggungan - Kersana - Bantarsari | Kab. Purbalingga | II C | 1.361 | 2.493 | 0,55 |
| 10. | Randudongkal - Moga | Kab. Pemalang | II C | 1.267 | 2.362 | 0,54 |
| 11. | Sugiono (Surakarta) | Kota Surakarta | II C | 1.231 | 2.531 | 0,52 |
| 12. | Jl. Brijend Sudiarto (Semarang) | Kota Semarang | II B | 2.939 | 1.642 | 0,5 |
| 13. | Godong - Purwodadi | Kab. Grobogan | II C | 1.357 | 2.749 | 0,49 |
| 14. | Weleri - Patean Bts. Kab. Kendal | Kab. Kendal | II C | 1.350 | 2.773 | 0,49 |
| 15. | Purwodadi - Wirosari | Kab. Grobogan | II C | 1.305 | 2.706 | 0,48 |
| 16. | Surakarta - Sukoharjo | Kab. Sukoharjo | II C | 1.678 | 3.582 | 0,47 |
| 17. | Cangkiran - Ungaran (Bts. Kota Semarang) | Kab. Kendal | II C | 1.213 | 2.616 | 0,46 |
| 18. | Kudus - Margoyoso (Bts. Kab. Jepara) | Kab. Kudus | II B | 1.325 | 2.911 | 0,46 |
| 19. | Temanggung - Pertigaan Bulu | Kab. Temanggung | II C | 1.168 | 2.564 | 0,46 |
| 20. | Karangwuni - Cawas - Jentir | Kab. Klaten | II C | 1.144 | 2.531 | 0,45 |
| 21. | Wonogiri - Ngadirojo | Kab. Wonogiri | II C | 1.263 | 2.821 | 0,45 |

| No. | Ruas Jalan | Kab/Kota | Kelas Jalan | KAP. | VOL. | VCR |
|-----|----------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|------|
| 22. | Jepara - Keling (Bts. Kab. Pati) | Kab. Jepara | II C | 1.153 | 2.593 | 0,44 |
| 23 | Jatibarang - Ketanggungan | Kab. Brebes | II C | 1.164 | 2.679 | 0,43 |

Sumber : Diolah Dari DPUBMCK Prov. Jateng, 20232 (ruas jalan provinsi sesuai Keputusan Gubernur No. 620/2/2016)

Untuk antisipasi kemacetan dilakukan dengan pengoptimalan/peningkatan pelayanan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan seperti trans jateng dan angkutan umum lainnya serta, peningkatan simpul transportasi umum utamanya terminal penumpang tipe B.

3. Pelayanan Angkutan Umum

a. Angkutan Umum Kawasan Aglomerasi Perkotaan

Sampai dengan Tahun 2022 sudah 4 Wilayah Pengembangan (6 koridor) dilayani Trans Jateng, yaitu : Wilayah Pengembangan Kedungsepur 2 koridor (Semarang-Bawen, Semarang-Kendal dan Semarang – Purwodadi (Gubug), Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb 1 koridor (Purwokerto-Purbalingga) Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten 1 koridor (Surakarta-Sragen) dan Wilayah Pengembangan Purwomanggung 1 koridor (Kutoarjo-Borobudur). Sedangkan kebutuhan pada 4 Wilayah Pengembangan tersebut sejumlah 14 koridor.

Untuk mendukung Perpres 79/2019 terkait dengan kebutuhan Angkutan Aglomerasi Perkotaan mendukung Kawasan Industri Brebes dibutuhkan kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bregasmalang. Selain itu dengan terbitnya Perpres 109/2020 utamanya Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang diperlukan kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Petanglong serta rencana integrasi layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans jateng Wilayah Pengembangan Kedungsepur dan Petanglong. Untuk Wilayah Pengembangan Petanglong sendiri sudah dilakukan kajian Studi Kelayakan Layanan Angkutan Masal Aglomerasi Perkotaan di wilayah Pengembangan Petanglong pada TA. 2022 dengan rekomendasi 4 Trayek diantaranya yaitu Koridor I Pekalongan – Kajen, Koridor II Banyuputih – Batang, Koridor IIIA Limpung – Banyuputih, Koridor IIIB KIT Batang – Banyuputih dan Koridor IV Weleri – Banyuputih (penghubung Antar WP Kedungsepur dan Petanglong). berikut detail koridor di masing – masing Wilayah Pengembangan :

Tabel II.47. Koridor Pengembangan Angkutan Umum di Kawasan Aglomerasi Perkotaan

| No. | Wilayah Aglomerasi | Jaringan Trayek | Panjang Trayek (Km) | Jumlah Bus | Jumlah Shelter Terbangun | Kebutuhan Shelter | Ket |
|-----|--|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi) | 1. Semarang – Bawen (Stasiun Tawang-T.Bawen) | 45 | 28 | 92 | 94 | Op. 7 Juli 2017 |
| | | 2. Semarang – Kendal (T.Mangkang-RTH Weleri) | 37,8 | 14 | 53 | 53 | Op. 28 Oktober 2019 |

| No. | Wilayah Aglomerasi | Jaringan Trayek | Panjang Trayek (Km) | Jumlah Bus | Jumlah Shelter Terbangun | Kebutuhan Shelter | Ket |
|-----|---|--|---------------------|------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | Perpanjangan Terminal Mangkang - RTH Weleri (Agustus 2022) |
| | | 3. Semarang – Demak | 33 | - | - | - | - |
| | | 4. Semarang – Purwodadi (Gubug) | 50,2 | 14 | 20 | 69 | (Op.13 Oktober 2021) |
| 2 | SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten) | 5. Boyolali – Surakarta | 29,9 | - | - | - | - |
| | | 6. Surakarta – Sragen (T. Tirtonadi-Sumberlawang Via Sangiran) | 35 | 14 | 17 | 85 | Op. 3 September 2020 |
| | | 7. Surakarta – Karanganyar | 18,3 | - | - | - | - |
| | | 8. Surakarta – Wonogiri | 42 | - | 32 | 122 | - |
| | | 9. Sukoharjo – Klaten | 28,4 | - | - | - | - |
| 3 | BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) | 10. Purwokerto – Purbalingga (T.Bulupitu-T.Bukateja) | 42 | 14 | 62 | 62 | Op. 13 Agus. 2018 |
| | | 11. Purwokerto – Wangon | 32,8 | - | - | - | - |
| 4 | PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Temanggung) | 12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur) | 42 | - | - | - | - |
| | | 13. Terminal Secang – Terminal Parakan | 23,5 | - | - | - | - |
| | | 14. St. Kutoarjo – Borobudur | 50 | 14 | 36 | 49 | Op. 1 Sep. 2020 |
| 5 | PETANGLONG (Kota Pekalongan; Kab. Pekalongan, Kab. Batang) | 15. Pekalongan – Kajen | 26,9 | - | - | - | - |
| | | 16. Banyuputih – Batang | 30 | - | - | - | - |
| | | 17. Limpung – Banyuputih dan KIT Batang – Banyuputih | 6,6 dan 12,9 | - | - | - | - |
| | | 18. Weleri – Banyuputih (penghubung Antar WP Kedungsepur dan Petanglong) | 17,3 | - | - | - | - |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Mulai Tahun 2018 penumpang Trans Jateng dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu penumpang umum, pelajar, buruh dan veteran. Sampai dengan Tahun 2022 Trans Jateng sudah mengangkut/melayani 18.768.235 orang. Adapun rincian perkembangan jumlah penumpang masing-masing koridor Trans Jateng sebagai berikut :

Tabel II.48. Perkembangan Jumlah Penumpang Trans Jateng Masing-Masing Koridor 2017-2022

| No | Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
|----|--|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | KEDUNGSEPUR | | | | | | | |
| 1. | Terminal Bawen – Stas. Tawang (Juli 2017) | | | | | | | |
| | a. Penumpang dilayani (Orang) | 724.320 | 1.886.694 | 2.117.390 | 1.054.091 | 1.136.921 | 1.686.921 | 8.606.337 |
| | b. Load Factor (%) | 93% | 95% | 97% | 54% | 46% | 68,98% | |
| 2. | Terminal Mangkang – T. Bahurekso (Nov. 2019) T.Mangkang-RTH Weleri (Perpanjangan Agustus 2022) | | | | | | | |
| | a. Penumpang dilayani (Orang) | - | - | 178.943 | 592.411 | 682.477 | 1.235.294 | 2.689.125 |
| | b. Load Factor (%) | | | 65% | 36,18% | 41,71% | 75,43 | |
| 3 | Terminal Penggaron - T. Gubug Via Godong (Okt.2021) | | | | | | | |
| | a. Penumpang dilayani (Orang) | | | | | 133.380 | 774.188 | 907.568 |
| | b. Load Factor (%) | | | | | 54% | 63,43% | |
| | BARLINMASCAKEB | | | | | | | |
| 3. | Purwokerto – Purbalingga (Agustus 2018) | | | | | | | |
| | a. Penumpang dilayani (Orang) | - | 351.896 | 1.141.126 | 613.804 | 673.120 | 1.261.351 | 4.041.297 |
| | b. Load Factor (%) | | 51% | 70% | 38% | 41% | 78,03% | |
| | SUBOSUKOWONOSRATEN | | | | | | | |
| 4. | Tirtonadi – Sumberlawang via Sangiran (Sept. 2020) | - | - | - | | | | |

| No | Wilayah Pengembangan / Koridor Trans Jateng | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
|-----------------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | a. Penumpang dilayani (Orang) | - | - | - | 55.442 | 327.786 | 676.153 | 1.059.381 |
| | b. Load Factor (%) | | | | 14% | 27% | 55,27% | |
| | PURWOMANGGUNG | | | | | | | |
| 5. | Kutoarjo – Borobudur (September 2020) | | | | | | | |
| | a. Penumpang dilayani (Orang) | - | - | - | 106.124 | 485.848 | 872.555 | 1.464.527 |
| | b. Load Factor (%) | | | | 26% | 40% | 71,3% | |
| Total 6 Koridor | | 724.320 | 2.238.590 | 3.437.459 | 2.421.879 | 3.439.532 | 6.506.462 | 18.768.235 |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Penumpang Trans Jateng pada Tahun 2020 sebesar 2.421.879 orang menurun dibandingkan pada Tahun 2019 sebesar 3.437.459. Hal ini disebabkan dengan adanya Pandemi COVID-19 utamanya terkait dengan kebijakan pemerintah pusat pemberlakuan pembatasan load faktor angkutan umum sebesar 50 % namun untuk tahun selanjutnya jumlah penumpang sudah mengalami peningkatan.

Untuk mengukur kualitas layanan angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng dilakukan perhitungan *On Time Performance* Layanan. Pada Tahun 2022 Nilai OTP Trans Jateng adalah sebesar 86,64% dimana sebanyak 202.390 rit on time dari total sebanyak 232.917 rit operasional trans jateng tahun 2022. Adapun rincian nilai *On Time Performace* masing-masing koridor Trans Jateng sebagai berikut :

Tabel II.49. Nilai On Time Performace Layanan Trans Jateng Masing-Masing Koridor Tahun 2022

| No | Rute | Total Rit | Operasional | Cancel | Ontime | Delay | % Delay | % Ontime |
|-----------|--------------------------|-----------|-------------|--------|--------|-------|---------|----------|
| 1 | Semarang - Bawen | 61.184 | 60.898 | 286 | 52.994 | 7.904 | 12,99% | 87,01% |
| 2 | Purwokerto - Purbalingga | 40.560 | 40.340 | 220 | 35.893 | 4.447 | 11,03% | 88,97% |
| 3 | Semarang - Kendal | 40.684 | 40.365 | 319 | 35.897 | 4.468 | 11,08% | 88,92% |
| 4 | Magelang - Kutoarjo | 30.632 | 30.465 | 167 | 26.675 | 3.790 | 12,44% | 87,56% |
| 5 | Solo - Sragen | 30.600 | 30.470 | 130 | 25.876 | 4.594 | 15,07% | 84,93% |
| 6 | Semarang - Gubug | 30.576 | 30.379 | 197 | 25.055 | 5.324 | 17,53% | 82,47% |
| Rata-Rata | | | | | | | 13,35% | 86,64% |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pada tahun 2021, mulai dilakukan survey perhitungan jumlah perpindahan kendaraan pribadi ke moda angkutan umum kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) untuk mengetahui kontribusi Trans Jateng dalam meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum perkotaan. Sebagaimana hasil survey Kepuasan Masyarakat terdapat perpindahan moda sebesar 46,39% pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebesar 48,16%.

Tabel II.50. Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng Pelayanan Trans Jateng Tahun 2021 – 2022

| No. | Koridor | Persentase Perpindahan Kendaraan Pribadi Ke Trans Jateng (%) | |
|--|--------------------------------|--|-------|
| | | 2021 | 2022 |
| 1. | Semarang-Bawen | 43,79 | 46,06 |
| 2. | Purwokerto-Purbalingga | 59,05 | 52,81 |
| 3. | Semarang-Kendal | 36,94 | 41,21 |
| 4. | Kutoarjo-Borobudur | 43,22 | 47,84 |
| 5. | Solo-Sangiran Via Sumberlawang | 49,28 | 48,16 |
| 6. | Semarang-Gubug Via Godong | - | 56,15 |
| Persentase Total Perpindahan Kendaraan Pribadi ke Trans Jateng | | 46,39 | 48,16 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Selain itu Manfaat layanan trans jateng yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah berkurangnya biaya transportasi, berdasarkan beberapa kajian yang dilaksanakan pada tahun 2022 rata-rata penghematan biaya perjalanan untuk masyarakat katagori umum dan non umum sebesar 36.763.473.450 per tahun, Penghematan sebesar dimaksud digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan.

Bagi pemerintah terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan pada pembelian bahan bakar yang bersubsidi berdasarkan beberapa kajian yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebesar Rp12.825.370.659,-. Penghematan konsumsi bahan bakar selain bermanfaat untuk mengurangi pembakaran karbon juga selisih dari yang dikeluarkan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain.

Dengan beralihnya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum (mode shifting) dapat mengatasi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan dan menghemat biaya penanganan infrastruktur jalan. Mendasarkan beberapa kajiiaan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat rata-rata 46,85% mode shifting atau sejumlah 3.025.427 penumpang yang berpindah moda transportasi.

Adapun selengkapnya rekapitulasi hasil kajian pengukuran kemanfaatan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaaan (Trans Jateng) di 6 koridor, sebagai berikut :

Tabel II.51. Rekapitulasi Manfaat Layanan Trans Jateng Tahun 2022

| No. | Koridor | Moda Shifting (%) | Penghematan Biaya Perjalanan (Rp/Tahun) | Penghematan Subsidi BBM (Rp/Tahun) |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | Semarang-Bawen ** | Spd Motor : 46,67 % (787.286 Pnp) | 9.777.310.419 | 3.409.932.620 |
| 2. | Purwokerto-Purbalingga *** | Spd Motor : 53 % (668.516 Pnp) | 6.917.730.328 | 2.702.476.051 |
| 3. | Semarang-Kendal * | Spd Motor : 34 % (420.000 Pnp) | 6.889.393.581 | 1.564.447.351 |
| 4. | Kutoarjo-Borobudur *** | Spd Motor : 53 % (462.454 Pnp) | 5.023.324.483 | 2.225.560.597 |
| 5. | Solo-Sangiran Via Sumberlawang ** | Spd Motor : 46,67 % (315.561 Pnp) | 3.747.843.949 | 1.063.044.788 |
| 6. | Semarang-Gubug Via Godong * | Spd Motor : 48 % (371.610 Pnp) | 4.407.870.689 | 1.859.909.251 |
| Total Jawa Tengah | | 3.025.427 pnp | 36.763.473.450 | 12.825.370.659 |

Sumber:

* : Laporan Riset Unggulan Daerah (RUD) Jawa Tengah : Analisa Biaya Perjalanan Penggunaan Bus Trans Jateng dalam Mengurangi Biaya Pengeluaran Pengguna, Bappeda Provisi Jawa Tengah 2022

** : Laporan Akhir Penelitian Efektifitas dan Kontribusi Layanan Transportasi Trans Jateng Terhadap Tingkat Kemacetan dan Lingkungan Hidup di Jawa Tengah, 2022

*** : Studi tingkat kemanfaatan layanan Trans Jateng Dishub Provinsi Jawa Tengah, 2022

b. Angkutan pada Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Angkutan pada masa lebaran, natal dan tahun baru merupakan penyelenggaraan / pengelolaan angkutan (disemua moda transportasi) pada masa lalu lintas tinggi pada waktu tertentu (*peak season*). Penyelenggaraan ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang bertujuan untuk menciptakan kelancaran lalu lintas yang selamat, aman, nyaman, dan terkendali. Pada Tahun 2022 pengguna angkutan umum sebanyak 15.477.634 orang pada masa lebaran dan 9.986.033 orang pada masa nataru. Hal ini mengalami lonjakan pada tahun sebelumnya dikarenakan sudah tidak diberlakukannya Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Tabel II.52. Jumlah Penumpang (Orang) Pada Masa Angkutan Lebaran dan Nataru

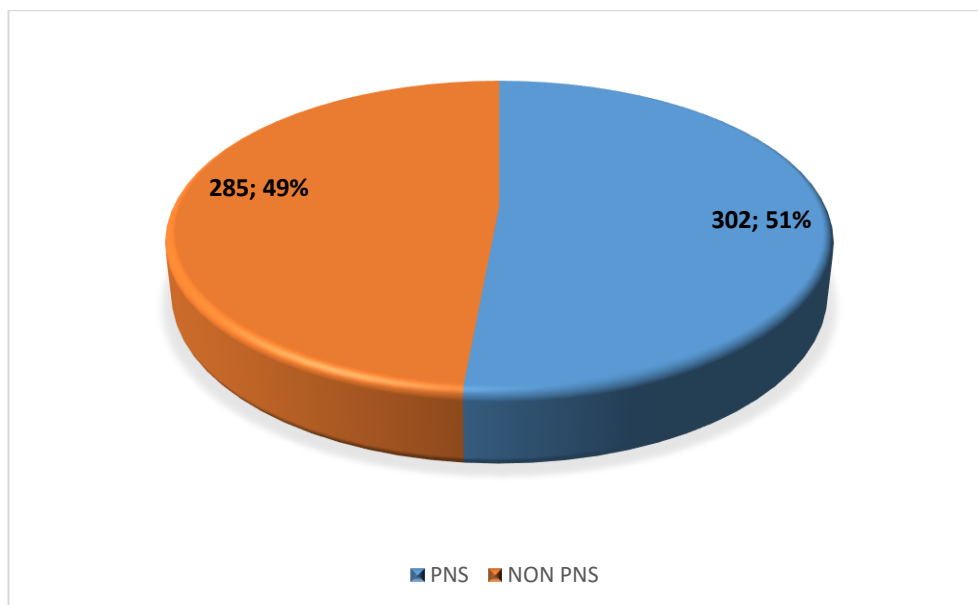
| No | Jumlah Penumpang | 2021 | 2022 |
|-------|------------------|------------|------------|
| 1. | Lebaran | 7.851.683 | 24.343.824 |
| a. | Angkutan Umum | 5.295.715 | 15.477.634 |
| b. | Pribadi | 2.555.968 | 8.866.190 |
| 2. | Nataru | 15.653.528 | 16.978.216 |
| a. | Angkutan Umum | 11.446.488 | 9.986.033 |
| b. | Pribadi | 4.207.039 | 6.992.183 |
| Total | | 23.505.211 | 41.322.039 |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan dimasa lebaran, natal dan tahun baru lebih banyak yang menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Namun, hal ini masih tetap diperlukan peningkatan layanan angkutan umum untuk mengatasi permasalahan yang terkait kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

B. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

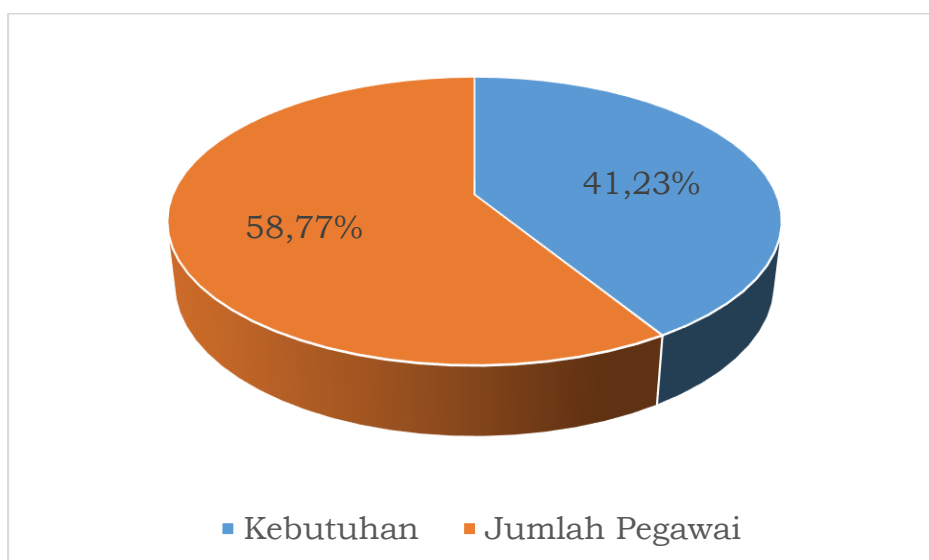
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengampu urusan Pemerintah Daerah Bidang Perhubungan, berikut proporsi sumber daya manusia berdasar status pegawai :



Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2022

Gambar II.8. Proporsi Pegawai PNS dan Non PNS Tahun 2020

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah saat ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 302 (51%) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Harian lepas) sebanyak 285 (49%). Dari seluruh pegawai tersebut masih belum pada kondisi ideal sesuai Analisis Beban Kerja yang sudah di susun, berikut perbandingan ketersediaan pegawai dengan kebutuhan ideal :



Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2022

Gambar II.9. Proporsi Jumlah dan Kebutuhan Pegawai

Sesuai Analisis Beban Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah kondisi ideal membutuhkan 1.496 pegawai, namun kondisi saat ini hanya terdapat 39,2% dari total kebutuhan pegawai yang terpenuhi

(302 PNS dan 285 Non PNS) dimana setiap tahunnya mengalami pengurangan yang diakibatkan purna tugas.

Tabel II.53. Jumlah Pegawai (PNS) Menurut Unit Kerja

| No | SUB UNIT | JPT | ES 3 | ES 4 | PELAKSANA | CPNS | JF | TOTAL |
|----|--|-----|------|------|-----------|------|----|-------|
| 1 | Kepala Dinas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Sekretariat | - | 1 | 3 | 38 | 3 | 2 | 48 |
| 3 | Bidang Lalu Lintas Jalan | - | 1 | - | 11 | - | 4 | 16 |
| 4 | Bidang Angkutan jalan | - | 1 | - | 8 | - | 3 | 12 |
| 5 | Bidang Jaringan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian | - | 1 | - | 8 | - | 3 | 12 |
| 6 | Bidang Pelayaran | - | 1 | - | 6 | - | 2 | 9 |
| 7 | Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | - | - | 3 | 27 | 1 | 2 | 33 |
| 8 | Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | - | - | 1 | 14 | 1 | - | 16 |
| 9 | Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | - | 1 | 3 | 62 | 1 | 3 | 70 |
| 10 | Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | - | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 20 |
| 11 | Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | - | - | 2 | 17 | - | 2 | 21 |
| 12 | Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | - | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 24 |
| 13 | Balai Transportasi Jawa Tengah | - | 1 | 3 | 17 | - | - | 21 |
| | JUMLAH | 1 | 9 | 21 | 237 | 9 | 25 | 302 |

Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2023

Data jumlah pegawai berdasarkan unit kerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, unit kerja dengan jumlah pegawai paling banyak Balai Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A sebanyak 70 Pegawai dikarenakan balai tersebut mengapu 10 Terminal Penumpang Tipe B.

Tabel II.54. Jumlah Pegawai (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Pegawai | Keterangan |
|----|--------------------|----------------|------------|
| 1 | SD | 8 | |
| 2 | SMP | 15 | |
| 3 | SMA | 85 | |
| 4 | D I | - | |
| 5 | D II | - | |
| 6 | D III | 44 | |
| 7 | D IV | 23 | |
| 8 | S 1 | 88 | |
| 9 | S 2 | 39 | |
| 10 | S 3 | 0 | |
| | Jumlah | 302 | |

Sumber : <http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>, 2023

Data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, tingkat pendidikan dengan jumlah pegawai paling banyak SMA sebanyak 103 Pegawai utamanya tersebar di Terminal Penumpang Tipe B sebagai Opetaror Terminal dan Juru Pungut Retribusi.

Tabel II.55. Rincian Tenaga Teknis

| No | Tenaga Teknis | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | LLAJ (Pengujian Bermotor, PPNS, D3 & D4 Ahli LLAJ) | 160 |
| 2 | ASDP | 2 |
| 3 | Kereta Api | 1 |
| 4 | Perhubungan Laut | 2 |
| | Jumlah | 166 |

Sumber : Laporan Tahunan, 2023

C. Kondisi Aset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
 Jumlah Aset/Modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
 Tahun 2020 sebesar Rp. 436.298.084.336,- dengan rincian sebagai
 berikut :

Tabel II.56. Rincian Aset/Modal Dinas Perhubungan Tahun 2020

| No. Urut | Kode Bidang Barang | Nama Bidang Barang | Jumlah Barang | Jumlah Harga (Rp.) | Keterangan |
|----------|--------------------|--|---------------|--------------------|--|
| 1. | 1.3.1.01 | Tanah | 162 | 193.819.625.633 | |
| 2. | 1.3.2.01 | Alat Besar | 23 | 2.004.191.741 | - Aplikator Marka - Lift - Genset - Pompa Air |
| 3. | 1.3.2.02 | Alat Angkutan | 133 | 28.733.634.421 | |
| 4. | 1.3.2.03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 167 | 5.095.533.200 | |
| 5. | 1.3.2.04 | Alat Pertanian | - | - | |
| 6. | 1.3.2.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 2.097 | 8.434.183.603 | |
| 7. | 1.3.2.06 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 290 | 2.387.394.176 | |
| 8. | 1.3.2.07 | Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan | 6 | 8.150.000 | |
| 9. | 1.3.2.08 | Alat Laboratorium | 4 | 163.343.000 | |
| 10. | 1.3.2.09 | Alat Persenjataan | 18 | 31.204.725 | |
| 11. | 1.3.2.10 | Alat Komputer | 565 | 5.189.294.129 | |
| 12. | 1.3.2.11 | Alat Eksplorasi | - | - | |
| 13. | 1.3.2.12 | Alat Pengeboran | - | - | |
| 14. | 1.3.2.13 | Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian | - | - | |
| 15. | 1.3.2.14 | Alat Bantu Eksplorasi | - | - | |
| 16. | 1.3.2.15 | Alat Keselamatan Kerja | - | - | |
| 17. | 1.3.2.16 | Alat Peraga | - | - | |
| 18. | 1.3.2.17 | Peralatan Proses/Produksi | - | - | |
| 19. | 1.3.2.18 | Rambu Rambu | 388 | 23.001.302.858 | |
| 20. | 1.3.2.19 | Peralatan Olahraga | 6 | 8.601.440 | |
| 21. | 1.3.3.01 | Bangunan Gedung | 550 | 121.797.193.235 | |
| 22. | 1.3.3.02 | Monumen | - | - | |
| 23. | 1.3.3.03 | Bangunan Menara | 2 | 535.357.815 | |
| 24. | 1.3.3.04 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 4 | 887.940.946 | |
| 25. | 1.3.4.01 | Jalan dan Jembatan | 34 | 31.673.474.149 | |
| 26. | 1.3.4.02 | Bangunan Air | 15 | 15.158.134.030 | |
| 27. | 1.3.4.03 | Instalasi | 605 | 17.525.803.035 | |
| 28. | 1.3.4.04 | Jaringan | 1.569 | 30.546.250.076 | |
| 29. | 1.3.5.01 | Buku Perpustakaan | 136 | 26.090.000 | |
| 30. | 1.3.5.02 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 22 | 387.710.000 | Alat Musik |
| 31. | 1.3.5.03 | Hewan | - | - | |
| 32. | 1.3.5.04 | Biota Perairan | - | - | |
| 33. | 1.3.5.05 | Tanaman | 42 | 39.465.000 | Tanaman di Terminal Drs. Prayitno Magelang |
| 34. | 1.3.5.06 | Barang Koleksi Non Budaya | - | - | |
| 35. | 1.3.5.07 | Aset Tetap Dalam Renovasi | - | - | |
| 36. | 1.3.6.01 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 20 | 2.938.774.288 | |
| | Total Aset | | 6.858 | 490.392.651.500 | |

Sumber : Laporan Tahunan, 2020

Dari data tersebut aset/modal Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terbesar di jenis aset/modal Tanah sebesar Rp. 490.392.651.500,-.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan perhubungan merupakan urusan daerah wajib bukan pelayanan dasar. Berikut tingkat capaian kinerja pelayanan urusan perhubungan yang diukur sampai dengan Tahun 2023 :

Tabel II.57. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%) | | | | |
|--------|---|--------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A | PERSENTASE PELAYANAN TRANSPORTASI ANTAR KAWASAN PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH | % | | | | 25,59 | 34,45 | 42,37 | 49,87 | 59,50 | 26,31 | 30,23 | 37,08 | 43,61 | 58,96 | 102,81 | 87,75 | 87,51 | 87,45 | 99,09 |
| A.1 | PERSENTASE LAYANAN JARINGAN DISTRIBUSI TRANSPORTASI | % | | | | 34,75 | 42,12 | 49,08 | 54,46 | 60,38 | 35,99 | 37,84 | 43,38 | 54,98 | 61,37 | 103,57 | 89,84 | 88,39 | 100,95 | 101,64 |
| A.1.1 | Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM | % | | | | 4,64 | 4,87 | 5,34 | 5,49 | 5,68 | 4,69 | 4,72 | 5,14 | 5,49 | 5,68 | 101,08 | 96,92 | 96,25 | 100,00 | 99,98 |
| A.1.2 | Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum | % | | | | 78,31 | 82,06 | 86,00 | 90,14 | 94,45 | 84,87 | 82,53 | 85,63 | 124,87 | 94,45 | 108,38 | 100,57 | 99,57 | 138,53 | 100,00 |
| A.1.3 | Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | % | | | | 38,25 | 39,56 | 41,02 | 42,34 | 43,21 | 38,25 | 39,12 | 41,46 | 42,77 | 43,21 | 100,00 | 98,89 | 101,07 | 101,02 | 100,00 |
| A.1.4 | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | % | | | | 63,99 | 64,62 | 65,17 | 65,96 | 66,43 | 63,99 | 64,47 | 65,88 | 66,43 | 66,43 | 100,00 | 99,77 | 101,09 | 100,71 | 100,00 |
| A.1.5 | Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis | % | | | | 9,52 | 23,81 | 33,33 | 38,10 | 42,86 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 28,57 | 42,86 | 100,00 | 80,01 | 85,72 | 74,99 | 99,99 |
| A.1.6 | Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan | % | | | | 10,94 | 21,88 | 31,25 | 37,50 | 43,75 | 10,94 | 10,94 | 21,88 | 28,13 | 43,75 | 100,00 | 50,00 | 70,02 | 75,01 | 100,00 |
| A.1.7 | Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | % | | | | 48,92 | 50,15 | 51,18 | 52,00 | 52,51 | 48,92 | 49,74 | 51,59 | 52,41 | 52,51 | 100,01 | 99,18 | 100,80 | 100,79 | 100,01 |
| A.1.8 | Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | % | | | | 47,60 | 49,17 | 50,28 | 51,20 | 52,03 | 47,60 | 48,52 | 50,28 | 51,20 | 52,03 | 100,00 | 98,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| A.1.9 | Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | % | | | | 77,36 | 78,08 | 78,53 | 79,17 | 79,53 | 77,36 | 77,81 | 79,26 | 79,71 | 79,53 | 100,00 | 99,65 | 100,93 | 100,68 | 100,00 |
| A.1.10 | Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | % | | | | 82,26 | 82,49 | 82,87 | 83,09 | 83,55 | 82,26 | 82,34 | 83,77 | 83,92 | 84,23 | 100,00 | 99,82 | 101,09 | 101,00 | 100,81 |
| A.1.11 | Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis | % | | | | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 20,00 | 20,00 | 33,33 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 55,55 | 75,00 | 100,00 |
| A.1.12 | Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin | % | | | | 33,96 | 35,82 | 39,55 | 41,42 | 43,28 | 37,13 | 43,28 | 47,39 | 49,25 | 51,12 | 109,33 | 120,83 | 119,82 | 118,90 | 118,11 |
| A.1.13 | Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa | % | | | | 58,40 | 65,41 | 73,26 | 78,39 | 87,79 | 58,55 | 59,38 | 60,67 | 78,39 | 87,79 | 100,26 | 90,78 | 82,81 | 100,00 | 100,01 |
| A.2 | PERSENTASE PEMENUHAN FASILITAS KESELAMATAN TRANSPORTASI | % | | | | 8,69 | 21,22 | 31,36 | 41,82 | 51,45 | 9,26 | 12,85 | 21,18 | 29,19 | 48,83 | 106,56 | 60,56 | 67,54 | 69,80 | 94,91 |
| A.2.1 | Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang | % | | | | 9,71 | 21,42 | 29,14 | 42,85 | 52,34 | 12,18 | 16,93 | 25,06 | 30,03 | 35,97 | 125,44 | 79,04 | 86,00 | 70,08 | 68,73 |
| A.2.2 | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | % | | | | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 55,00 | 100,00 | 100,00 | 116,67 | 100,00 | 110,00 |

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%) | | | | |
|----------|--|--------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| A.2.3 | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | % | | | | 15,38 | 30,77 | 46,15 | 61,54 | 76,92 | 15,38 | 38,46 | 53,85 | 61,54 | 84,62 | 100,00 | 124,99 | 116,68 | 100,00 | 110,00 |
| A.2.4 | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | % | | | | 6,25 | 12,50 | 18,75 | 25,00 | 31,25 | 6,25 | 12,50 | 21,88 | 28,13 | 37,50 | 100,00 | 100,00 | 116,69 | 112,52 | 120,00 |
| A.2.5 | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | % | | | | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 50,00 | 62,50 | 12,50 | 31,25 | 43,75 | 50,00 | 68,75 | 100,00 | 125,00 | 116,67 | 100,00 | 110,00 |
| A.2.6 | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | % | | | | 7,69 | 15,38 | 23,08 | 30,77 | 38,46 | 7,69 | 7,69 | 19,23 | 23,08 | 42,31 | 100,00 | 50,00 | 83,32 | 75,01 | 110,00 |
| A.2.7 | Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | % | | | | 6,90 | 13,79 | 20,69 | 27,59 | 34,48 | 6,90 | 13,79 | 20,69 | 27,59 | 41,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,01 |
| A.2.8 | Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api | % | | | | 4,55 | 13,64 | 27,27 | 36,36 | 45,45 | 4,55 | 4,55 | 9,09 | 17,88 | 45,45 | 100,00 | 33,36 | 33,33 | 49,17 | 100,01 |
| A.2.9 | Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan | % | | | | 3,53 | 7,16 | 10,84 | 14,63 | 18,52 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 8,90 | 12,99 | 110,20 | 54,33 | 35,89 | 60,83 | 70,15 |
| A.2.10 | Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang | % | | | | 12,50 | 37,50 | 50,00 | 62,50 | 75,00 | 12,50 | 12,50 | 25,00 | 37,50 | 75,00 | 100,00 | 33,33 | 50,00 | 60,00 | 100,00 |
| A.3 | PERSENTASE OPERASIONAL ANGKUTAN UMUM AGLOMERASI YANG NYAMAN DAN HANDAL | % | | | | 33,33 | 40,00 | 46,67 | 53,33 | 66,67 | 33,67 | 40,00 | 46,67 | 46,67 | 66,67 | 101,01 | 100,00 | 100,00 | 87,51 | 100,00 |
| A.3.1 | Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi | % | | | | 17,26 | 21,82 | 31,60 | 33,55 | 34,85 | 17,26 | 27,36 | 31,92 | 31,92 | 36,48 | 100,00 | 125,39 | 101,01 | 95,14 | 104,68 |
| B | NILAI REFORMASI BIROKRASI,93 | Angka | | | | 65,13 | 67,73 | 70,33 | 72,93 | 75,50 | 74,84 | 77,66 | 78,28 | | | 114,91 | 114,66 | 111,30 | | |
| B.1 | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN | Angka | | | | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 74,00 | 78,00 | 79,25 | 79,75 | 80,00 | 123,33 | 120,00 | 113,21 | 106,33 | 100,00 |
| B.1.1 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.2 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.3 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.4 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.5 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.6 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.7 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.8 | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.2 | MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH | Angka | | | | 70,25 | 70,45 | 70,65 | 70,85 | 71,00 | 75,68 | 77,31 | 77,31 | 78,18 | 78,18 | 107,73 | 109,74 | 109,43 | 110,35 | 110,11 |

| NO | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD | Satuan | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra PD Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Sampai Dengan Tahun (%) | | | | |
|-------|--|--------|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| B.2.1 | Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD | % | | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ket : Realisasi 2023 merupakan perkiraan realisasi

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Interpretasi capaian kinerja pelayanan terhadap kondisi akhir dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022 dan perkiraan sampai dengan 2023 sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Pelayanan Dengan Status Tercapai

1. Capaian kinerja indikator tujuan

Tingkat capaian indikator tujuan nilai reformasi birokrasi sampai dengan 2021 terhadap akhir renstra sebesar 103,68% dikarenakan adanya peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sampai dengan Tahun 2021 sebesar 79,25 dari target 70,00. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan-perbaikan pada unit pelayanan BRT Trans Jateng, Terminal Penumpang Tipe B dan Penerbitan KP/KJP dalam hal peningkatan Terminal Penumpang Tipe B dan peningkatan kualitas SDM dalam pelayanan seperti pelatihan *crew* tranjateng terkait sensitifitas terhadap pengguna layanan.

Selain dipengaruhi oleh IKM, juga disebabkan oleh meningkatnya akuntabilitas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan nilai SAKIP Tahun 2021 77,31 dari target 70,65. Hal ini dikarenakan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi semakin meningkat.

Namun untuk tahun 2022-2023 indikator tujuan Meningkatnya tata kelola organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu nilai reformasi birokrasi sudah tidak relevan digunakan (seragam seluruh OPD) dan indikator yang digunakan adalah Nilai kepuasan masyarakat (sama dengan indikator sasaran). Indikator Nilai kepuasan masyarakat diperkirakan tercapai karena sesuai dengan progres nilai IKM tahun sebelumnya selalu meningkat dimana IKM pada tahun 2022 sebesar 79,75 dari target 75 sementara target akhir renstra adalah sebesar 80. Hal yang dapat mendorong peningkatan IKM pada tahun 2023 diantaranya peningkatan terminal tipe B diantaranya Terminal Banyuputih di Kab. Batang, Terminal Banjarnegara di Kab. Banjarnegara serta terminal Pracimantoro, Jatisrono dan Purwantoro di Kab. Wonogiri.

2. Capaian kinerja indikator sasaran

a. Nilai Kepuasan Masyarakat

Indikator Nilai kepuasan masyarakat diperkirakan tercapai karena sesuai dengan progres nilai IKM tahun sebelumnya selalu meningkat dimana IKM pada tahun 2022 sebesar 79,75 dari target 75 sementara target akhir renstra adalah sebesar 80. Hal yang dapat mendorong peningkatan IKM pada tahun 2023 diantaranya peningkatan terminal tipe B diantaranya Terminal Banyuputih di Kab. Batang, Terminal Banjarnegara di Kab. Banjarnegara serta terminal Pracimantoro, Jatisrono dan Purwantoro di Kab. Wonogiri.

b. Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Indikator Nilai Sakip Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah diperkirakan akan tercapai karena sesuai dengan progres nilai SAKIP tahun sebelumnya selalu meningkat dimana nilai SAKIP pada tahun 2022 sebesar 78,18 dari target 70,85 sementara target akhir renstra adalah sebesar 71,00. Hal ini disebabkan oleh keselarasan antara dokumen perencanaan mulai dari Renstra, IKU, RKT, RKA/DPA dan capaian kinerja.

c. Persentase Layanan Jaringan Distribusi Transportasi

Indikator Presentase Layanan Jaringan Distribusi Transportasi didukung oleh 13 Indikator Program yang diperkirakan akan tercapai yaitu Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM, Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I-VI, Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan, Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin dan Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa.

d. Persentase Operasional Angkutan Umum Aglomerasi Yang Nyaman Dan Handal

Indikator Persentase Operasional Angkutan Umum Aglomerasi yang Nyaman dan Handal diperkirakan tercapai dengan operasional transjateng sampai dengan 2022 6 (enam) koridor dan 1 (satu) koridor baru pada tahun 2023 dengan *headway* angkutan umum 20 menit (sesuai target) dari kebutuhan 15 menit.

3. Capaian kinerja indikator program

Indikator program pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang tingkat capaian sampai dengan Tahun 2020 dalam kategori tercapai :

a. Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Kantor Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I sampai dengan VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah

Tingkat capaian indikator program Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah pada Kantor Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I sampai dengan VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah sebesar 100,00% dikarenakan semua aktivitas yang bersifat administrasi dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

b. Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD

Tingkat capaian indikator program ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD sebesar 100,00% dikarenakan semua

aktivitas yang bersifat administrasi dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- c. Pembaharuan Izin AKDP yang berbadan hukum (6 Indikator pada masing Masing Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah)

Realisasi Indikator pada tahun 2022 adalah sebagai berikut Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 52,41 % dari target 52 % dengan tingkat capaian 100,79 % sementara target akhir renstra adalah 52,51 % dan diperkirakan tercapai, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 42,77 % dari target 42,34 % dengan tingkat capaian 101,02 % sementara target akhir renstra adalah 43,21 % dan diperkirakan tercapai, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 51,2 % dari target 51,2 % dengan tingkat capaian 100,00 % sementara target akhir renstra adalah 52,03 % dan diperkirakan tercapai, Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 79,71 % dari target 79,17 % dengan tingkat capaian 100,68 % sementara target akhir renstra adalah 79,53 % dan diperkirakan tercapai, Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 66,43 % dari target 65,96 % dengan tingkat capaian 100,71 % sementara target akhir renstra adalah 66,43 % dan diperkirakan tercapai dan Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 83,92 % dari target 83,09 % dengan tingkat capaian 101,00 % sementara target akhir renstra adalah 83,55 % dan diperkirakan tercapai. Indikator tersebut tercapai karena Peningkatan Kesadaran dan Animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan Bus AKDP dan pembaharuan serta adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya legalisasi.

- d. Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM tercapai 5,49 % dari target 5,49 % dengan tingkat capaian 100 % sementara target akhir renstra adalah 5,68 % dan diperkirakan tercapai. Indikator tersebut tercapai Peningkatan Kesadaran dan Animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan Bus AKDP dan pembaharuan serta adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya legalisasi.

- e. Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin tercapai 49,25 % dari target 41,42 % dengan tingkat capaian 118,90 % sementara target akhir renstra adalah 43,28 % dan diperkirakan tercapai/melebihi dengan perkiraan realisasi 51,12%. Hal tersebut dipengaruhi peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam pembaharuan maupun perubahan izin perusahaan (Jasa Pengurusan Transportasi) JPT angkutan laut. adanya Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), pengusaha dengan mudah mengajukan permohonan izin.

f. Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis tercapai 60 % dari target 80 % dengan tingkat capaian 75,00 % sementara target akhir renstra adalah 100 % dan diperkirakan tercapai. Hal tersebut dipengaruhi oleh koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) terkait pembangunan infrastruktur transportasi sebagaimana Proyek strategis sebagaimana Perpres 79 Tahun 2019 sebanyak 15 proyek diantaranya Pembangunan infrastruktur bandara 3 lokasi, Terminal tipe A 5 lokasi, reaktivasi/peningkatan jalur kereta api 5 lokasi, Pengembangan pelabuhan 2 lokasi.

g. Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis tercapai 28,57 % dari target 38,1 % dengan tingkat capaian 74,98 % sementara target akhir renstra adalah 42,86 % dan diperkirakan tercapai karena pada tahun 2023 akan dibuka koridor baru trans jateng Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri dan koordinasi yang baik antar *stakeholder*.

h. Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan tercapai 28,13 % dari target 37,5 % dengan tingkat capaian 75,01 % sementara target akhir renstra adalah 43,75 % dan diperkirakan tercapai karena pada tahun 2023 akan dilakukan peningkatan terminal tipe B diantaranya Terminal Banyuputih di Kab. Batang, Terminal Banjarnegara di Kab. Banjarnegara serta Terminal Pracimantoro, Jatisrono dan Purwantoro di Kab. Wonogiri serta Pembangunan Terminal Kutoarjo di Kab. Purworejo.

i. Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa tercapai 78,39 % dari target 78,39 % dengan tingkat capaian 100 % sementara target akhir renstra adalah 87,79 % dan diperkirakan tercapai karena sudah tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

- j. Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum
Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum tercapai 124,87 % dari target 90,14 % dengan tingkat capaian 138,52 % sementara target akhir renstra adalah 94,45 % dan diperkirakan tercapai/melebihi karena sudah tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan lalu lintas sudah normal serta koordinasi yang baik antar Stake Holder dalam pelaksanaan angkutan lebaran dan Nataru.
- k. Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Realisasi Indikator pada tahun 2022 Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah (6 Indikator pada masing Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 28,13 % dari target 25 % dengan tingkat capaian 112,52 % sementara target akhir renstra adalah 31,25 % dan diperkirakan tercapai sebesar 37,50% (12 DRK), Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 40 % dari target 40 % dengan tingkat capaian 100 % sementara target akhir renstra adalah 50 % dan diperkirakan tercapai 55,00% (11 DRK), Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 50 % dari target 50 % dengan tingkat capaian 100 % sementara target akhir renstra adalah 62,5 % dan diperkirakan tercapai 68,75 (11 DRK), Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 23,08 % dari target 30,77 % dengan tingkat capaian 75,00 % sementara target akhir renstra adalah 38,46 % dan diperkirakan tercapai 42,31% (11 DRK), Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 61,54 % dari target 61,54 % dengan tingkat capaian 100 % sementara target akhir renstra adalah 76,92 % dan diperkirakan tercapai 84,62 % (11 DRK) dan Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 27,59 % dari target 27,59 % dengan tingkat capaian 100 % sementara target akhir renstra adalah 34,48 % dan diperkirakan tercapai 41,38% (12 DRK) . Indikator proyeksi akan tercapai karena Koordinasi yang baik antar *Stake holder* terutama dengan peningkatan peran forum LLAJ yang menghasilkan rekomendasi penanganan DRK yang perlu ditindak lanjuti serta rekomendasi KNKT dan/atau usulan Kab/Kota.

1. Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api
Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api tercapai 17,88 % dari target 36,36 % dengan tingkat capaian 49,17 % sementara target akhir renstra adalah 45,45 % dan diperkirakan tercapai karena adanya koordinasi yang baik antar *stake holder* serta pada tahun 2023 akan dilakukan pemasangan EWS pada 7 (tujuh) perlintasan sebidang sehingga total EWS terpasang sebanyak 10 (sepuluh).
- m. Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang
Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang tercapai 37,5 % dari target 62,5 % dengan tingkat capaian 60 % sementara target akhir renstra adalah 75 % dan diperkirakan tercapai karena adanya koordinasi yang baik antar *stake holder* serta pada tahun 2023 akan dilakukan pembangunan 3 (tiga) dermaga 1 Lokasi lampu Dermaga.
- n. Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi
Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi tercapai 31,92 % dari target 33,55 % dengan tingkat capaian 95,14 % sementara target akhir renstra adalah 34,85 % dan diperkirakan melebihi 36,48% hal ini karena akan dilakukan pembukaan koridor baru si Surakarta – Sukoharjo – Wonogiri dengan operasional 14 Bus sehingga total Bus Trans Jateng yang operasional sebanyak 112 Bus, realisasi melebihi target karena terdapat penambahan 3 armada Koridor Semarang-Bawen Tahun 2020 (Load Faktor 97%)

B. Capaian Kinerja Pelayanan Dengan Status Belum Tercapai

1. Capaian kinerja indikator sasaran

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Transportasi tercapai 29,19 % dari target 41,82 % dengan tingkat capaian 69,799 % sementara target akhir renstra adalah 51,45 % dan diperkirakan tidak akan tercapai dengan proyeksi capaian 48,83%. disebabkan karena peniadaan kegiatan abdiyasa dan pelajar pelopor tahun 2020, 2021 dan 2022 di Tingkat nasional dan masih dibutuhkannya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.

2. Capaian kinerja indikator program

Indikator program pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan perkiraan belum tercapai sampai dengan Tahun 2023 :

a. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang tercapai 30,03 % dari target 42,85 % dengan tingkat capaian 70,08 % sementara target

akhir renstra adalah 52,34 % dan diperkirakan tidak tercapai dengan proyeksi capaian 35,97 %. Hal tersebut karena masih dibutuhkan rambu 577 buah, rppj 65 unit, marka 211.580 meter, guardrail 703 beam, warling light 4 unit, deliniator 375 buah, cermin tikungan 42 unit , atcs 2 unit akibat adanya realokasi anggaran pengadaan & pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tahun 2020, 2021 dan 2022 dalam rangka penanganan dan pemulihan dampak pandemi covid-19.

- b. Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan

Realisasi Indikator pada tahun 2022 Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan tercapai 8,9 % dari target 14,63 % dengan tingkat capaian 60,83 % sementara target akhir renstra adalah 18,52 % dan diperkirakan tidak tercapai dengan proyeksi realisasi 12,99% karena peniadaan kegiatan abdiyasa dan pelajar pelopor tahun 2020, 2021 dan 2022 di tingkat nasional sehingga kegiatan dimaksud di tingkat provinsi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan surat dirjendat NO.AJ.904/01/16/DJPD/2020 Tanggal 5 Mei 2020, NO.AJ.506/01/01/AJ/VI/2021 & NO.122/MK/VI/2021 Tanggal 9 Juni 2021 DAN NO.AJ.506/01/01/AJ/V/2022 Tanggal 19 Mei 2022.

Tabel II.58. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

| Uraian | Pagu Indikatif Renstra PD pada Tahun (Rp. 000) | | | | | Anggaran pada Tahun (Rp. 000) | | | | | Realisasi Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp. 000) | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| PENDAPATAN | - | - | - | - | - | 11.500.000 | 8.570.479 | 13.831.164 | 22.321.786 | 26.400.000 | 15.734.896 | 11.863.807 | 14.612.292 | 26.898.579 | 26.400.000 |
| Retribusi Daerah | | | | | | 3.611.456 | 3.819.085 | 2.308.620 | 3.521.786 | 5.400.000 | 4.025.538 | 3.141.613 | 1.995.094 | 4.419.443 | 5.400.000 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | | | | | | 7.888.544 | 4.751.394 | 11.522.544 | 18.800.000 | 21.000.000 | 11.709.358 | 8.722.194 | 12.617.198 | 22.479.136 | 21.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA | 159.088.000 | 318.569.963 | 307.679.528 | 300.737.886 | 309.410.034 | 158.758.000 | 94.761.827 | 204.112.865 | 170.418.443 | 205.010.705 | 159.088.000 | 318.569.963 | 307.679.528 | 300.737.886 | 309.410.034 |
| Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 126.022.634 | 272.428.026 | 251.800.309 | 228.442.758 | 241.882.204 | 126.474.284 | 74.549.162 | 141.868.874 | 109.379.027 | 132.784.529 | 126.022.634 | 272.428.026 | 251.800.309 | 228.442.758 | 241.882.204 |
| Pengelolaan Pelayaran | 2.676.000 | 5.029.000 | 13.806.000 | 29.933.000 | 23.860.000 | 2.676.000 | 1.523.263 | 1.537.733 | 1.936.216 | 3.404.216 | 2.676.000 | 5.029.000 | 13.806.000 | 29.933.000 | 23.860.000 |
| Pengelolaan Perkeretaapian | 3.159.000 | 3.809.000 | 4.409.000 | 3.809.000 | 3.909.000 | 3.184.000 | 1.706.272 | 1.842.000 | 1.665.024 | 3.398.751 | 3.159.000 | 3.809.000 | 4.409.000 | 3.809.000 | 3.909.000 |
| Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 27.230.366 | 37.303.937 | 37.664.219 | 38.553.128 | 39.758.830 | 26.423.716 | 16.983.130 | 58.864.258 | 57.438.176 | 65.423.209 | 27.230.366 | 37.303.937 | 37.664.219 | 38.553.128 | 39.758.830 |

Ket : Data realisasi TA. 2023 merupakan perkiraan

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Tabel II.59. Rasio Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

| Uraian **) | Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/ Sampai Dengan Tahun (Rp. 000) | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (%) | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PENDAPATAN | 136,83 | 138,43 | 105,65 | 120,50 | 100,00 | 11,29 | 8,08 |
| Retribusi Daerah | 111,47 | 82,26 | 86,42 | 125,49 | 100,00 | 6,62 | 5,09 |
| Lain-Lain PAD yang Sah | 148,43 | 183,57 | 109,50 | 119,57 | 100,00 | 12,49 | 8,85 |
| | | | | | | | |
| BELANJA | 95,19 | 95,10 | 95,35 | 98,28 | 100,00 | 4,51 | 5,26 |
| Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 95,12 | 95,54 | 95,45 | 98,84 | 100,00 | 0,95 | 1,88 |
| Pengelolaan Pelayaran | 97,89 | 96,95 | 84,99 | 84,06 | 100,00 | 4,28 | 4,61 |
| Pengelolaan Perkeretaapian | 97,57 | 97,32 | 97,83 | 99,26 | 100,00 | 1,26 | 1,72 |
| Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 94,95 | 92,81 | 95,31 | 97,64 | 100,00 | 11,92 | 12,33 |

Ket : Data realisasi TA. 2023 merupakan perkiraan

Sumber : Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Rasio antara realisasi dan anggaran Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dikatakan baik pada Tahun 2022 dengan rasio 98,28% dengan rincian pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2022 sebesar 98,84%, Program Pengelolaan Pelayaran pada Tahun 2022 sebesar 84,06%, Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Tahun 2022 sebesar 99,26%, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 sebesar 97,64%. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan tersebut karena prosedur/mekanisme pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Perhubungan berjalan dengan baik, jumlah personil serta kualitas personil yang cukup dengan adanya personil Non PNS yang sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, selain itu progress pelaksanaan keempat program tersebut pada Tahun 2022 sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan dikatakan kurang baik pada Tahun 2020 pada Tahun 2020 dengan rasio 95,10% dengan rincian pada Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) rasio antara realisasi dan anggaran Tahun 2022 sebesar 95,54%, Program Pengelolaan Pelayaran pada Tahun 2022 sebesar 96,95%, Program Pengelolaan Perkeretaapian pada Tahun 2022 sebesar 97,32%, Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2022 sebesar 92,81%. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan tersebut dikarenakan anggaran pada Tahun 2020 dialihkan untuk mendukung penanganan darurat pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, salah satu kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan yaitu pelaksanaan posko pengendalian di pintu masuk Jawa Tengah pada 17 lokasi di perbatasan Jawa Tengah dan implementasi Bus Sehat Trans Jateng. Dengan demikian berimplikasi terhadap target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berbagai kondisi *Internal* dan *Eksternal* yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi *eksternal* tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal dalam perhubungan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan perkeretaapian sebagai berikut.

Tabel II.60. Analisa SWOT Sektor Perhubungan Darat

| | Strengths (Kekuatan) | Weaknesses (Kelemahan) |
|--------------------------|---|---|
| Kondisi Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah operasi dalam Provinsi Jawa Tengah (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 tahun 2018 terkait jasa transportasi online/daring), sistem manajemen informasi yang terintegrasi, rencana tata ruang, dan peraturan lain yang terkait; 2) Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah berupa TransJateng; 3) Fasilitas keselamatan menjadi salah satu prioritas dalam agenda rencana strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan prasarana untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang berkebutuhan khusus belum merata dan sesuai dengan peraturan yang telah ada; 2) Belum ada tupoksi dishub terkait perizinan dan pengawasan angkutan barang umum (berdasarkan PP 5 Tahun 2021); 3) Rencana pembangunan jalan lingkar dan jalan tol dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya terealisasi; 4) Pemanfaatan Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah belum optimal terlihat dari jumlah bus yang masuk terminal sedikit dan jumlah penumpang yang naik/turun di terminal berkurang. Pendapatan daerah dari terminal hanya dari retribusi, belum ada alternatif pendapatan lainnya; 5) Konektivitas antara angkutan umum dan angkutan lanjutan dari/ke terminal dan stasiun belum terhubung sempurna; 6) Ketersediaan SDM di terminal Tipe B masih terbatas. |
| | Opportunities (Peluang) | Threats (Ancaman) |
| Kondisi Eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industri; 2) Keberadaan layanan transportasi massal perkotaan yang berperan sebagai feeder; 3) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 4) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi; 5) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan aglomerasi Trans Jateng yang meningkat. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Skema pendanaan yang beralih untuk digunakan pada penanganan COVID-19; 2) Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor; 3) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi; 4) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi; 5) Terminal belum mengakomodir UMKM. |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal di sektor Perhubungan Laut baik ASDP maupun laut sebagai berikut.

Tabel II.61. Analisa SWOT Sektor Perhubungan Laut

| Strengths (Kekuatan) | | Weaknesses (Kelemahan) | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Kondisi Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, dan peraturan terkait pengembangan di bidang pelayaran; 2) Angkutan laut banyak menarik wisatawan baik dalam dan luar negeri; 3) Angka perizinan angkutan laut telah memenuhi target. | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan prasarana untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang berkebutuhan khusus belum merata dan sesuai dengan peraturan yang telah ada; 2) Konektivitas antara angkutan umum atau angkutan lanjutan dari/ke Pelabuhan; 3) Lokasi Pelabuhan dan Dermaga jauh dari lokasi perhentian angkutan umum; 4) Pelabuhan Pengumpan Regional yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum seluruhnya beroperasi rutin; 5) Keterbatasan Pelabuhan Perikanan untuk memiliki syahbandar. Hanya 5 pelabuhan dari 11 pelabuhan yang memiliki syahbandar; 6) Keterbatasan SDM pelabuhan perikanan dan kurangnya pelatihan nahkoda. |
| Opportunities (Peluang) | | Threats (Ancaman) | |
| Kondisi Eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Keberadaan layanan transportasi massal perkotaan yang dapat berperan sebagai feeder dari lokasi Pelabuhan ataupun dermaga; 2) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 3) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan angkutan aglomerasi Trans Jateng yang meningkat; 4) Keberadaan angkutan sungai/danau yang ditunjukkan untuk pariwisata dapat berperan sebagai simpul transportasi. | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Skema pendanaan yang beralih untuk digunakan pada penanganan COVID-19; 2) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi; 3) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi. |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Tantangan dan peluang yang dihadapi baik dalam kondisi internal maupun eksternal di sektor Perhubungan Udara akan dibahas lebih fokus terhadap konektivitas dan simpul transportasi antara setiap transportasi dengan bandara yang berada di Provinsi Jawa Tengah

Tabel II.62. Analisa SWOT Sektor Perhubungan Udara

| Strengths (Kekuatan) | | Weaknesses (Kelemahan) | |
|--------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Kondisi Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya payung hukum yang kuat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 2) Kereta bandara dan layanan BRT telah beroperasi di beberapa bandara di Provinsi Jawa Tengah | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan prasarana untuk mendukung aksesibilitas bagi penyandang berkebutuhan khusus belum merata dan sesuai dengan peraturan yang telah ada; 2) Konektivitas antara angkutan umum dan angkutan lanjutan dari/ke lokasi bandara belum terhubung semua. |
| Opportunities (Peluang) | | Threats (Ancaman) | |
| Kondisi Eksternal | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe B) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 2) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. | | <ol style="list-style-type: none"> 1) Skema pendanaan yang beralih untuk digunakan pada penanganan COVID-19; 2) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi. |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Berdasarkan Analisis SWOT dalam melihat *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) telah disusun beberapa strategi sebagai berikut :

Tabel II.63. Matrik Strategi dari Analisa SWOT

| Strategi S-O | Strategi S-T |
|--|---|
| “Strength” untuk memanfaatkan “Opportunity” | “Strength” untuk mengatasi “Threats” |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Sinkronisasi program/kegiatan di sektor perhubungan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota; 2) Mengembangkan angkutan umum aglomerasi perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas Kawasan industri dan pariwisata. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Tengah; 2) Memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah pusat; 3) Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi; 4) Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah. |
| Strategi W-O | Strategi W-T |
| Tanggulangi “Weaknesses” untuk memanfaatkan “Opportunities” | Tanggulangi “Weaknesses” untuk mengatasi “Threats” |
| <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Jawa Tengah; 2) Meningkatkan jumlah dan kapasitas aparatur serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1) Melengkapi fasilitas keselamatan pada Daerah Rawan Kecelakaan Jawa Tengah; 2) Memfasilitasi pembangunan simpul dan atau layanan transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah; 3) Melakukan perhitungan kembali dan skenario terhadap anggaran pemerintah provinsi setelah kondisi COVID-19. |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

- A. Strategi *Strengths – Oportunities*
1. Sinkronisasi program/kegiatan di sektor perhubungan dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. Mengembangkan angkutan umum aglomerasi perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas Kawasan industri dan pariwisata.
- B. Strategi *Strengths - Threats*
1. Koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Jawa Tengah;
 2. Memfasilitasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan peningkatan keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah pusat;
 3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelayanan kepada masyarakat menggunakan teknologi informasi;
 4. Melibatkan instansi terkait dalam peningkatan pembinaan dan pemahaman penyedia layanan transportasi untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di Jawa Tengah;
- C. Strategi *Weaknesses – Oportunities*
1. Menyediakan, meningkatkan dan mempertahankan kinerja sarana prasarana transportasi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis wilayah di Jawa Tengah;
 2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas aparatur serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- D. Strategi *Weaknesses - Threats*
1. Melengkapi fasilitas keselamatan pada Daerah Rawan Kecelakaan Jawa Tengah;
 2. Memfasilitasi pembangunan simpul dan atau layanan transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah.
 3. Melakukan perhitungan kembali dan skenario terhadap anggaran pemerintah provinsi setelah kondisi COVID-19.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada Bab II, berikut Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi *Internal* maupun *Eksternal* dan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | URUSAN/MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|--|---|---|
| | PERHUBUNGAN | | |
| 1 | Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah | | |
| | | Masih kurangnya konektivitas angkutan jalan | |
| | | | Masih kurangnya pemenuhan angkutan taksi |
| | | | Masih rendahnya angkutan barang berijin |
| | | | Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam Trayek yang |
| | | | Tarif dan Load Factor kelas ekonomi perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan |
| | | | Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi |
| | | | Belum semua kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi |
| | | | Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan sesuai kewenangan belum optimal |

| NO | URUSAN/MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|----------------------|---|--|
| | | | Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan kewenangan provinsi belum optimal |
| | | Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal | |
| | | | Tidak semua terminal Tipe B dalam kondisi baik |
| | | | Kurangnya penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B |
| | | | Pembangunan gedung terminal belum menyeluruh |
| | | | Masih diperlukannya pengembangan sarana dan prasarana terminal |
| | | | Belum semua terminal penumpang tipe b asetnya sepenuhnya milik pemerintah provinsi. |
| | | Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | |
| | | | Masih kurangnya implementasi dokumen RIJLLAJ |
| | | | Masih diperlukannya pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi |
| | | Masih rendahnya keterisian Bus | |
| | | | Kurangnya pemeliharaan terminal Tipe B |
| | | Belum optimalnya Konektivitas Perkotaan | |
| | | | Kurangnya jumlah tempat perhentian bus (TPB) Terpenuhi |
| | | Belum optimalnya konektivitas transportasi laut dan ASDP | |
| | | | Perlunya melengkapi dokumen sebagai persyaratan izin trayek berdasarkan tingkatannya |
| | | | Belum terpenuhinya fasilitas Pelabuhan SDP |

| NO | URUSAN/MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|--|--|--|
| | | | Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin |
| | | | Masih rendahnya <i>Berth occupancy ratio</i> |
| | | | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Transportasi Laut dan ASDP belum optimal |
| 2 | Masih tingginya kecelakaan perjalanan transportasi | | |
| | | Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | |
| | | | Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal |
| | | | Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ |
| | | | Perlunya rekomendasi/persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi |
| | | | Masih banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan |
| | | DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani belum optimal menurunkan kecelakaan | |
| | | | Kurangnya rehabilitasi DRK |
| | | | Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi |
| | | Masih kurangnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | |
| | | | Masih kurangnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah |
| | | | Masih diperlukannya inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (Kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan) |

| NO | URUSAN/MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|---|--|
| | | | Masih rendahnya kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Provinsi (sopir dan pelajar) |
| | | Masih rendahnya rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti | |
| | | | Masih rendahnya jumlah kendaraan yang dilakukan ramp check |
| | | | Masih diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan WASTIB untuk meningkatkan jumlah perusahaan angkutan umum yang menerapkan manajemen keselamatan (kelengkapan administrasi dan kelaikan jalan) terhadap kendaraan yang dimiliki |
| | | Belum semua perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar | |
| | | | Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi belum direview dan ditetapkan; |
| | | | Masih banyaknya perlintasan sebidang Kereta Api yang pemasangan fasilitas keselamatan belum sesuai standar; |
| | | Masih rendahnya Jumlah lintas Penyeberangan Sungai yang terpenuhi fasilitas keselamatan | |
| | | | Kurangnya pemenuhan Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai |
| 3 | Belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum | | |
| | | Perpindahan moda angkutan umum masih rendah | |
| | | | Penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan masih rendah |

| NO | URUSAN/MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|--|---|--|
| | | | Masih diperlukannya penyediaan bus Trans Jateng |
| | | Penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum masih rendah | |
| | | | Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih rendah |
| | | | Pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi belum optimal. |
| 4 | Masih rendahnya kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kualitas pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | | |
| | | Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelayanan Perangkat Daerah | |
| | | | Masih diperlukan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah |
| | | | Masih diperlukan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah |
| | | | Masih diperlukan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah |
| | | | Masih diperlukan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah |
| | | | Masih diperlukan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah |
| | | | Masih diperlukan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah |
| | | | Masih diperlukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah |

| NO | URUSAN/MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|--|--|
| 5 | Belum optimalnya pengelolaan risiko pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah | | |
| | | Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | |
| | | | Masih diperlukan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2020

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

A. Gambaran pelayanan perangkat daerah

Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 – 2026 merupakan perencanaan pembangunan transisi antara RPJMD tahun 2018-2023 yang akan berakhir di tahun 2023 dan RPJMD pasca pilkada serentak di tahun 2024 sehingga terjadi kekosongan Kepala Daerah sehingga dokumen perencanaan tidak berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam tiga tahun kedepan adalah “Jawa Tengah yang semakin Sejahtera dan Lestari” dengan Sasaran Daerah yaitu :

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing, berkarakter, dan adaptif;
3. Meningkatnya ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah “Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi” untuk mendukung sasaran daerah Ke-1 “Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan” dan Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah “Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi dan birokrasi di perangkat daerah” untuk mendukung sasaran daerah Ke-4 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis”.

Tabel III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|--|--|--|--|--|
| 1 | Tujuan Daerah “Jawa Tengah yang semakin Sejahterah dan Lestari” | | | | |
| 2 | Sasaran daerah Ke-1 “Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan” | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Dalam Trayek; 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Aglomerasi Perkotaan Dan Perbatasan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Taksi, ASK dan AJDP sebanyak 4.083 kendaraan; 2. Jumlah Angkutan Barang Umum 2.161 kendaraan; 3. Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek (AKDP) 3.550 kendaraan; 4. Terdapat kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan pada Wilayah Pengembangan Kedungsepur, Barlingmaccakeb, Purwomanggung, Barlingmascakeb dan Subosukowonosrate n. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya konektivitas angkutan jalan. 2. Penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum masih rendah. | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemenuhan angkutan taksi; 2. Masih rendahnya angkutan barang berijin; 3. Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam Trayek; 4. Tarif dan Load Factor kelas ekonomi perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan; 5. Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi; 6. Belum semua Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 7. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan sesuai kewenangan belum |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|------------|----------|--------------|--|
| | | | | | <p>optimal;</p> <p>8. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Kewenangan Provinsi Belum optimal.</p> <p>9. Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih rendah;</p> <p>10. Pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi belum optimal.</p> <p>PENDORONG :</p> <p>1. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu;</p> <p>2. Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum;</p> <p>3. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan;</p> <p>4. Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industry di</p> |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | <p>Jawa Tengah;</p> <p>5. Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe A) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020.</p> |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Terminal Angkutan Jalan. 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Transportasi. 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkeretaapian. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat peningkatan terminal tipe B di 14 Lokasi sampai dengan 2023 dan Pembangunan bertahap terminal Kutoarjo Kab. Purworejo. 2. 23 Simpul Terminal tipe B sudah terakomodir dalam RTRW Kab/Kota. 3. Sudah operasional 6 Jaringan trayek Aglomerasi Perkotaan sudah terlayani dan satu trayek aglomerasi direncanakan operasional tahun 2023). 4. Pengadaan dan pemasangan Early | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal; 2. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis; 3. Belum semua perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar. | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua terminal Tipe B dalam kondisi baik; 2. Kurangnya penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; 3. Pembangunan Gedung Terminal belum menyeluruh; 4. Masih diperlukannya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; 5. Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi; 6. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ; 7. Masih diperlukannya pengendalian Pelaksanaan Rencana |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--|
| | | | Warning System (EWS) 10 Lokasi. | | <p>Induk Jaringan LLAJ Provinsi;</p> <p>8. Terdapat kabupaten yang hanya memiliki terminal tipe C.</p> <p>9. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi belum direview dan ditetapkan;</p> <p>10. Masih banyaknya perlintasan sebidang Kereta Api yang pemasangan fasilitas keselamatan belum sesuai standar.</p> <p>PENDORONG :</p> <p>1. Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (TransJateng);</p> <p>2. Ditetapkannya 3 Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah.</p> <p>3. Sesuai dengan RTRW Provinsi terdapat kebutuhan terminal tipe B di 27 Kab/Kota.</p> <p>4. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur</p> |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|--|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Angkutan Laut; 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan; 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diteritkannya Surat Ukur dan Pas Sungai di Kapal Dermaga Lutung mati (2023); 2. Pembangunan 3 Dermaga Sungai (2023); 3. 67 perusahaan angkutan laut dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Rata-rata BOR 42%. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP; 2. Masih rendahnya Jumlah lintas Penyeberangan Sungai yang terpenuhi fasilitas keselamatan. | <p>Kereta Api Dengan Jalan.</p> <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya melengkapi dokumen sebagai persyaratan ijin trayek ASDP berdasarkan tingkatannya; 2. Belum terpenuhinya Fasilitas Pelabuhan SDP ; 3. Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin; 4. Masih rendahnya <i>Berth Occupancy Ratio</i>; 5. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Transportasi Laut dan ASDP belum optimal; 6. Proses P3D Pelabuhan Pengumpulan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai; 7. Kurangnya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia. <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | <p>Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;</p> <p>2. Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.</p> |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Manajemen Lalu Lintas Jalan; 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Provinsi 2019-2023 Rambu 1.323 buah, RPPJ 106 Unit, Marka 228.420 m', Guardrail 527 Beam, LPJU 1.192 unit, APILL 8 paket, WL 26 unit, Deliniator 2004 buah dan Cermin Tikungan 51 unit. 2. Tahun 2022 KBWU tidak lulus uji 9.561 kendaraan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan; 2. Masih kurangnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal; 2. Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ; 3. Perlunya rekomendasi/persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi; 4. Masih banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan; 5. Masih kurangnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah; 6. Masih diperlukanya |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|--|----------|--------------|--|
| | | <p>pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.</p> | | | <p>Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan);</p> <p>7. Masih rendahnya Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (sopir dan pelajar);</p> <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat berjalan dengan baik; 2. Sudah ditetapkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, yang meliputi peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi Awak |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|--|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan 2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan 3. Evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2022 Jumlah kendaraan melanggar saat <i>ramp check</i> 10.472 kendaraan. 2. Load faktor rata-rata bus 18,57%. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya rekomendasi <i>ramp check</i> yang ditindak lanjuti; 2. DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani belum optimal menurunkan kecelakaan. 3. Masih rendahnya keterisian Bus. | <p>kendaraan bermotor.</p> <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check; 2. Masih diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan WASTIB untuk meningkatkan jumlah perusahaan angkutan umum yang menerapkan manajemen keselamatan (kelengkapan administrasi dan kelaikan jalan) terhadap kendaraan yang dimiliki. 3. Kurangnya rehabilitasi DRK; 4. Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi. 5. Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi; 6. Kurangnya pemeliharaan terminal Tipe B <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat berjalan |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | <p>dengan baik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah ditetapkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, yang meliputi peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi Awak kendaraan bermotor. |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah 2. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah 3. Evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan operasional transportasi Jawa Tengah | <p>Sudah terlayani 6 (lima) koridor angkutan aglomerasi BRT Trans Jateng dengan jumlah bus 98 bus (tahun 2023 7 koridor dengan 112 Bus).</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perpindahan moda angkutan umum masih rendah; 2. Belum optimalnya Konektivitas Perkotaan | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan masih rendah; 2. Masih diperlukannya penyediaan bus Trans Jateng; 3. Kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sektor Pariwisata dan rencana pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah; 2. Tingginya permintaan |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---|---|---|---|---|
| | | | | | masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan. |
| 2 | Sasaran daerah Ke-4 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas; 2. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; 3. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan; 4. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas. | Sampai dengan Tahun 2022 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 79,75. | Belum optimalnya pelaksanaan administrasi pelayanan Perangkat Daerah. | PENGHAMBAT : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih diperlukan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah; 2. Masih diperlukan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah; 3. Masih diperlukan pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah; 4. Masih diperlukan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah; 5. Masih diperlukan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah; 6. Masih diperlukan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah; 7. Masih diperlukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah. PENDORONG : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adanya sistem informasi manajemen |

| NO | Tujuan dan Sasaran Daerah | TUPOKSI PD | EVALUASI | PERMASALAHAN | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------|--|--|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas; 2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas; 3. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi; 4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. | Sampai dengan Tahun 2022 nilai SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 78,28. | Belum optimalnya perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. | <p>(SIM) yang terintegrasi dari GRMS;</p> <p>2. Sudah ada Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kompetensi.</p> <p>PENGHAMBAT : Masih diperlukan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah.</p> <p>PENDORONG : Informasi manajemen (SIM) yang terintegrasi dari GRMS.</p> |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

B. Telaahan Renstra K/L

Didasarkan pada tema dan agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berprestasi menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020-2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, Visi Kementerian Perhubungan “Kementerian Perhubungan Yang Berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah Guna Mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berpribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Perhubungan mempunyai misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi bencana;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Adapun tujuan pembangunan sektor perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu

outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya konektivitas nasional;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi

Tabel III.1. Persandingan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

| Renstra Kemenhub 2020-2024 | | | Renstra Dinas Perhubungan Provinsi 2024-2026 | | | | |
|--|--|--------|---|---|--------|--------|--------|
| Sasaran Strategis | Indikator | Target | Sasaran Strategis | Indikator | Target | | |
| | | 2024 | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya Konektivitas Nasional | Rasio Konektivitas Trans Rasio Konektivitas Transportasi Nasional portasi Nasional | 0,763 | Meningkatnya konektivitas provinsi | Rasio konektivitas provinsi | 0,385 | 0,423 | 0,457 |
| Meningkatnya Keselamatan Transportasi | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan | 23,71 | Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | 16,067 | 15,238 | 14,480 |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi | 88.50 | Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum | <i>On Time Performance</i> layanan transportasi | 83,210 | 85,050 | 86,880 |
| | <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi | 82,08 | | | | | |

Sumber : Renstra Kemenhub 2020-2024

Selain itu untuk sektor transportasi dalam RPJMN, *Major Project* yang berada di Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo, Banjar-Kroya);
2. Elektrifikasi Jalur Ka Jogja-Solo;
3. Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa;
4. Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas;
5. Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo;
6. Pengembangan Bandara JB Soedirman, Kab. Purbalingga;
7. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas;
8. Pengembangan Bandara Adi Sumarmo;
9. Pembangunan KA ekspres Jakarta-Semarang;
10. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang berbasis jalan;
11. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang berbasis rel.

Tabel III.2. Telaahan Renstra K/L

| NO | SASARAN STRATEGIS K/L | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---|--|---|
| 1 | Terwujudnya konektivitas nasional | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukannya moda transportasi berbasis rel utamanya lintas Kedungjati-Tuntang-Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta, Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang-Lasem-Bojonegoro; 2. Masih diperlukannya pengembangan Bandara di Jawa Tengah (Bandara JB. Soedirman, Ngloram dan Dewadaru); 3. Diperlukannya pembangunan Kereta Api akses Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Adi Soemarmo. 4. Masih diperlukannya pembangunan terminal tipe A Demak dan terminal tipe A Purworejo serta peningkatan terminal tipe A di Jawa Tengah. | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan lahan untuk reaktivasi jalur Kereta Api karena jalur eksisting Sebagian besar sudah dimanfaatkan oleh masyarakat; 2. Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; 3. Adanya Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat; 4. Adanya konflik pembebasan lahan untuk pembangunan akses kereta api Pelabuhan Tanjung Emas; 5. Tidak semua terminal Tipe A dalam kondisi baik. <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan transportasi berbasis rel; 2. Daya Tarik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara terhadap KSPN Borobudur; 3. Ditetapkannya Kabupaten Rembang menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) promosi; 4. Integrasi KSPN Borobodur-Dieng sebagai daya Tarik pariwisata; 5. Ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Kendal dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Kabupaten Batang; 6. Lokasi Bandara Adi Soemarmo yang strategis pasca pembangunan Bandara YIA di Yogyakarta. 7. Telah dibangunnya Tol Semarang – Demak (sudah operasional Seksi 2 ruas Sayung – Demak) |
| 2 | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih diperlukan pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi angkutan massal berbasis jalan di perkotaan Semarang eksisting |

| NO | SASARAN STRATEGIS K/L | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------------------------|--|---|
| | | <p>Semarang berbasis jalan;</p> <p>2. Masih diperlukannya Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang berbasis rel.</p> | <p>manajemennya berbeda;</p> <p>2. Belum adanya otoritas khusus yang menangani transportasi di Perkotaan Semarang;</p> <p>3. Belum terintegrasinya layanan <i>Feeder</i> eksisting dengan angkutan utama;</p> <p>4. Kondisi lalu lintas di Perkotaan Semarang rawan kemacetan.</p> <p>PENDORONG :</p> <p>1. Sudah adanya dasar hukum untuk pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang berbasis jalan maupun berbasis rel;</p> <p>2. Ditetapkannya Kawasan Perkotaan Semarang menjadi Kawasan Metropolitan;</p> <p>3. Kondisi lalu lintas di Perkotaan Semarang rawan kemacetan;</p> <p>4. Ditetapkannya Perkotaan Semarang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN).</p> |
| 3 | Meningkatnya keselamatan transportasi | <p>1. Diperlukannya elektrifikasi jalur Semarang-Solo;</p> <p>2. Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan pada Ruas Jalan Nasional yang berada di wilayah provinsi Jawa Tengah.</p> | <p>PENGHAMBAT :</p> <p>1. Semua jalur Kereta Api di Jawa Tengah Masuk dalam RIPNAS sehingga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat;</p> <p>2. Kebutuhan fasilitas keselamatan jalan di Ruas Jalan Nasional sangat banyak.</p> <p>PENDORONG :</p> <p>1. Adanya jalur Kereta Api Loop yang melingkar di Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Adanya Balai Pengelola Transportasi Darat di wilayah Jawa Tengah.</p> |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Adapun telaahan Rencana tata Ruang Wilayah di dalam dokumen Renstra ini :

1. Adanya rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Jawa Tengah pada Kabupaten/Kota yang belum terdapat Terminal Penumpang Tipe B sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Adanya rencana pengembangan angkutan umum berbasis rel baik yang bersifat antar kota, perkotaan dan akses Kawasan strategis diantaranya Pelabuhan, Bandara serta simpul transportasi lainnya;
3. Adanya rencana pembangunan dermaga sungai (Plengsengan) di Provinsi Jawa Tengah;
4. Adanya rencana pengembangan Pelabuhan yang berada di Jawa Tengah utamanya untuk mendukung Kawasan startegis (Kawasan Industri);
5. Adanya rencana pengembangan Bandara di Jawa Tengah untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam KLHS untuk RPJMD, analisis indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dilakukan dengan membandingkan target indikator TPB dengan TPB sesuai Perpres 59 Tahun 2017. Adapun indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas;
2. Panjang jalur kereta api;
3. Jumlah bandara;
4. Jumlah dermaga penyeberangan;
5. Jumlah pelabuhan strategis;
6. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan;
7. Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.

Adapun capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.3. Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2022

| KODE INDIKATOR | INDIKATOR SDGs PROVINSI | TARGET | REALISASI | KET. |
|---|---|--------|-----------|--|
| Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia | | | | |
| Target 3.6 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas | | | | |
| 3.6.1 | Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas | PM | 4.409 | |
| Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi | | | | |
| Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua | | | | |
| 9.1.1.(c) | Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah | PM | 1053,765 | Rencana target reaktivasi jalur kereta api di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 bertambah menjadi 1363,655 kmsp dari 878,155 kmsp pada tahun 2018 (2020 dan 2021 terjadi refocusing anggaran pada program reaktivasi jalur kereta api non aktif di jawa tengah) |

| KODE INDIKATOR | INDIKATOR SDGs PROVINSI | TARGET | REALISASI | KET. |
|---|---|--------|-----------|---|
| 9.1.2 (a) | Jumlah bandara. | PM | 6 | Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Bandar Udara Adi Sumarmo Boyolali, Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap, Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga, Bandar Udara Ngloram Cepu, Bandar Udara Dewadaru Jepara |
| 9.1.2.(b) | Jumlah dermaga penyeberangan | PM | 51 | Pelabuhan Laut yang digunakan sebagai angkutan penyeberangan ada 6 (Kendal, Jepara, Karimunjawa, Parang, Genting, Nyamuk). Dermaga Penyeberangan yang beroperasi sesuai KP432 sejumlah 26 (Lohmanis, Wijayapura, Sodong, Prenca, Alas Malang, Jajok, Pekuyan, Motehan, Klaces, Donan, Derm. Sungai Sleko (Plengsengan), Sungai Karanganyar, Dermaga Sungai Citanduy – Patimbuan, Dermaga Waduk Sempor, Tangen, Miri, Sumberlawang, Dermaga Kemukus di Waduk Kedungombo, Dermaga Kedunguter di Waduk Kedungombo, Dermaga Waduk Cacaban, Dermaga Mijing di Waduk Wadas Lintang, Dermaga di Waduk Gajah Mungkur, Wadaslintang, Garung, Dermaga Tritis di Waduk Wadas Lintang, Seleko) dan dermaga penyeberangan sungai yang belum diakomodir di RIPN KP 432 ada 19 dermaga (di sungai Bengawan Solo, Kali Bodri , Kalikutho, Comal, Pemali, Gangsa, Cisanggarung, Citandeu, Kali Ijo |
| 9.1.2.(c) | Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah | PM | 14 | Pelabuhan strategis hirarki 1 Pelabuhan Utama di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang , 2 Pelabuhan Pengumpul di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal dan 8 Pelabuhan Pengumpan regional di Pelabuhan Sluke, Pelabuhan Tasikagung di Rembang, Pelabuhan Juwana di Pati, Pelabuhan Jepara, Pelabuhan Karimunjawa dan Pelabuhan Legonbajak di Jepara, Pelabuhan Batang, Pelabuhan Kendal dan 3 Pelabuhan Pengumpan Lokal di Pelabuhan Brebes, Pelabuhan Pekalongan, Pelabuhan Pemasang. |
| Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan | | | | |
| Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua | | | | |
| 11.2.1.(a) | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. | PM | 4,7% | Banyaknya pengguna moda transportasi umum (AKDP, BRT Trans Jateng, BRT Trans Semarang, Batik Solo Trans) di perkotaan pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk di perkotaan (Kota Semarang, Surakarta, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Magelang) pada kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, dinyatakan dengan satuan persen (%). penurunan pengguna angkutan umum terjadi karena beberapa kebijakan terkait pembatasan perjalanan akibat pandemi Covid 19 |
| 11.2.1.(b). | Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar. | PM | 2 | Angkutan rel joglosemarkarto, Kaligung dan Kedungsepur |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Berikut telaah implikasi RTRW dan KLHS sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4. Telahaan RTRW dan KLHS

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|-----------------------------------|---|---|
| A | RTRW | | |
| 1 | Sitem jaringan transportasi darat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya konektivitas angkutan jalan; 2. Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal; 3. Masih rendahnya keterisian Bus; 4. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis. | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya pemenuhan angkutan taksi; 2. Masih rendahnya angkutan barang berijin; 3. Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam Trayek; 4. Tarif dan Load Factor kelas ekonomi perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan; 5. Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi; 6. Belum semua Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 7. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan sesuai kewenangan belum optimal; 8. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Kewenangan Provinsi Belum optimal; 9. Tidak semua terminal Tipe B dalam kondisi baik; 10. Kurangnya penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B; 11. Pembangunan Gedung Terminal belum menyeluruh; 12. Masih diperlukannya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; 13. Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi; 14. Kurangnya pemeliharaan terminal Tipe B; 15. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ; 16. Masih diperlukannya pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; 17. Terdapat kabupaten yang hanya memiliki terminal tipe C. <p>PENDORONG :</p> |

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|-----------------------------------|---|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu; 2. Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum; 3. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 4. Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industry di Jawa Tengah; 5. Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe A) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 6. Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (TransJateng); 7. Ditetapkannya 3 Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah; 8. Sesuai dengan RTRW Provinsi terdapat kebutuhan terminal tipe B di 27 Kab/Kota. |
| 2 | Sistem jaringan transportasi laut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP; 2. Masih rendahnya Jumlah lintas Penyeberangan Sungai yang terpenuhi fasilitas keselamatan. | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya melengkapi dokumen sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya; 2. Belum terpenuhinya Fasilitas Pelabuhan SDP ; 3. Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin; 4. Masih rendahnya Berth occupancy ratio; 5. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Transportasi Laut dan ASDP belum optimal; 6. Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai; 7. Kurangnya Fasilitas Pelayanan |

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---|---|---|
| | | | <p>Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia.</p> <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional. |
| 3 | Sistem jaringan transportasi udara | Masih kurangnya simpul dan layanan transportasi strategis di Jawa Tengah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi; 2. Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya permintaan daerah dalam pengembangan Bandara; 2. Munculnya kawasan pengembangan strategis wilayah di kawasan DLKr dan DLKp Bandara. |
| B | KLHS | | |
| 1 | Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan; 2. DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani belum optimal menurunkan kecelakaan. 3. Masih kurangnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; 4. Masih rendahnya rekomendasi <i>ramp check</i> yang | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal; 2. Perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ; 3. Perlunya rekomendasi/persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi; 4. Masih banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan; 5. Kurangnya rehabilitasi DRK; 6. Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi. 7. Masih kurangnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa |

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|--------------------------|--|---|
| | | ditindak lanjuti. | <p>tengah;</p> <p>8. Masih diperlukannya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan);</p> <p>9. Masih rendahnya Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (sopir dan pelajar);</p> <p>10. Masih rendahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check;</p> <p>11. Masih diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan WASTIB untuk meningkatkan jumlah perusahaan angkutan umum yang menerapkan manajemen keselamatan (kelengkapan administrasi dan kelaikan jalan) terhadap kendaraan yang dimiliki.</p> <p>PENDORONG :</p> <p>1. Koordinasi antar pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat berjalan dengan baik;</p> <p>2. Sudah ditetapkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>3. Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, yang meliputi peningkatan kompetensi dan pelatihan bagi Awak kendaraan bermotor.</p> |
| 2 | Panjang jalur kereta api | Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah 1.645,65 km/sp, terdiri dari 929,50 km/sp jalur rel aktif/operasional dan 716,15 km jalur rel non aktif/belum operasional. | <p>PENGHAMBAT :</p> <p>Banyak fungsi lahan yang sudah berubah, sehingga untuk pembebasan sangat sulit dan harus mencari trase baru yang membutuhkan pembebasan tanah (factor social dan nilai investasi).</p> <p>PENDORONG :</p> <p>Provinsi Jawa Tengah memiliki jalur Kereta Api Loop.</p> |
| 3 | Jumlah bandara | Masih belum optimalnya simpul dan layanan transportasi strategis | <p>PENGHAMBAT :</p> <p>1. Diperlukan fasilitasi pembangunan simpul dan layanan transportasi;</p> |

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---|--|---|
| | | di Jawa Tengah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat | <p>2. Tidak adanya nomenklatur program pengelolaan penerbangan pada urusan perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.</p> <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingginya permintaan daerah dalam pengembangan Bandara; 2. Munculnya kawasan pengembangan strategis wilayah di kawasan DLKr dan DLKp Bandara. |
| 4 | Jumlah dermaga penyeberangan | Jumlah dermaga penyeberangan : permasalahan belum memenuhinya aspek keselamatan pada penyeberangan sungai | <p>PENGHAMBAT :</p> <p>Penyedia layanan angkutan penyeberangan sungai belum berbadan hukum/koperasi.</p> <p>PENDORONG :</p> <p>Diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.</p> |
| 5 | Jumlah pelabuhan strategis | Tingginya biaya pemeliharaan untuk normalisasi alur pelayaran karena tingginya laju sedimentasi | <p>PENGHAMBAT :</p> <p>Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai.</p> <p>PENDORONG :</p> <p>Mulai Tahun 2020 sudah dilakukan review KP.432 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.</p> |
| 6 | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Konektivitas Perkotaan 2. Perpindahan moda angkutan umum masih rendah; 3. Penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum masih rendah. 4. Masih kurangnya | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi; 2. Penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan masih rendah; 3. Masih diperlukannya penyediaan bus Trans Jateng; 4. Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih |

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------|---|--|
| | | <p>konektivitas angkutan jalan;</p> <p>5. Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal;</p> <p>6. Masih rendahnya keterisian Bus;</p> <p>7. Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis.</p> | <p>rendah;</p> <p>5. Pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi belum optimal.</p> <p>6. Masih kurangnya pemenuhan angkutan taksi;</p> <p>7. Masih rendahnya angkutan barang berijin;</p> <p>8. Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam Trayek;</p> <p>9. Tarif dan Load Factor kelas ekonomi perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;</p> <p>10. Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi;</p> <p>11. Belum semua Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>12. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan sesuai kewenangan belum optimal;</p> <p>13. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Kewenangan Provinsi Belum optimal;</p> <p>14. Tidak semua terminal Tipe B dalam kondisi baik;</p> <p>15. Kurangnya penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;</p> <p>16. Pembangunan Gedung Terminal belum menyeluruh;</p> <p>17. Masih diperlukannya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;</p> <p>18. Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi;</p> <p>19. Kurangnya pemeliharaan terminal Tipe B;</p> <p>20. Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ;</p> <p>21. Masih diperlukannya pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;</p> <p>22. Terdapat kabupaten yang hanya memiliki terminal tipe C.</p> |

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|--|---|---|
| | | | <p>PENDORONG :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sektor Pariwisata dan rencana pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah; 2. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 3. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman dan tepat waktu; 4. Diterbitkannya Permendagri No.101/2014 tentang PKB dan BBNKB yang mewajibkan angkutan umum berbadan hukum; 5. Tingginya permintaan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum / massal aglomerasi perkotaan; 6. Pengembangan kawasan aglomerasi dan adanya penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industry di Jawa Tengah; 7. Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal Tipe A) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020; 8. Adanya layanan transportasi umum aglomerasi perkotaan di Provinsi Jawa Tengah (TransJateng); 9. Ditetapkannya 3 Pusat Kegiatan Lokal dipromosikan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah; <p>Sesuai dengan RTRW Provinsi terdapat kebutuhan terminal tipe B di 27 Kab/Kota.</p> |
| 7 | Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar | Belum semua perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar. | <p>PENGHAMBAT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi belum direview dan ditetapkan; 2. Masih banyaknya perlintasan sebidang Kereta Api yang pemasangan fasilitas keselamatan belum sesuai standar. <p>PENDORONG :</p> <p>Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang</p> |

| NO | IMPLIKASI RTRW/KLHS | PERMASALAHAN PD | PENGHAMBAT/PENDORONG |
|----|---------------------|-----------------|--|
| | | | Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan. |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah di atas selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

A. Peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah

Isu yang utama di sektor transportasi adalah konektivitas, dengan adanya rencana proyek strategis di Provinsi Jawa Tengah utamanya yang tertuang dalam Perpres 79/2019 dan Perpres 109/2020 membutuhkan peran di sektor transportasi. Untuk itu pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan kawasan strategis menjadi isu yang sangat penting, terutama mengoptimalkan pelayanan inter/antarmoda transportasi yang menghubungkan simpul-simpul transportasi serta meningkatkan pelayanan angkutan umum yang nyaman dan handal.

B. Peningkatan kualitas simpul transportasi

Kondisi prasarana pada simpul-simpul transportasi di Jawa Tengah belum sesuai dengan standar pelayanan minimal utamanya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, selain itu dengan adanya pengembangan infrastruktur strategis sektor transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Jawa Tengah diperlukan fasilitasi Pemerintah Provinsi diantaranya optimalisasi Bandara yang ada di Jawa Tengah untuk mendukung kelancaran distribusi orang dan atau barang di Jawa Tengah.

Isu lain yang tak kalah penting adalah penyediaan simpul transportasi laut dan atau penyeberangan. Dengan adanya rencana proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta diperlukannya dermaga sungai yang memenuhi standar keselamatan.

C. Optimalisasi ruang pergerakan dengan peningkatan kualitas layanan angkutan umum

Tingkat pertumbuhan kendaraan yang tinggi merupakan isu lain di sektor transportasi, hal ini menyebabkan beberapa ruas jalan menjadi rawan macet. Sehingga dibutuhkan utamanya untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum serta pengalihan moda jalan ke moda transportasi lainnya. Hal ini dibutuhkan peran Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi rencana Pemerintah Pusat dalam pengembangan angkutan umum berbasis rel.

D. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah

Isu yang tak kalah penting di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan sektor transportasi adalah tingginya angka kecelakaan baik di jalan raya maupun diperlitanan sebidang Kereta Api. Hal ini disebabkan banyaknya Daerah Rawan Kecelakaan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah utamanya yang berada di Ruas Jalan Provinsi. Selain itu dengan adanya budaya penerbangan balon udara di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah, dibutuhkan peran pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan tersebut dengan berkoordinasi dengan Stakeholders terkait.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan.

Adapun tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dengan indikator tujuan Indeks pelayanan transportasi, diharapkan pada akhir Tahun 2026 mencapai angka 6,532;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah), diharapkan pada Tahun 2026 mencapai angka 78,68.

Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Ke-1 sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Ke-1 “Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan”. Tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Ke-2 sebagaimana dimaksud untuk mendukung sasaran daerah Ke-4 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis”. Sasaran daerah dimaksud mendukung pada tujuan Daerah “Masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari”.

Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas provinsi, dengan Rasio konektivitas provinsi pada Tahun 2026 sebesar 0,457;
2. Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah, dengan indikator Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan pada Tahun 2026 sebesar 14,480;
3. Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum, dengan indikator *On Time Performance* layanan transportasi pada Tahun 2026 sebesar 86,880%

Untuk mendukung pencapaian tujuan “Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah” terdapat beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2026 sebesar 80,75;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, dengan indikator Indeks Manajemen Risiko pada Tahun 2026 sebesar 3,4.

Untuk mendukung sasaran Ke-3 pada tujuan Ke-1 dalam Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum, Sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) direncanakan akan diterapkan pada Balai Transportasi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah, berupa penerapan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem BLUD pada Balai Transportasi Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan Studi Pola Pengelolaan dan Pengembangan Angkutan Aglomerasi terdapat 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu Kedungsepur, Subosukawonosraten, Barlingmascakeb dan Purwomanggung. Selain itu dengan terbitnya Perpres 109/2020 utamanya Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang diperlukan kajian pengembangan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Petanglong serta rencana integrasi layanan Angkutan Aglomerasi Perkotaan Trans Jateng Wilayah Pengembangan Kedungsepur dan Petanglong. Untuk Wilayah Pengembangan Petanglong sendiri sudah dilakukan kajian Studi Kelayakan Layanan Angkutan Masal Aglomerasi Perkotaan di wilayah Pengembangan Petanglong pada TA. 2022 dengan rekomendasi 4 Koridor diantaranya yaitu Koridor I Pekalongan – Kajen, Koridor II Banyuputih – Batang, Koridor IIA Limpung – Banyuputih, Koridor IIIB KIT Batang – Banyuputih dan Koridor IV Weleri – Banyuputih (integrasi layanan angkutan aglomerasi WP Kedungsepur dan WP Petanglong). Dari kelima wilayah pengembangan tersebut terdapat 18 rute atau koridor yang harus dioperasikan. Sampai dengan tahun 2022 telah dioperasikan sebanyak 6 (enam) koridor dan 1 (satu) Koridor direncanakan akan dibuka pada tahun 2023 yaitu koridor Surakarta – Sukoharjo - Wonogiri dengan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Dengan melihat jumlah kebutuhan koridor tersebut serta fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu ada terobosan atau inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan transportasi umum aglomerasi yang lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem BLUD Balai Transportasi Jawa Tengah harus memenuhi persyaratan substantif, Administratif dan teknis sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Dokumen administratif berupa Rencana Strategis BLUD Balai Transportasi Jawa Tengah disusun tersendiri sebagai bagian dari Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah serta menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan Teknik analisis bisnis. Penyusunan

Renstra tersebut memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan dan rencana keuangan.

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran | Satuan | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|---|--|---|--------|----------------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi | | Indeks pelayanan transportasi | Angka | NA | 5,767 | 6,066 | 6,308 | 6,532 | 6,532 |
| | 1. Meningkatnya konektivitas provinsi | Rasio konektivitas provinsi | Angka | 0,250 | 0,299 | 0,385 | 0,423 | 0,457 | 0,457 |
| | 2. Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | Angka | 18,442 | 16,906 | 16,067 | 15,238 | 14,480 | 14,480 |
| | 3. Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum | <i>On Time Performance</i> layanan transportasi | % | NA | 82,210 | 83,210 | 85,050 | 86,880 | 86,880 |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 78,28 | NA | 78,28 | 78,48 | 78,68 | 78,68 |
| | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 79,75 | 79,75 | 80,25 | 80,5 | 80,75 | 80,75 |
| | 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah | Indeks Manajemen Risiko | Angka | NA | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

4.2. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan renstra dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis

Hasil identifikasi terdapat 4 (empat) pernyataan Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diantaranya :

1. Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP pada Sasaran Meningkatnya konektivitas Provinsi;
2. Meningkatnya frekuensi kecelakaan transportasi pada Sasaran Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah;
3. Kemacetan lalu lintas pada Sasaran Meningkatkan Kualitas layanan angkutan umum; dan
4. Kerusakan kendaraan saat perjalanan Sasaran Meningkatkan Kualitas layanan angkutan umum.

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 sesuai tabel berikut.

Tabel IV.2. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Risiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|--|--------------|---|---|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya konektivitas Provinsi | Rasio Konektivitas Provinsi | Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP | 9 | Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi) | Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa | Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |
| Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan | Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi | 12 | 1. <i>Human Error</i> ; 2. Tidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan | Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas | Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kecepatan respon penanganan, Sosialisasi <i>call center</i> fasilitas kesehatan, Sosialisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakaan | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |
| Meningkatnya Kualitas layanan angkutan umum | <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi | Kemacetan lalu lintas | 4 | Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana) | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat | | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |
| | | Kerusakan kendaraan saat perjalanan | 12 | Belum optimalnya perawatan kendaraan | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat | Monitoring berkala Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (Penerapan Check Point Kendaraan) | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah akan dicapai. Rumusan strategi dilakukan melalui metode analisa SWOT dalam melihat *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) dan diformulasikan dalam pohon kinerja yang merupakan landasan berpikir logis dari proses bisnis yang dilakukan. Pohon Kinerja merupakan alat bantu untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Rumusan strategi yang disusun bersifat operasional yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan – kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 - 2026 adalah dengan:

1. Meningkatkan keterhubungan antar melalui dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi, meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan sistem jaringan dan simpul transportasi;
2. Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mengoptimalkan penerapan teknologi dan meningkatkan integrasi antar moda transportasi;
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian, dan keuangan;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa.

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi wilayah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Kebijakan tersebut disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran daerah, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian

yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan. Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan pembangunan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Arah kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel V.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|------------------------------------|---|---|
| Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi | Meningkatnya konektivitas provinsi | Meningkatkan keterhubungan antar melalui dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi, meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan sistem jaringan dan simpul transportasi; | <p>TAHUN 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (konversi energi angkutan ramah lingkungan, angkutan aglomerasi perkotaan WP Petanglong dan angkutan pedesaan) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 2. Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B utamanya untuk mendukung Kawasan strategis utamanya pada PKN dan PKW promosi dan kawasan perbatasan; 3. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 4. Peningkatan Konektivitas Perkotaan melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Purwomanggung dan Subosukawonosraten 5. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai penghubungan kab. Batang dan kab. Kendal serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional. <p>TAHUN 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan, perumusan kebijakan (angkutan aglomerasi perkotaan WP Bregasmalang) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---------|----------|---|
| | | | <p>2. Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B utamanya untuk mendukung Kawasan strategis utamanya PKW promosi, KIT Batang dan simpul pendukung operasional trans Jateng;</p> <p>3. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>4. Peningkatan Konektivitas Perkotaan melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Kedungsepur dan Subosukawonosraten</p> <p>5. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan pembangunan dermaga sungai penghubung kab. Batang dan kab. Kendal serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.</p> <p>TAHUN 2026</p> <p>1. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan melalui fasilitasi perizinan dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B utamanya untuk mendukung Kawasan strategis utamanya pada PKW promosi, Kawasan perbatasan dan kawasan penghubung Pantura dan Jalur tengah;</p> <p>3. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis utamanya terminal tipe B dan Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>4. Peningkatan Konektivitas Perkotaan melalui perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Kedungsepur dan Subosukawonosraten</p> <p>5. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP dengan</p> |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|--|---|--|
| | | | <p>pembangunan dermaga sungai penghubungan kab. Brebes dan Kota Tegal serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.</p> |
| | <p>Meningkatnya keselamatan peralangan transportasi di Jawa Tengah</p> | <p>Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat;</p> | <p>TAHUN 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata. 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Palaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar. 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi; 5. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada lintas Penyeberangan Sungai <p>TAHUN 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung jalur penghubungan pansela, jalur tengah dan pantura Jawa Tengah. 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar. 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi; 5. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada lintas Penyeberangan Sungai. <p>TAHUN 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung jalur sejajar pantura. 2. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi; 3. Peningkatan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah melalui pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--------|---|--|--|
| | | | Perusahaan Angkutan Umum serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar. 4. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi; 5. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada lintas Penyeberangan Sungai. |
| | Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum | Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mengoptimalkan penerapan teknologi dan meningkatkan integrasi antar moda transportasi | TAHUN 2024 1. Peningkatan Perpindahan moda ke angkutan umum dengan penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten); 2. Meningkatkan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih melalui pengawasan penyediaan angkutan umum. TAHUN 2025 1. Peningkatan Perpindahan moda ke angkutan umum dengan penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten) serta konversi energi angkutan ramah lingkungan pada WP Kedung sepur (Koridor Semarang -Bawen); 2. Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih melalui pengawasan penyediaan angkutan umum. TAHUN 2026 1. Peningkatan Perpindahan moda ke angkutan umum dengan penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten) serta dan konversi energi angkutan ramah lingkungan pada pada WP Kedung sepur (Koridor Semarang -Bawen) WP Barlingmascakeb (Koridor Purwokerto -Purbalingga); 2. Peningkatan Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih melalui pengawasan penyediaan angkutan umum. |

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|--|
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah | Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah | TAHUN 2024-2026 1. Peningkatan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 2. Peningkatan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah 3. Peningkatan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 4. Peningkatan kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah 5. Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset 6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah 7. Penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah | Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah | TAHUN 2024-2026 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah |

Sumber : Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2024-2026 yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana Tabel 6.1 Sebagai berikut :

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | | | | |
|--|---|-------------------|---|---|---------|---|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|--|--------|----|--------|----|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | |
| Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi | | | | | | | | 177.174.921.000 | | 172.141.459.000 | | 179.563.703.000 | | 528.880.083.000 | Dinas Perhubungan | | | | | |
| | | | | Indeks Pelayanan Transportasi | Angka | 5,767 | 6,066 | | | 6,308 | | 6,532 | 6,532 | | Dinas Perhubungan | | | | | |
| | Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah * | | | | | | | 32.540.438.000 | | 20.468.400.000 | | 23.493.288.000 | | 76.502.126.000 | Dinas Perhubungan | | | | | |
| | | | | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan * | Angka | 16,906 | 16,067 | 32.540.438.000 | 15,238 | 20.468.400.000 | 14,48 | 23.493.288.000 | 14,48 | 76.502.126.000 | Dinas Perhubungan | | | | | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ** | | | | | 29.352.855.000 | | 17.835.005.000 | | 20.763.055.000 | | 67.950.915.000 | | | | | | |
| | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** | Angka | 0,73 | 0,81 | 404.650.000 | 0,84 | 404.650.000 | 0,87 | 404.650.000 | 0,87 | 1.213.950.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | | | | | |
| | | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 404.650.000 | | 404.650.000 | | 404.650.000 | | 1.213.950.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** | Unit | 21596 | 21596 | 404.650.000 | 22676 | 404.650.000 | 23810 | 404.650.000 | 23810 | 1.213.950.000 | SEKSI ANGKUTAN | | | | | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | | | 363.800.000 | | 363.800.000 | | 363.800.000 | | 1.091.400.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | | 36 | 363.800.000 | 36 | 363.800.000 | 36 | 363.800.000 | 108 | 1.091.400.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A; BOYOLALI; KARANGANYAR; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI | | | | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | | | 40.850.000 | | 40.850.000 | | 40.850.000 | | 122.550.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | Laporan | | 2 | 40.850.000 | 2 | 40.850.000 | 2 | 40.850.000 | 6 | 122.550.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A; JAWA TENGAH | | | | |
| | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** | Angka | 0,73 | 0,81 | 115.950.000 | 0,84 | 115.950.000 | 0,87 | 115.950.000 | 0,87 | 347.850.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | | | | | |
| | | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 115.950.000 | | 115.950.000 | | 115.950.000 | | 347.850.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** | Unit | 989 | 989 | 115.950.000 | 1038 | 115.950.000 | 1090 | 115.950.000 | 1090 | 347.850.000 | KEPALA BALAI | | | | | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | | | 95.950.000 | | 95.950.000 | | 95.950.000 | | 287.850.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | | 36 | 95.950.000 | 36 | 95.950.000 | 36 | 95.950.000 | 108 | 287.850.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B; BLORA | | | | |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | Laporan | | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 2 | 20.000.000 | 6 | 60.000.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B; JAWA TENGAH | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|---|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** | Angka | 0,73 | 0,81 | 210.625.000 | 0,84 | 210.625.000 | 0,86 | 210.625.000 | 0,86 | 631.875.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 210.625.000 | | 210.625.000 | | 210.625.000 | | 631.875.000 | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** | Unit | 2229 | 2229 | 210.625.000 | 2340 | 210.625.000 | 2457 | 210.625.000 | 2457 | 631.875.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | | | 185.625.000 | | 185.625.000 | | 185.625.000 | | 556.875.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | | 36 | 185.625.000 | 36 | 185.625.000 | 36 | 185.625.000 | 108 | 556.875.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A; DEMAK; GROBOGAN; KOTA SEMARANG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | Laporan | | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 2 | 25.000.000 | 6 | 75.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A; JAWA TENGAH |
| | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** | Angka | 0,73 | 0,81 | 197.800.000 | 0,84 | 197.800.000 | 0,87 | 197.800.000 | 0,87 | 593.400.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 197.800.000 | | 197.800.000 | | 197.800.000 | | 593.400.000 | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** | Unit | 6734 | 6734 | 197.800.000 | 7071 | 197.800.000 | 7425 | 197.800.000 | 7425 | 593.400.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | | | 167.800.000 | | 167.800.000 | | 167.800.000 | | 503.400.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | | 36 | 167.800.000 | 36 | 167.800.000 | 36 | 167.800.000 | 108 | 503.400.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A; MAGELANG; PURWOREJO; TEMANGGUNG |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | Laporan | | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A; JAWA TENGAH |
| | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** | Angka | 0,73 | 0,81 | 251.990.000 | 0,84 | 251.990.000 | 0,87 | 251.990.000 | 0,87 | 755.970.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 251.990.000 | | 251.990.000 | | 251.990.000 | | 755.970.000 | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** | Unit | 3485 | 3485 | 251.990.000 | 3659 | 251.990.000 | 3842 | 251.990.000 | 3842 | 755.970.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | | | 221.990.000 | | 221.990.000 | | 221.990.000 | | 665.970.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | | 36 | 221.990.000 | 36 | 221.990.000 | 36 | 221.990.000 | 108 | 665.970.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A; BATANG; BREBES; PEKALONGAN |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | Laporan | | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A; JAWA TENGAH |
| | | | | Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** | Angka | 0,73 | 0,81 | 195.500.000 | 0,84 | 195.500.000 | 0,87 | 195.500.000 | 0,87 | 586.500.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 195.500.000 | | 195.500.000 | | 195.500.000 | | 586.500.000 | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** | Unit | 3998 | 3998 | 195.500.000 | 4198 | 195.500.000 | 4408 | 195.500.000 | 4408 | 586.500.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.07.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | | | | | 165.500.000 | | 165.500.000 | | 165.500.000 | | 496.500.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal **** | Laporan | | 36 | 165.500.000 | 36 | 165.500.000 | 36 | 165.500.000 | 108 | 496.500.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B; BANJARNEGARA; PURBALINGGA |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 30.000.000 | | 90.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | Laporan | | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 2 | 30.000.000 | 6 | 90.000.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B; JAWA TENGAH |
| | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** | Angka | 1 | 0,98 | 1.365.540.000 | 0,95 | 1.212.540.000 | 0,93 | 1.354.340.000 | 0,93 | 3.932.420.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | | 1.365.540.000 | | 1.212.540.000 | | 1.354.340.000 | | 3.932.420.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** | Angka | 0 | 0,22 | 1.365.540.000 | 0,44 | 1.212.540.000 | 0,67 | 1.354.340.000 | 0,67 | 3.932.420.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | | | | | 292.080.000 | | 292.080.000 | | 292.080.000 | | 876.240.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | | 78 | 292.080.000 | 78 | 292.080.000 | 78 | 292.080.000 | 78 | 876.240.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **** | | | | | 1.073.460.000 | | 920.460.000 | | 1.062.260.000 | | 3.056.180.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | | 2 | 1.073.460.000 | 2 | 920.460.000 | 2 | 1.062.260.000 | 6 | 3.056.180.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI |
| | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** | Angka | 1 | 0,97 | 1.215.120.000 | 0,94 | 1.177.570.000 | 0,92 | 1.287.920.000 | 0,92 | 3.680.610.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | | 1.215.120.000 | | 1.177.570.000 | | 1.287.920.000 | | 3.680.610.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** | Angka | 0 | 0,19 | 1.215.120.000 | 0,38 | 1.177.570.000 | 0,63 | 1.287.920.000 | 0,63 | 3.680.610.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | | | | | 187.200.000 | | 187.200.000 | | 187.200.000 | | 561.600.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | | 46 | 187.200.000 | 46 | 187.200.000 | 46 | 187.200.000 | 46 | 561.600.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B; BLORA; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **** | | | | | 1.027.920.000 | | 990.370.000 | | 1.100.720.000 | | 3.119.010.000 | | |
| | | | | Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | | 3 | 1.027.920.000 | 3 | 990.370.000 | 4 | 1.100.720.000 | 10 | 3.119.010.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B; BLORA; JEPARA; KUDUS; PATI; REMBANG |
| | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** | Angka | 1 | 0,97 | 1.079.180.000 | 0,95 | 915.280.000 | 0,93 | 1.112.180.000 | 0,93 | 3.106.640.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | | 1.079.180.000 | | 915.280.000 | | 1.112.180.000 | | 3.106.640.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** | Angka | 0 | 0,17 | 1.079.180.000 | 0,39 | 915.280.000 | 0,61 | 1.112.180.000 | 0,61 | 3.106.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | | | | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 638.640.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 638.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A; DEMAK; GROBOGAN; KENDAL; KOTA SEMARANG; SEMARANG |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **** | | | | | 866.300.000 | | 702.400.000 | | 899.300.000 | | 2.468.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | | 3 | 866.300.000 | 4 | 702.400.000 | 4 | 899.300.000 | 11 | 2.468.000.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A; DEMAK; GROBOGAN; KENDAL; KOTA SEMARANG; SEMARANG |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|---|---------|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|---|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** | Angka | 1 | 0,97 | 1.921.440.000 | 0,94 | 1.634.840.000 | 0,92 | 1.200.140.000 | 0,92 | 4.756.420.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | | 1.921.440.000 | | 1.634.840.000 | | 1.200.140.000 | | 4.756.420.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** | Angka | 0 | 0,21 | 1.921.440.000 | 0,43 | 1.634.840.000 | 0,64 | 1.200.140.000 | 0,64 | 4.756.420.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | | | | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 212.880.000 | | 638.640.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 212.880.000 | 56 | 638.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A; MAGELANG; PURWOREJO; TEMANGGUNG; WONOSOBO |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **** | | | | | 1.708.560.000 | | 1.421.960.000 | | 987.260.000 | | 4.117.780.000 | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | | 3 | 1.708.560.000 | 3 | 1.421.960.000 | 3 | 987.260.000 | 9 | 4.117.780.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A; MAGELANG; PURWOREJO; TEMANGGUNG; WONOSOBO |
| | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** | Angka | 1 | 0,97 | 1.618.340.000 | 0,95 | 1.088.840.000 | 0,92 | 2.058.340.000 | 0,92 | 4.765.520.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | | 1.618.340.000 | | 1.088.840.000 | | 2.058.340.000 | | 4.765.520.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** | Angka | 0 | 0,2 | 1.618.340.000 | 0,4 | 1.088.840.000 | 0,6 | 2.058.340.000 | 0,6 | 4.765.520.000 | SEKSI LALU LINTAS | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | | | | | 140.880.000 | | 140.880.000 | | 140.880.000 | | 422.640.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | | 54 | 140.880.000 | 54 | 140.880.000 | 54 | 140.880.000 | 54 | 422.640.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A; BATANG; BREBES; PEKALONGAN; PEMALANG; TEGAL |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **** | | | | | 1.477.460.000 | | 947.960.000 | | 1.917.460.000 | | 4.342.880.000 | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | | 5 | 1.477.460.000 | 5 | 947.960.000 | 5 | 1.917.460.000 | 15 | 4.342.880.000 | SEKSI LALU LINTAS | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A; BATANG; BREBES; PEKALONGAN; PEMALANG; TEGAL |
| | | | | Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** | Angka | 1 | 0,98 | 1.099.900.000 | 0,95 | 774.600.000 | 0,93 | 665.800.000 | 0,93 | 2.540.300.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|--|---|---------|---|--|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|--|---|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | | 1.099.900.000 | | 774.600.000 | | 665.800.000 | | 2.540.300.000 | | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** | Angka | 0 | 0,25 | 1.099.900.000 | 0,5 | 774.600.000 | 0,75 | 665.800.000 | 0,75 | 2.540.300.000 | KEPALA BALAI | | |
| | | 2.15.02.1.05.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | | | | | 145.680.000 | | 145.680.000 | | 145.680.000 | | 437.040.000 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **** | Laporan | | | 56 | 145.680.000 | 56 | 145.680.000 | 56 | 145.680.000 | 56 | 437.040.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B; BANJARNEGARA; BANYUMAS; CILACAP; KEBUMEN; PURBALINGGA |
| | | 2.15.02.1.05.0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas **** | | | | | 954.220.000 | | 628.920.000 | | 520.120.000 | | 2.103.260.000 | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan **** | Unit | | | 1 | 954.220.000 | 1 | 628.920.000 | 1 | 520.120.000 | 3 | 2.103.260.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B; BANJARNEGARA; BANYUMAS; CILACAP; KEBUMEN; PURBALINGGA |
| | | | | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah ** | Angka | 0,978 | 0,981 | 335.000.000 | 0,985 | 335.000.000 | 0,988 | 335.000.000 | 0,988 | 1.005.000.000 | Bidang Lalu Lintas | | |
| | | 2.15.02.1.07 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan *** | | | | | 335.000.000 | | 335.000.000 | | 335.000.000 | | 1.005.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah *** | Unit | 436863 | 438363 | 335.000.000 | 439863 | 335.000.000 | 441363 | 335.000.000 | 441363 | 1.005.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | | |
| | | 2.15.02.1.07.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 900.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi **** | Laporan | | | 135 | 300.000.000 | 135 | 300.000.000 | 135 | 300.000.000 | 405 | 900.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | Bidang Lalu Lintas; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.07.0005 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | | | | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 35.000.000 | | 105.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum **** | Laporan | | | 66 | 35.000.000 | 66 | 35.000.000 | 66 | 35.000.000 | 66 | 105.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | Bidang Lalu Lintas; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *** | | | | | 19.100.500.000 | | 9.078.500.000 | | 11.131.500.000 | | 39.310.500.000 | | | |
| | | | | Rasio perlengkapan jalan terpasang *** | Angka | 0,61 | 0,64 | 19.100.500.000 | 0,66 | 9.078.500.000 | 0,68 | 11.131.500.000 | 0,68 | 39.310.500.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi **** | | | | | 19.100.500.000 | | 9.078.500.000 | | 11.131.500.000 | | 39.310.500.000 | | | |
| | | | | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia **** | Unit | | | 1322 | 19.100.500.000 | 786 | 9.078.500.000 | 911 | 11.131.500.000 | 3019 | 39.310.500.000 | SEKSI REKAYASA LALU LINTAS JALAN | Bidang Lalu Lintas; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.05 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi *** | | | | | 116.320.000 | | 116.320.000 | | 116.320.000 | | 348.960.000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|---|-----------------|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|--|---|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng *** | Kabupaten/ Kota | 14 | 15 | 46.320.000 | 17 | 46.320.000 | 19 | 46.320.000 | 19 | 138.960.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **** | | | | | 46.320.000 | | 46.320.000 | | 46.320.000 | | 138.960.000 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi **** | Dokumen | | 30 | 46.320.000 | 30 | 46.320.000 | 30 | 46.320.000 | 30 | 138.960.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | Bidang Lalu Lintas; JAWA TENGAH |
| | | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ *** | Dokumen | 12 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 70.000.000 | 36 | 210.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.05.0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **** | | | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 70.000.000 | | 210.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi **** | Laporan | | 6 | 70.000.000 | 6 | 70.000.000 | 6 | 70.000.000 | 18 | 210.000.000 | SEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | Bidang Lalu Lintas; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.06 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi *** | | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 375.000.000 | | |
| | | | | Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi *** | Dokumen | 216 | 329 | 125.000.000 | 390 | 125.000.000 | 454 | 125.000.000 | 454 | 375.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | |
| | | 2.15.02.1.06.0006 | Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin **** | | | | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 125.000.000 | | 375.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan **** | Dokumen | | 58 | 125.000.000 | 61 | 125.000.000 | 64 | 125.000.000 | 183 | 375.000.000 | SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN | Bidang Lalu Lintas; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai ** | Angka | 0 | 0,2 | 50.000.000 | 0,4 | 50.000.000 | 0,6 | 50.000.000 | 0,6 | 150.000.000 | Bidang Pelayaran | |
| | | 2.15.03.1.10 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi *** | Angka | 0,04 | 0,11 | 50.000.000 | 0,18 | 50.000.000 | 0,26 | 50.000.000 | 0,26 | 150.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
| | | 2.15.03.1.10.0009 | Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi **** | Unit | | 28 | 50.000.000 | 25 | 50.000.000 | 28 | 50.000.000 | 81 | 150.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | Bidang Pelayaran; Dermaga Rowowsari & LutungmatDermaga Jatipurwo & Dk MunduDermaga Mojolaban, JAWA TENGAH |
| | | 2.15.05 | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN ** | | | | | 3.137.583.000 | | 2.583.395.000 | | 2.680.233.000 | | 8.401.211.000 | | |
| | | | | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan ** | Angka | 0 | 0,04 | 3.137.583.000 | 0,24 | 2.583.395.000 | 0,36 | 2.680.233.000 | 0,36 | 8.401.211.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | 2.15.05.1.01 | Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian *** | | | | | 3.137.583.000 | | 2.583.395.000 | | 2.680.233.000 | | 8.401.211.000 | | |
| | | | | Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian *** | Angka | 0,26 | 0,452 | 3.137.583.000 | 0,698 | 2.583.395.000 | 0,762 | 2.680.233.000 | 0,762 | 8.401.211.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN | |
| | | 2.15.05.1.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **** | | | | | 500.000.000 | | - | | - | | 500.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|--------------------------------------|-------------------|--|--|---------|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian **** | Dokumen | | 1 | 500.000.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 500.000.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian; KOTA SEMARANG |
| | | 2.15.05.1.01.0003 | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **** | | | | | 2.637.583.000 | | 2.583.395.000 | | 2.680.233.000 | | 7.901.211.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian **** | Laporan | | 8 | 2.637.583.000 | 17 | 2.583.395.000 | 9 | 2.680.233.000 | 34 | 7.901.211.000 | SEKSI PERKERETAAPIAN | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian; JAWA TENGAH |
| | Meningkatnya konektivitas provinsi * | | | | | | | 24.067.741.000 | | 28.408.174.000 | | 23.682.030.000 | | 76.157.945.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Rasio konektivitas provinsi * | Angka | 0,299 | 0,385 | 24.067.741.000 | 0,423 | 28.408.174.000 | 0,457 | 23.682.030.000 | 0,457 | 76.157.945.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ) ** | | | | | 22.413.641.000 | | 25.284.074.000 | | 20.557.930.000 | | 68.255.645.000 | | |
| | | | | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis ** | Angka | 0,47 | 0,5 | 830.000.000 | 0,52 | 230.000.000 | 0,55 | 230.000.000 | 0,55 | 1.290.000.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | 2.15.02.1.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi *** | | | | | 830.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 1.290.000.000 | | |
| | | | | Rasio implementasi dokumen RIJLLAJ *** | Angka | 0,44 | 0,47 | 830.000.000 | 0,5 | 230.000.000 | 0,53 | 230.000.000 | 0,53 | 1.290.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI | |
| | | 2.15.02.1.01.0007 | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **** | | | | | 830.000.000 | | 230.000.000 | | 230.000.000 | | 1.290.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi **** | Laporan | | 2 | 830.000.000 | 2 | 230.000.000 | 2 | 230.000.000 | 6 | 1.290.000.000 | SEKSI PERENCANAAN TRANSPORTASI | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian; JAWA TENGAH |
| | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ** | Angka | 0,19 | 0,2 | 1.100.000.000 | 0,21 | 900.000.000 | 0,22 | 900.000.000 | 0,22 | 2.900.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | | 1.100.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 2.900.000.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A *** | Angka | 0,06 | 0,25 | 1.100.000.000 | 0,5 | 900.000.000 | 0,75 | 900.000.000 | 0,75 | 2.900.000.000 | SEKSI ANGGUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | | 1.100.000.000 | | 900.000.000 | | 900.000.000 | | 2.900.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | | 10 | 1.100.000.000 | 9 | 900.000.000 | 9 | 900.000.000 | 9 | 2.900.000.000 | SEKSI ANGGUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A; BOYOLALI; KARANGANYAR; KLATEN; KOTA SURAKARTA; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI |
| | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ** | Angka | 0,01 | 0,01 | 130.000.000 | 0,02 | 130.000.000 | 0,03 | 130.000.000 | 0,03 | 390.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B *** | Angka | 0 | 0,25 | 130.000.000 | 0,5 | 130.000.000 | 0,75 | 130.000.000 | 0,75 | 390.000.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 130.000.000 | | 390.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 130.000.000 | 1 | 390.000.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B; BLORA |
| | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ** | Angka | 0,22 | 0,24 | 220.000.000 | 0,25 | 330.000.000 | 0,26 | 330.000.000 | 0,26 | 880.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | | 220.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 880.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|---|---|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | RPJMD | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A *** | Angka | 0,05 | 0,25 | 220.000.000 | 0,5 | 330.000.000 | 0,75 | 330.000.000 | 0,75 | 880.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | | 220.000.000 | | 330.000.000 | | 330.000.000 | | 880.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | | 2 | 220.000.000 | 3 | 330.000.000 | 3 | 330.000.000 | 3 | 880.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A; DEMAK; PURWOREJO; SEMARANG |
| | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ** | Angka | 0,21 | 0,23 | 220.000.000 | 0,24 | 220.000.000 | 0,25 | 220.000.000 | 0,25 | 660.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 660.000.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A *** | Angka | 0,05 | 0,25 | 220.000.000 | 0,5 | 220.000.000 | 0,75 | 220.000.000 | 0,75 | 660.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 660.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 660.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A; KOTA MAGELANG; MAGELANG; PURWOREJO; TEMANGGUNG; WONOSOBO |
| | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ** | Angka | 0,2 | 0,21 | 580.000.000 | 0,22 | 380.000.000 | 0,23 | 380.000.000 | 0,23 | 1.340.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | | 580.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 1.340.000.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A *** | Angka | 0 | 0,25 | 580.000.000 | 0,5 | 380.000.000 | 0,75 | 380.000.000 | 0,75 | 1.340.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | | 580.000.000 | | 380.000.000 | | 380.000.000 | | 1.340.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | | 4 | 580.000.000 | 3 | 380.000.000 | 3 | 380.000.000 | 3 | 1.340.000.000 | SEKSI ANGKUTAN | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A; BATANG; BREBES; PEKALONGAN; PEMALANG; TEGAL |
| | | | | Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ** | Angka | 0,16 | 0,17 | 220.000.000 | 0,18 | 220.000.000 | 0,19 | 220.000.000 | 0,19 | 660.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 660.000.000 | | |
| | | | | Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B *** | Angka | 0 | 0,25 | 220.000.000 | 0,5 | 220.000.000 | 0,75 | 220.000.000 | 0,75 | 660.000.000 | KEPALA BALAI | |
| | | 2.15.02.1.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 220.000.000 | | 660.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara **** | Unit | | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 220.000.000 | 2 | 660.000.000 | KEPALA BALAI | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B; BANJARNEGARA; BANYUMAS; CILACAP; KEBUMEN; PURBALINGGA |
| | | | | Rasio konektivitas perkotaan ** | Angka | 0,389 | 0,494 | 3.189.118.000 | 0,519 | 6.200.000.000 | 0,532 | 3.000.000.000 | 0,532 | 12.389.118.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | 2.15.02.1.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi *** | | | | | 3.189.118.000 | | 6.200.000.000 | | 3.000.000.000 | | 12.389.118.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi *** | Angka | 0,53 | 0,652 | 3.189.118.000 | 0,743 | 6.200.000.000 | 0,79 | 3.000.000.000 | 0,79 | 12.389.118.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | |
| | | 2.15.02.1.02.0002 | Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi **** | | | | | 3.189.118.000 | | 6.200.000.000 | | 3.000.000.000 | | 12.389.118.000 | | |
| | | | | Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia **** | Unit | | 28 | 3.189.118.000 | 49 | 6.200.000.000 | 25 | 3.000.000.000 | 102 | 12.389.118.000 | SEKSI SARANA DAN PRASARANA | Balai Transportasi Jawa Tengah; BANYUMAS; GROBOGAN; KENDAL; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; MAGELANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI |
| | | | | Rasio pemanfaatan terminal ** | Angka | 0,20 | 0,218 | 14.802.323.000 | 0,229 | 15.940.974.000 | 0,24 | 14.521.850.000 | 0,24 | 45.265.147.000 | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian | |
| | | 2.15.02.1.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B *** | | | | | 14.802.323.000 | | 15.940.974.000 | | 14.521.850.000 | | 45.265.147.000 | | |
| | | | | Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik *** | Angka | 0,33 | 0,37 | 14.802.323.000 | 0,41 | 15.940.974.000 | 0,44 | 14.521.850.000 | 0,44 | 45.265.147.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | |
| | | 2.15.02.1.03.0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **** | | | | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 210.000.000 | | 630.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B **** | Dokumen | | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 2 | 210.000.000 | 6 | 630.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian; BLOA; KOTA SEMARANG; PEKALONGAN; SUKOHARJO; TEMANGGUNG; WONOGIRI |
| | | 2.15.02.1.03.0007 | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | | | | | 3.650.000.000 | | 5.650.000.000 | | 3.650.000.000 | | 12.950.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) **** | Unit | | 2 | 3.650.000.000 | 2 | 5.650.000.000 | 2 | 3.650.000.000 | 6 | 12.950.000.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | BATANG; Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian; BLOA; GROBOGAN; PEKALONGAN; SUKOHARJO; WONOGIRI |
| | | 2.15.02.1.03.0010 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang **** | | | | | 10.942.323.000 | | 10.080.974.000 | | 10.661.850.000 | | 31.685.147.000 | | |
| | | | | Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun **** | Unit | | 1 | 10.942.323.000 | 1 | 10.080.974.000 | 1 | 10.661.850.000 | 1 | 31.685.147.000 | SEKSI TERMINAL ANGKUTAN JALAN | Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian; KELURAHAN KUTOARJO, KUTOARJO, PURWOREJO |
| | | | | Rasio trayek angkutan jalan ** | Angka | 0,30 | 0,51 | 1.122.200.000 | 0,56 | 733.100.000 | 0,58 | 626.080.000 | 0,58 | 2.481.380.000 | Bidang Angkutan Jalan | |
| | | 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 114.240.000 | | 130.620.000 | | 130.620.000 | | 375.480.000 | | |
| | | | | Rasio angkutan barang yang berijin *** | Angka | 0,25 | 0,3 | 114.240.000 | 0,32 | 130.620.000 | 0,35 | 130.620.000 | 0,35 | 375.480.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 114.240.000 | | 130.620.000 | | 130.620.000 | | 375.480.000 | | |
| | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** | Unit | | 216 | 114.240.000 | 216 | 130.620.000 | 216 | 130.620.000 | 648 | 375.480.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | Bidang Angkutan Jalan; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.09 | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 431.790.000 | | 226.790.000 | | 121.790.000 | | 780.370.000 | | |
| | | | | Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi *** | Angka | 0,57 | 0,71 | 431.790.000 | 0,86 | 226.790.000 | 0,86 | 121.790.000 | 0,86 | 780.370.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|--|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2.15.02.1.09.0001 | Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **** | | | | | 310.000.000 | | 105.000.000 | | - | | 415.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi **** | Dokumen | | 1 | 310.000.000 | 1 | 105.000.000 | 0 | - | 2 | 415.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | Bidang Angkutan Jalan; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.02.1.09.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi **** | | | | | 121.790.000 | | 121.790.000 | | 121.790.000 | | 365.370.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi **** | Dokumen | | 7 | 121.790.000 | 7 | 121.790.000 | 7 | 121.790.000 | 21 | 365.370.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | BANYUMAS; Bidang Angkutan Jalan; GROBOGAN; KENDAL; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; MAGELANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; SEMARANG; SRAGEN; WONOGIRI |
| | | 2.15.02.1.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 205.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 405.000.000 | | |
| | | | | Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan *** | Angka | 0 | 0,04 | 205.000.000 | 0,09 | 100.000.000 | 0,13 | 100.000.000 | 0,13 | 405.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.11.0001 | Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** | | | | | 105.000.000 | | - | | - | | 105.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | | 1 | 105.000.000 | 0 | - | 0 | - | 1 | 105.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | BANYUMAS; Bidang Angkutan Jalan; BLORA; DEMAK; JAWA TENGAH; KENDAL; MAGELANG; SEMARANG; SRAGEN; TEGAL |
| | | 2.15.02.1.11.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi **** | Dokumen | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SEKSI ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN DAN PERBATASAN | |
| | | 2.15.02.1.13 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 160.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 280.000.000 | | |
| | | | | Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin *** | Angka | 0,54 | 0,55 | 160.000.000 | 0,62 | 60.000.000 | 0,66 | 60.000.000 | 0,66 | 280.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.13.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **** | | | | | 160.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 280.000.000 | | |
| | | | | Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan **** | Unit | | 22 | 160.000.000 | 464 | 60.000.000 | 256 | 60.000.000 | 742 | 280.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | Bidang Angkutan Jalan; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|---|---------|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|--|---|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 2.15.02.1.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 61.170.000 | | 65.690.000 | | 63.670.000 | | 190.530.000 | | |
| | | | | Rasio angkutan taksi terpenuhi *** | Angka | 0,42 | 0,43 | 61.170.000 | 0,44 | 65.690.000 | 0,45 | 63.670.000 | 0,45 | 190.530.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.14.0004 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **** | | | | | 61.170.000 | | 65.690.000 | | 63.670.000 | | 190.530.000 | | |
| | | | | Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan **** | Unit | | | 76 | | 65.690.000 | 76 | 63.670.000 | 228 | 190.530.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK | Bidang Angkutan Jalan; JAWA TENGAH; JEPARA; KOTA SEMARANG; SRAGEN |
| | | 2.15.02.1.15 | Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | Rasio trayek yang ditetapkan pemukhtahiran tarif *** | Angka | 0 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 450.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | |
| | | 2.15.02.1.15.0003 | Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** | Laporan | | | 1 | | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 | 3 | 450.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | Bidang Angkutan Jalan; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN ** | | | | | 1.654.100.000 | | 3.124.100.000 | | 3.124.100.000 | | 7.902.300.000 | | |
| | | | | Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP ** | Angka | 0,23 | 0,31 | 1.654.100.000 | 0,38 | 3.124.100.000 | 0,45 | 3.124.100.000 | 0,45 | 7.902.300.000 | Bidang Pelayaran | |
| | | 2.15.03.1.03 | Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan *** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya *** | Angka | 0,1 | 0,2 | 200.000.000 | 0,4 | 200.000.000 | 0,6 | 200.000.000 | 0,6 | 600.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | |
| | | 2.15.03.1.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izingangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 600.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------|---|--|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan **** | Unit | | 2 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 4 | 200.000.000 | 10 | 600.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | BATANG; Bidang Pelayaran; BREBES; KENDAL; KOTA TEGAL |
| | | 2.15.03.1.06 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas *** | | | | | 395.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 1.025.000.000 | | |
| | | | | Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin *** | Angka | 0,1 | 0,12 | 395.000.000 | 0,13 | 315.000.000 | 0,15 | 315.000.000 | 0,15 | 1.025.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | |
| | | 2.15.03.1.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **** | | | | | 395.000.000 | | 315.000.000 | | 315.000.000 | | 1.025.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO : **** | Dokumen | | 8 | 395.000.000 | 10 | 315.000.000 | 12 | 315.000.000 | 30 | 1.025.000.000 | SEKSI ANGKUTAN LAUT | Bidang Pelayaran; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03.1.09 | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional *** | | | | | 209.100.000 | | 1.359.100.000 | | 1.359.100.000 | | 2.927.300.000 | | |
| | | | | Berth occupancy ratio *** | Angka | 0,42 | 0,44 | 209.100.000 | 0,45 | 1.359.100.000 | 0,46 | 1.359.100.000 | 0,46 | 2.927.300.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | |
| | | 2.15.03.1.09.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional **** | | | | | 209.100.000 | | 209.100.000 | | 209.100.000 | | 627.300.000 | | |
| | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan **** | Unit | | 8 | 209.100.000 | 8 | 209.100.000 | 8 | 209.100.000 | 8 | 627.300.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | Bidang Pelayaran; JAWA TENGAH |
| | | 2.15.03.1.09.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional **** | | | | | - | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | 2.300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara **** | Unit | | 0 | - | 3 | 1.150.000.000 | 3 | 1.150.000.000 | 3 | 2.300.000.000 | SEKSI KEPELABUHANAN | Bidang Pelayaran; JEPARA |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--|--|---|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | 2.15.03.1.10 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 850.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 3.350.000.000 | | | |
| | | | | Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi *** | Angka | 0,28 | 0,48 | 850.000.000 | 0,53 | 1.250.000.000 | 0,58 | 1.250.000.000 | 0,58 | 3.350.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | |
| | | 2.15.03.1.10.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 250.000.000 | | 750.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan **** | Laporan | | | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 2 | 250.000.000 | 6 | 750.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | BATANG; Bidang Pelayaran; BREBES; SUKOHARJO |
| | | 2.15.03.1.10.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 300.000.000 | | 700.000.000 | | 700.000.000 | | 1.700.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun **** | Unit | | | 1 | 300.000.000 | 1 | 700.000.000 | 1 | 700.000.000 | 3 | 1.700.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | BATANG; Bidang Pelayaran; SUKOHARJO |
| | | 2.15.03.1.10.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 300.000.000 | | 900.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan **** | Unit | | | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 3 | 900.000.000 | SEKSI LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | Bidang Pelayaran; JAWA TENGAH |
| | | | | | | | | 120.566.742.000 | | 123.264.885.000 | | 132.388.385.000 | | 376.220.012.000 | Dinas Perhubungan | | |
| | | | | On Time Performance layanan transportasi * | % | 82,21 | 83,21 | 120.566.742.000 | 85,05 | 123.264.885.000 | 86,88 | 132.388.385.000 | 86,88 | 376.220.012.000 | Dinas Perhubungan | | |
| | | 2.15.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) ** | | | | | 120.566.742.000 | | 123.264.885.000 | | 132.388.385.000 | | 376.220.012.000 | | | |
| | | | | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum ** | % | 61,62 | 65,38 | 1.200.000.000 | 67,34 | 1.200.000.000 | 69,36 | 1.200.000.000 | 69,36 | 3.600.000.000 | Bidang Angkutan Jalan | | |
| | | 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 3.600.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani *** | Orang | 25463667 | 3E+07 | 1.200.000.000 | 3E+07 | 1.200.000.000 | 3E+07 | 1.200.000.000 | 3E+07 | 3.600.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | | |
| | | 2.15.02.1.08.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **** | | | | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 1.200.000.000 | | 3.600.000.000 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi **** | Laporan | | | 3 | 1.200.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | 3 | 1.200.000.000 | 9 | 3.600.000.000 | SEKSI ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | Bidang Angkutan Jalan; JAWA TENGAH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---|--|-------------------|---|---|---------|---|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Persentase perpindahan moda angkutan umum ** | % | 48,16 | 51 | 119.366.742.000 | 53 | 122.064.885.000 | 55 | 131.188.385.000 | 55 | 372.620.012.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | 2.15.02.1.08 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi *** | | | | | 119.366.742.000 | | 122.064.885.000 | | 131.188.385.000 | | 372.620.012.000 | | |
| | | | | Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan *** | Orang | 6506462 | 7E+06 | 119.366.742.000 | 7E+06 | 122.064.885.000 | 7E+06 | 131.188.385.000 | 7E+06 | 372.620.012.000 | SEKSI OPERASIONAL | |
| | | 2.15.02.1.08.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **** | | | | | 119.366.742.000 | | 122.064.885.000 | | 131.188.385.000 | | 372.620.012.000 | | |
| | | | | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi **** | Unit | | 112 | 119.366.742.000 | 109 | 122.064.885.000 | 109 | 131.188.385.000 | 109 | 372.620.012.000 | SEKSI OPERASIONAL | Balai Transportasi Jawa Tengah; BANYUMAS; GROBOGAN; KENDAL; KOTA SEMARANG; KOTA SURAKARTA; MAGELANG; PURBALINGGA; PURWOREJO; SEMARANG; SRAGEN; SUKOHARJO; WONOGIRI |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah | | | | | | | | 73.068.425.000 | | 73.945.197.000 | | 74.870.168.000 | | 221.883.790.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | NA | 78,28 | | 78,48 | | 78,68 | | 78,68 | | Dinas Perhubungan | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah * | | | | | | | 72.666.825.000 | | 73.465.146.000 | | 74.366.146.000 | | 220.498.117.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat * | Angka | 79,75 | 80,25 | 72.666.825.000 | 80,5 | 73.465.146.000 | 80,75 | 74.366.146.000 | 80,75 | 220.498.117.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 72.666.825.000 | | 73.465.146.000 | | 74.366.146.000 | | 220.498.117.000 | | |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) ** | % | 100 | 100 | 293.200.000 | 100 | 293.200.000 | 100 | 293.200.000 | 100 | 879.600.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 113.000.000 | | 113.000.000 | | 113.000.000 | | 339.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 113.000.000 | 100 | 113.000.000 | 100 | 113.000.000 | 100 | 339.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 44.500.000 | | 44.500.000 | | 44.500.000 | | 133.500.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 44.500.000 | 1 | 44.500.000 | 1 | 44.500.000 | 3 | 133.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 12.000.000 | | 36.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 3 | 36.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 11.000.000 | | 11.000.000 | | 11.000.000 | | 33.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.000.000 | 1 | 11.000.000 | 3 | 33.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 5.500.000 | | 16.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.500.000 | 3 | 16.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 3 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 129.600.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 36 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 43.200.000 | | 129.600.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 12 | 43.200.000 | 36 | 129.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 110.000.000 | | 330.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 21 | 21 | 110.000.000 | 21 | 110.000.000 | 21 | 110.000.000 | 63 | 330.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 60 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SURAKARTA; OPD Provinsi |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) ** | % | 100 | 100 | 202.112.000 | 100 | 202.112.000 | 100 | 202.112.000 | 100 | 606.336.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|------------|--------|------------|--------|------------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | | | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 5 | 2.000.000 | 5 | 2.000.000 | 5 | 2.000.000 | 15 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 67.112.000 | | 67.112.000 | | 67.112.000 | | 201.336.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 67.112.000 | 100 | 67.112.000 | 100 | 67.112.000 | 100 | 201.336.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 35.500.000 | | 35.500.000 | | 35.500.000 | | 106.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 35.500.000 | 1 | 35.500.000 | 1 | 35.500.000 | 3 | 106.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 5.612.000 | | 5.612.000 | | 5.612.000 | | 16.836.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 5.612.000 | 1 | 5.612.000 | 1 | 5.612.000 | 3 | 16.836.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 21.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 12 | 7.000.000 | 36 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 21.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|--|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 101.000.000 | | 101.000.000 | | 101.000.000 | | 303.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 2 | 2 | 101.000.000 | 2 | 101.000.000 | 2 | 101.000.000 | 6 | 303.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | OPD Provinsi; PATI |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) ** | % | 100 | 100 | 230.840.000 | 100 | 230.840.000 | 100 | 230.840.000 | 100 | 692.520.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 77.840.000 | | 77.840.000 | | 77.840.000 | | 233.520.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 77.840.000 | 100 | 77.840.000 | 100 | 77.840.000 | 100 | 233.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 112.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 3 | 112.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|---|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 9.840.000 | | 9.840.000 | | 9.840.000 | | 29.520.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 9.840.000 | 1 | 9.840.000 | 1 | 9.840.000 | 3 | 29.520.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 66.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 24 | 24 | 22.000.000 | 24 | 22.000.000 | 24 | 22.000.000 | 72 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 312.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 11 | 11 | 104.000.000 | 11 | 104.000.000 | 11 | 104.000.000 | 33 | 312.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 10 | 4.000.000 | 10 | 4.000.000 | 10 | 4.000.000 | 30 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) ** | % | 100 | 100 | 238.200.000 | 100 | 238.200.000 | 100 | 238.200.000 | 100 | 714.600.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 82.200.000 | | 82.200.000 | | 82.200.000 | | 246.600.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 82.200.000 | 100 | 82.200.000 | 100 | 82.200.000 | 100 | 246.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 37.500.000 | | 112.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 1 | 37.500.000 | 3 | 112.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 14.200.000 | | 14.200.000 | | 14.200.000 | | 42.600.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 14.200.000 | 1 | 14.200.000 | 1 | 14.200.000 | 3 | 42.600.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 104.000.000 | | 312.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 8 | 8 | 104.000.000 | 8 | 104.000.000 | 8 | 104.000.000 | 24 | 312.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 7 | 4.000.000 | 7 | 4.000.000 | 7 | 4.000.000 | 21 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA MAGELANG; OPD Provinsi |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) ** | % | 100 | 100 | 257.900.000 | 100 | 257.900.000 | 100 | 257.900.000 | 100 | 773.700.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 98.500.000 | | 98.500.000 | | 98.500.000 | | 295.500.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 98.500.000 | 100 | 98.500.000 | 100 | 98.500.000 | 100 | 295.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 38.500.000 | | 115.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 38.500.000 | 1 | 38.500.000 | 1 | 38.500.000 | 3 | 115.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 18.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 22.000.000 | | 66.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 3 | 66.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 27.400.000 | | 27.400.000 | | 27.400.000 | | 82.200.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 24 | 24 | 27.400.000 | 24 | 27.400.000 | 24 | 27.400.000 | 72 | 82.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 1.000.000 | | 3.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.000.000 | 36 | 3.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | 26.400.000 | | 79.200.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 26.400.000 | 12 | 26.400.000 | 12 | 26.400.000 | 36 | 79.200.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 315.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 16 | 16 | 105.000.000 | 16 | 105.000.000 | 16 | 105.000.000 | 48 | 315.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 45 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA PEKALONGAN; OPD Provinsi |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) ** | % | 100 | 100 | 224.000.000 | 100 | 224.000.000 | 100 | 224.000.000 | 100 | 672.000.000 | Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 79.000.000 | | 79.000.000 | | 79.000.000 | | 237.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|-------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 79.000.000 | 100 | 79.000.000 | 100 | 79.000.000 | 100 | 237.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 36.500.000 | | 36.500.000 | | 36.500.000 | | 109.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 36.500.000 | 1 | 36.500.000 | 1 | 36.500.000 | 3 | 109.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 3 | 12.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 1.500.000 | | 4.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 3 | 4.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 14.000.000 | | 42.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 14.000.000 | 1 | 14.000.000 | 1 | 14.000.000 | 3 | 42.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 12 | 20.000.000 | 36 | 60.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 15.000.000 | | 45.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 24 | 24 | 15.000.000 | 24 | 15.000.000 | 24 | 15.000.000 | 72 | 45.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 10.000.000 | | 30.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 36 | 30.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 103.000.000 | | 103.000.000 | | 103.000.000 | | 309.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 9 | 9 | 103.000.000 | 9 | 103.000.000 | 9 | 103.000.000 | 27 | 309.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 9.000.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 8 | 3.000.000 | 24 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | BANYUMAS; OPD Provinsi |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) ** | % | 100 | 100 | 369.500.000 | 100 | 369.500.000 | 100 | 369.500.000 | 100 | 1.108.500.000 | Balai Transportasi Jawa Tengah | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 3 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 6.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 12 | 2.000.000 | 36 | 6.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 51.500.000 | | 51.500.000 | | 51.500.000 | | 154.500.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 51.500.000 | 100 | 51.500.000 | 100 | 51.500.000 | 100 | 154.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 7.000.000 | | 21.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 3 | 21.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 18.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 3 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 10.500.000 | | 31.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 1 | 10.500.000 | 3 | 31.500.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 3.000.000 | | 9.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3 | 9.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 25.000.000 | | 75.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 12 | 25.000.000 | 36 | 75.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 36 | 15.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 306.000.000 | | 306.000.000 | | 306.000.000 | | 918.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 7 | 7 | 306.000.000 | 7 | 306.000.000 | 7 | 306.000.000 | 21 | 918.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | |
| | | X.XX.01.1.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara **** | Unit | | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 3 | 300.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 18.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 5 | 6.000.000 | 5 | 6.000.000 | 5 | 6.000.000 | 15 | 18.000.000 | SUB BAGIAN TATA USAHA | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | | | Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) ** | % | 100 | 100 | 70.851.073.000 | 100 | 71.649.394.000 | 100 | 72.550.394.000 | 100 | 215.050.861.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah *** | | | | | 48.551.651.000 | | 49.672.472.000 | | 49.738.472.000 | | 147.962.595.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun *** | Dokumen | 2 | 2 | 48.551.651.000 | 2 | 49.672.472.000 | 2 | 49.738.472.000 | 6 | 147.962.595.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | |
| | | X.XX.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **** | | | | | 47.531.451.000 | | 48.652.272.000 | | 48.718.272.000 | | 144.901.995.000 | | |
| | | | | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN **** | Orang | | 300 | 47.531.451.000 | 300 | 48.652.272.000 | 300 | 48.718.272.000 | 300 | 144.901.995.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **** | | | | | 820.200.000 | | 820.200.000 | | 820.200.000 | | 2.460.600.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN **** | Dokumen | | 12 | 820.200.000 | 12 | 820.200.000 | 12 | 820.200.000 | 36 | 2.460.600.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 12 | 200.000.000 | 36 | 600.000.000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *** | | | | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 5.691.648.000 | | |
| | | | | Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *** | Dokumen | 1 | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 3 | 5.691.648.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **** | | | | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 1.897.216.000 | | 5.691.648.000 | | |
| | | | | Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah **** | Dokumen | | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 1 | 1.897.216.000 | 3 | 5.691.648.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|---------|---|--|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | X.XX.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah *** | | | | | 592.500.000 | | 670.000.000 | | 305.000.000 | | 1.567.500.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan *** | % | 100 | 100 | 592.500.000 | 100 | 670.000.000 | 100 | 305.000.000 | 100 | 1.567.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya **** | | | | | 422.500.000 | | 500.000.000 | | 135.000.000 | | 1.057.500.000 | | |
| | | | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan **** | Paket | | 1 | 422.500.000 | 1 | 500.000.000 | 1 | 135.000.000 | 3 | 1.057.500.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian **** | Dokumen | | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan **** | Orang | | 150 | 150.000.000 | 150 | 150.000.000 | 150 | 150.000.000 | 450 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah *** | | | | | 2.188.000.000 | | 2.188.000.000 | | 2.188.000.000 | | 6.564.000.000 | | |
| | | | | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan *** | % | 100 | 100 | 2.188.000.000 | 100 | 2.188.000.000 | 100 | 2.188.000.000 | 100 | 6.564.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **** | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 20.000.000 | | 60.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 3 | 60.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **** | | | | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | 88.000.000 | | 264.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 88.000.000 | 1 | 88.000.000 | 1 | 88.000.000 | 3 | 264.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | OPD Provinsi; SEMARANG |
| | | X.XX.01.1.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan **** | Paket | | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 3 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor **** | | | | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 600.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan **** | Paket | | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 3 | 600.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **** | | | | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 165.000.000 | | 495.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan **** | Paket | | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 1 | 165.000.000 | 3 | 495.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan **** | | | | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 5.000.000 | | 15.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan **** | Dokumen | | 40 | 5.000.000 | 40 | 5.000.000 | 40 | 5.000.000 | 120 | 15.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu **** | Laporan | | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 12 | 100.000.000 | 36 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **** | | | | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 1.500.000.000 | | 4.500.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah **** | Laporan | | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 12 | 1.500.000.000 | 36 | 4.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|--|---------|---|--|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | X.XX.01.1.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **** | | | | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 60.000.000 | | 180.000.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah **** | Dokumen | | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 12 | 60.000.000 | 36 | 180.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | | | | | 2.705.000.000 | | 2.305.000.000 | | 3.505.000.000 | | 8.515.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *** | Unit | | 46 | 2.705.000.000 | 35 | 2.305.000.000 | 30 | 3.505.000.000 | 111 | 8.515.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | | 2.300.000.000 | | 2.000.000.000 | | 3.200.000.000 | | 7.500.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan **** | Unit | | 2 | 2.300.000.000 | 1 | 2.000.000.000 | 3 | 3.200.000.000 | 6 | 7.500.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel **** | | | | | 300.000.000 | | 200.000.000 | | 200.000.000 | | 700.000.000 | | |
| | | | | Jumlah paket mebel yang disediakan **** | Paket | | 20 | 300.000.000 | 20 | 200.000.000 | 20 | 200.000.000 | 60 | 700.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| | | | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan **** | Unit | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 105.000.000 | | 315.000.000 | | |
| | | | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan **** | Unit | | 10 | 105.000.000 | 10 | 105.000.000 | 10 | 105.000.000 | 30 | 315.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 13.129.306.000 | | 13.129.306.000 | | 13.129.306.000 | | 39.387.918.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun *** | Laporan | 36 | 36 | 13.129.306.000 | 36 | 13.129.306.000 | 36 | 13.129.306.000 | 108 | 39.387.918.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat **** | | | | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | 12.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat **** | Laporan | | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 12 | 4.000.000 | 36 | 12.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **** | | | | | 1.811.000.000 | | 1.811.000.000 | | 1.811.000.000 | | 5.433.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 1.811.000.000 | 12 | 1.811.000.000 | 12 | 1.811.000.000 | 36 | 5.433.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **** | | | | | 11.314.306.000 | | 11.314.306.000 | | 11.314.306.000 | | 33.942.918.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan **** | Laporan | | 12 | 11.314.306.000 | 12 | 11.314.306.000 | 12 | 11.314.306.000 | 36 | 33.942.918.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah *** | | | | | 1.787.400.000 | | 1.787.400.000 | | 1.787.400.000 | | 5.362.200.000 | | |
| | | | | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *** | Unit | 49 | 286 | 1.787.400.000 | 286 | 1.787.400.000 | 286 | 1.787.400.000 | 858 | 5.362.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | |
| | | X.XX.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **** | | | | | 687.400.000 | | 687.400.000 | | 687.400.000 | | 2.062.200.000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2022) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD | | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|--------|---|-------------------|---|---|---------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Target | Rp | | |
| | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya **** | Unit | | 73 | 687.400.000 | 73 | 687.400.000 | 73 | 687.400.000 | 219 | 2.062.200.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **** | | | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 50.000.000 | | 150.000.000 | | |
| | | | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara **** | Unit | | 24 | 50.000.000 | 24 | 50.000.000 | 24 | 50.000.000 | 72 | 150.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **** | | | | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 800.000.000 | | 2.400.000.000 | | |
| | | | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 4 | 800.000.000 | 4 | 800.000.000 | 4 | 800.000.000 | 12 | 2.400.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 92 | 100.000.000 | 92 | 100.000.000 | 92 | 100.000.000 | 276 | 300.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **** | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 150.000.000 | | 450.000.000 | | |
| | | | | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi **** | Unit | | 93 | 150.000.000 | 93 | 150.000.000 | 93 | 150.000.000 | 279 | 450.000.000 | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | JAWA TENGAH; OPD Provinsi |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah * | | | | | | | 401.600.000 | | 480.051.000 | | 504.022.000 | | 1.385.673.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | | | Indeks Manajemen Risiko * | Angka | 3,2 | 3,2 | 401.600.000 | 3,3 | 480.051.000 | 3,4 | 504.022.000 | 3,4 | 1.385.673.000 | Dinas Perhubungan | |
| | | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ** | | | | | 401.600.000 | | 480.051.000 | | 504.022.000 | | 1.385.673.000 | | |
| | | | | Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah ** | % | 100 | 100 | 401.600.000 | 100 | 480.051.000 | 100 | 504.022.000 | 100 | 1.385.673.000 | SEKRETARIAT | |
| | | X.XX.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *** | | | | | 401.600.000 | | 480.051.000 | | 504.022.000 | | 1.385.673.000 | | |
| | | | | Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan *** | % | 100 | 100 | 401.600.000 | 100 | 480.051.000 | 100 | 504.022.000 | 100 | 1.385.673.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | |
| | | X.XX.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **** | | | | | 301.600.000 | | 380.051.000 | | 404.022.000 | | 1.085.673.000 | | |
| | | | | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah **** | Dokumen | | 9 | 301.600.000 | 9 | 380.051.000 | 9 | 404.022.000 | 27 | 1.085.673.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |
| | | X.XX.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **** | | | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 300.000.000 | | |
| | | | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah **** | Laporan | | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 4 | 100.000.000 | 12 | 300.000.000 | SUB BAGIAN PROGRAM | KOTA SEMARANG; OPD Provinsi |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merujuk pada indikator kinerja tujuan dan /atau sasaran yang telah tertuang dalam Bab IV serta indikator program pada Bab VI. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks pelayanan transportasi, Rasio konektivitas provinsi, Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan dan *On Time Performance* layanan transportasi.

Secara lengkap Indikator Kinerja Utama, target dan capaian Tahun 2021 dan 2022, serta target capaian Tahun 2024 sampai dengan 2026 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel VII.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

| No | Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|----------------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Indeks pelayanan transportasi | NA | 5,767 | 6,066 | 6,308 | 6,532 | 6,532 |
| 2 | Rasio konektivitas provinsi | 0,250 | 0,299 | 0,385 | 0,423 | 0,457 | 0,457 |
| 3 | Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan | 18,442 | 16,906 | 16,067 | 15,238 | 14,480 | 14,480 |
| 4 | <i>On Time Performance</i> layanan transportasi | NA | 82,210 | 83,210 | 85,050 | 86,880 | 86,880 |

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Tabel VII.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|--|--|----------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Sasaran : Meningkatnya konektivitas provinsi | | | | | | | |
| 1. | Rasio Trayek Angkutan Jalan | 0,164 | 0,296 | 0,510 | 0,560 | 0,580 | 0,580 |
| 2. | Rasio Pemanfaatan Terminal | 0,148 | 0,200 | 0,218 | 0,229 | 0,240 | 0,240 |
| 3. | Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis | 0,470 | 0,470 | 0,500 | 0,520 | 0,550 | 0,550 |
| 4. | Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0,150 | 0,220 | 0,240 | 0,250 | 0,260 | 0,260 |
| 5. | Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,030 | 0,030 |
| 6. | Rasio Keterisian Bus Balai pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0,180 | 0,190 | 0,200 | 0,210 | 0,220 | 0,220 |
| 7. | Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0,190 | 0,210 | 0,230 | 0,240 | 0,250 | 0,250 |

| No | Indikator | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|---|--|----------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 8. | Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0,160 | 0,160 | 0,170 | 0,180 | 0,190 | 0,190 |
| 9. | Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0,150 | 0,200 | 0,210 | 0,220 | 0,230 | 0,230 |
| 10. | Rasio Konektivitas Perkotaan | 0,364 | 0,389 | 0,494 | 0,519 | 0,532 | 0,532 |
| 11. | Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP | 0,160 | 0,230 | 0,310 | 0,380 | 0,450 | 0,450 |
| Sasaran : Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah | | | | | | | |
| 12. | Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0,380 | 0,380 | 0,470 | 0,520 | 0,590 | 0,590 |
| 13. | Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 1 | 1 | 0,970 | 0,950 | 0,930 | 0,930 |
| 14. | Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 1 | 1 | 0,970 | 0,940 | 0,920 | 0,920 |

| No | Indikator | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|----------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 15. | Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 1 | 1 | 0,980 | 0,950 | 0,930 | 0,930 |
| 16. | Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 1 | 1 | 0,970 | 0,940 | 0,920 | 0,920 |
| 17. | Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 1 | 1 | 0,980 | 0,950 | 0,930 | 0,930 |
| 18. | Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 1 | 1 | 0,970 | 0,950 | 0,920 | 0,920 |
| 19. | Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah | NA | 0,978 | 0,981 | 0,985 | 0,988 | 0,988 |
| 20. | Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A | 0 | 0,730 | 0,810 | 0,840 | 0,860 | 0,860 |

| No | Indikator | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|----------------------|-------|----------------|-------|-------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 21. | Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B | 0 | 0,730 | 0,810 | 0,840 | 0,870 | 0,870 |
| 22. | Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A | 0 | 0,730 | 0,810 | 0,840 | 0,870 | 0,870 |
| 23. | Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A | 0 | 0,730 | 0,810 | 0,840 | 0,870 | 0,870 |
| 24. | Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B | 0 | 0,730 | 0,810 | 0,840 | 0,870 | 0,870 |
| 25. | Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A | 0 | 0,730 | 0,810 | 0,840 | 0,870 | 0,870 |
| 26. | Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan | 0 | 0 | 0,040 | 0,240 | 0,360 | 0,360 |
| 27. | Rasio pemenuhan Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai | 0 | 0 | 0,200 | 0,400 | 0,600 | 0,600 |

| No | Indikator | Kondisi Awal Kinerja | | Target Capaian | | | Kondisi Akhir |
|---|---|----------------------|--------|----------------|--------|--------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum | | | | | | | |
| 28. | Persentase Perpindahan moda angkutan umum | 46,390 | 48,160 | 51,000 | 53,000 | 55,000 | 55,000 |
| 29. | Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum | 40,520 | 61,620 | 65,380 | 67,340 | 69,360 | 69,360 |

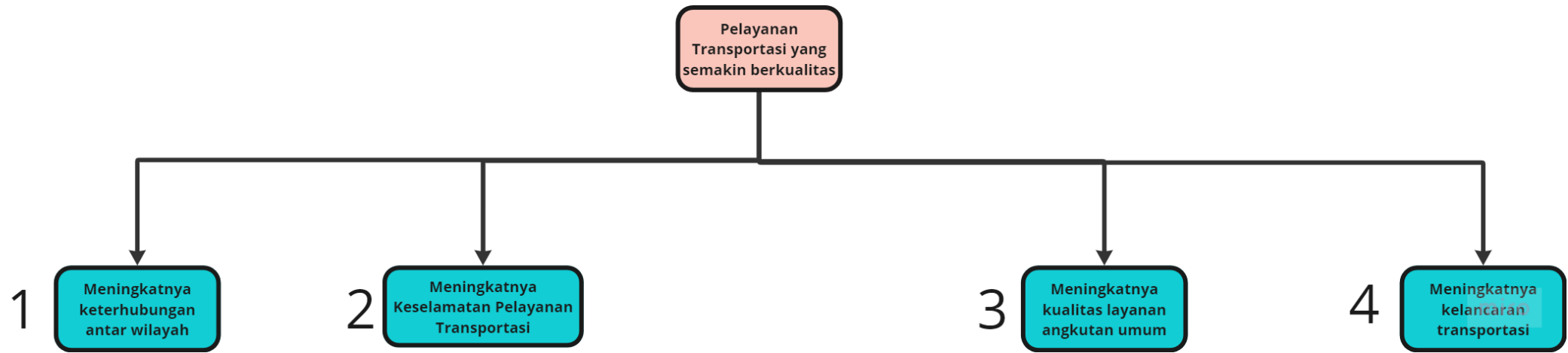
Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

BAB VIII

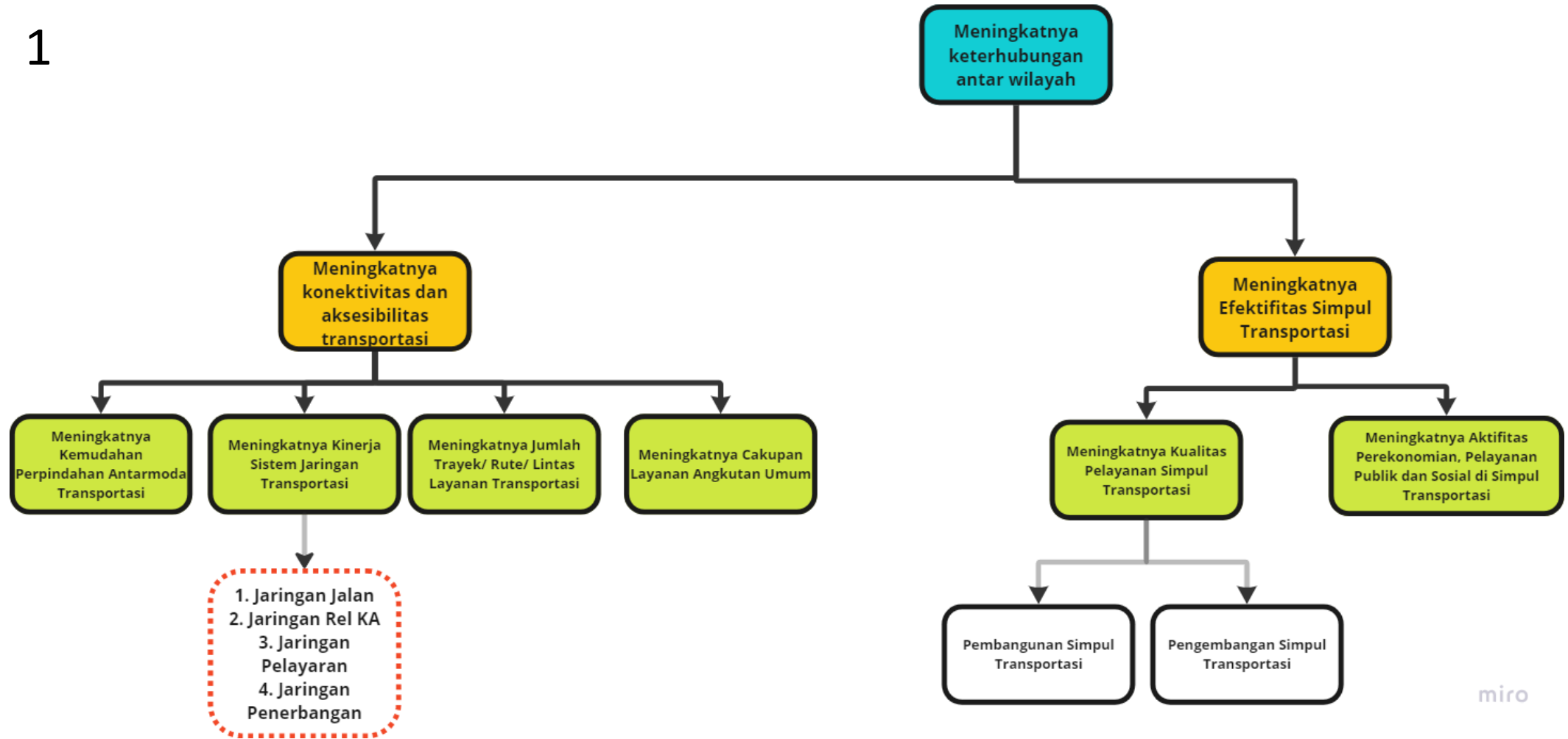
PENUTUP

1. Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, perubahan lingkungan strategis, perubahan kebijakan nasional serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam renstra menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah;
2. Adapun kaidah-kaidah penyusunan renstra adalah :
 - a. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPD Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya disusun rancangan awal RPD Provinsi Jawa Tengah mengacu kepada RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025.
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renstra PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra PD;
 - c. Bappeda melakukan proses finalisasi RPD 2024 – 2026 melalui Forum Musrenbang.
 - d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renstra PD berdasarkan Perubahan RPD 2024 – 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub).
3. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah dijadikan pedoman dalam :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah;
 - c. Penyusunan Rencana Strategis Balai transportasi Jawa Tengah dengan penerapan Badan Layanan Umum Daerah;
 - d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
 - e. Monitoring dan evaluasi pasca penyusunan Renstra.

Lampiran I : Pohon Kinerja Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026




1




Keterangan

 Level Aktivitas yang bukan kewenangan

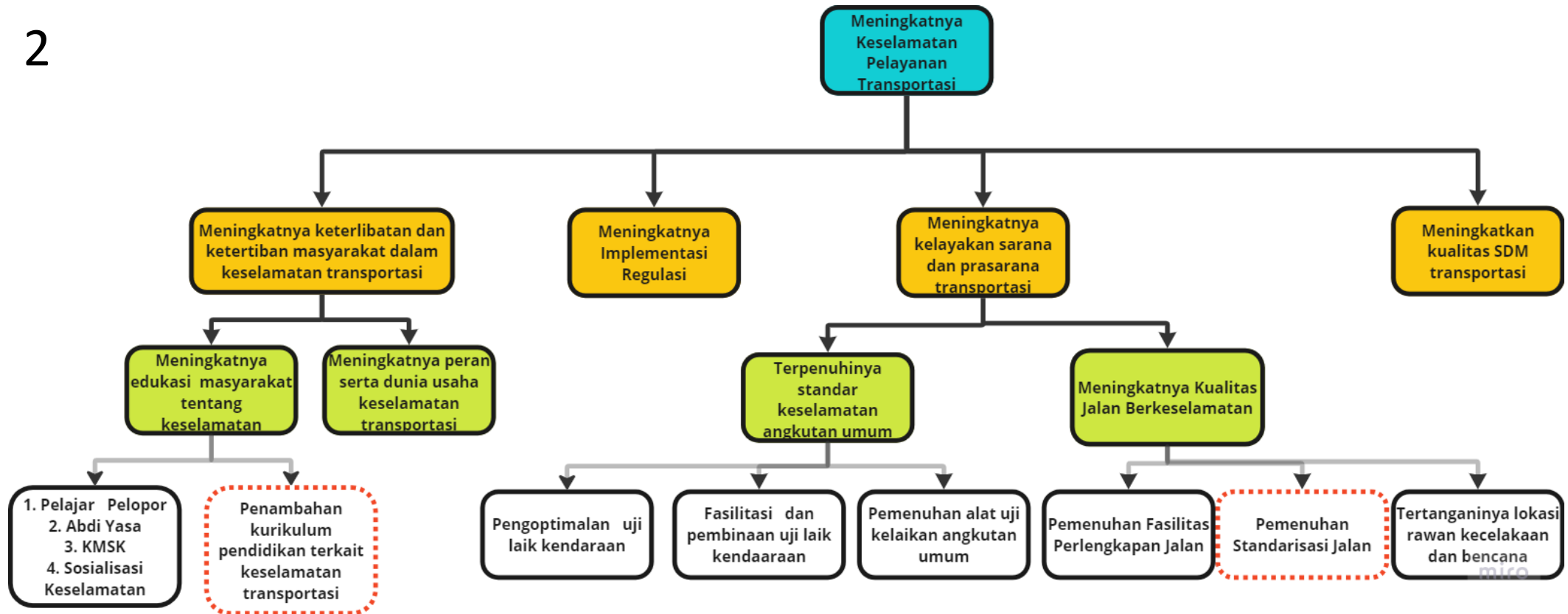
 Level Aktivitas kewenangan

 Garis Bantu Menunjukkan Aktifitas

 Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja

miro

2



Keterangan



Level Aktivitas yang bukan kewenangan



Level Aktivitas kewenangan

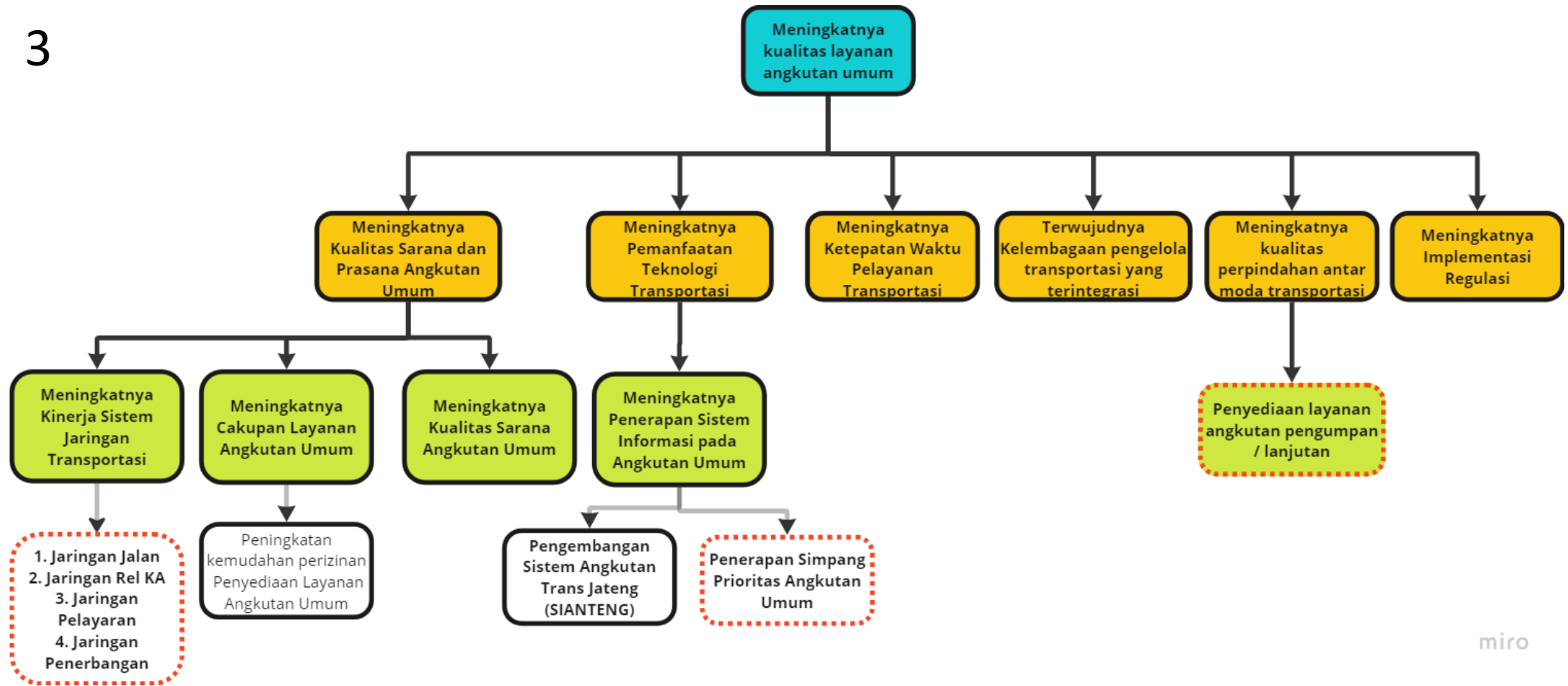


Garis Bantu Menunjukkan Aktifitas



Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja

3

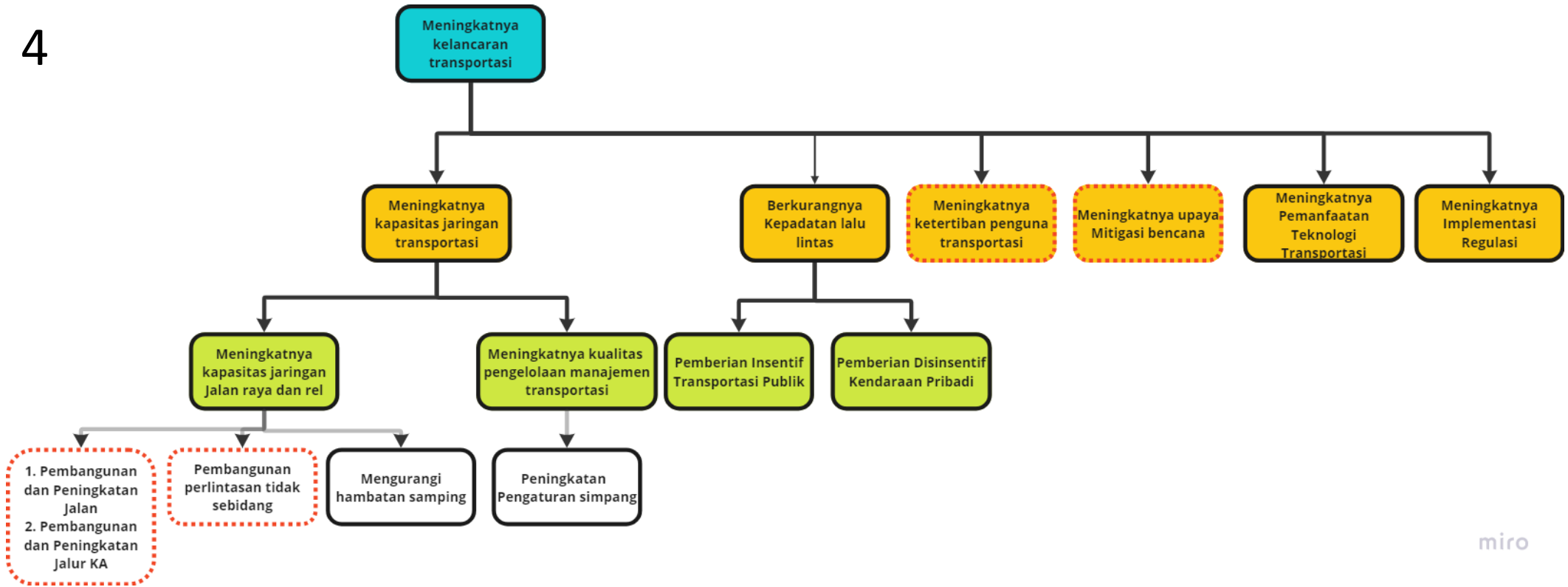


miro

Keterangan

-  Level Aktivitas yang bukan kewenangan
-  Level Aktivitas kewenangan
-  Garis Bantu Menunjukkan Aktifitas
-  Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja

4





miro

Keterangan

 Level Aktivitas yang bukan kewenangan

 Level Aktivitas kewenangan

 Garis Bantu Menunjukkan Aktifitas

 Garis Bantu Menunjukkan Hubungan Kinerja

Lampiran II : Cascading Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

Cascading Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Pada link :

<https://bit.ly/CascadingDishub2426>

Lampiran III : Manajemen Resiko Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2024-2026

Tabel 1. Identifikasi Risiko

| No | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Sebab | Dampak | |
|----|----------------------|---|---|--|--------------------|--|---|--|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sasaran Strategis | Meningkatnya konektivitas Provinsi | Rasio Konektivitas Provinsi | berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP | Risiko Operasional | Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi) | Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa | Masyarakat |
| 2 | Sasaran Strategis | Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan | Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi | Risiko Operasional | 1. Human Error ; 2. Tidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan | Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas | Masyarakat |
| 3 | Sasaran Strategis | Meningkatnya Kualitas layanan angkutan umum | <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi | Kemacetan lalu lintas | Risiko Operasional | Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana) | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat | Masyarakat (pengguna trans jateng) dan Dinas Perhubungan |

| No | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Pernyataan Risiko | Kategori Risiko | Sebab | Dampak | |
|----|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Kerusakan kendaraan saat perjalanan | Risiko Operasional | Belum optimalnya perawatan kendaraan | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat | Masyarakat (pengguna trans jateng) dan Dinas Perhubungan |

Tabel 2. Analisis Risiko

| Pernyataan Risiko | Skala/Nilai Risiko yang Melekat | | | Pengendalian yang Ada | | | Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---|-------------------------|---|--------------|--------------|
| | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko | Ada / Belum Ada | Uraian | Memadai / Belum Memadai | Skala Probabilitas | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP | 3 | 3 | 9 | Belum ada | | Belum memadai | 3 | 3 | 9 |
| Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi | 5 | 3 | 15 | Ada | 1. Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan ; 2. Ramp Check dan Uji berkala kendaraan 3. Pemantauan Kondisi cuaca dan mitigasi bencana; 4. Pemasangan rambu peringatan 5. Pemenuhan Fasilitas keselamatan secara bertahap | Memadai | 4 | 3 | 12 |
| Kemacetan lalu lintas | 2 | 3 | 6 | Ada | Pengalihan rute untuk menghindari titik kemacetan pada event/kejadian tertentu dan Pemeberitahuan kepada pengguna melalui sosial media dan aplikasi SIANTENG | Memadai | 2 | 2 | 4 |
| Kerusakan kendaraan saat perjalanan | 4 | 4 | 16 | Ada | Monitoring berkala kendaraan sebelum keberangkatan | Memadai | 3 | 4 | 12 |

Tabel 3. Daftar Risiko Prioritas

| Risiko Prioritas | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Sebab | Dampak |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 9 | Kepala Dinas Perhubungan | Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi) | Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa |
| 1 | 12 | Kepala Dinas Perhubungan | 1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan | Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas |
| 4 | 4 | Kepala Dinas Perhubungan | Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana) | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat |
| 1 | 12 | Kepala Dinas Perhubungan | Belum optimalnya perawatan kendaraan | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat |

Tabel 4. Rencana Tindak Pengendalian

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Risiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|---|---|--|--------------|--|---|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatnya konektivitas Provinsi | Rasio Konektivitas Provinsi | berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP | 9 | Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi) | Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa | Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |
| Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah | Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan | Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi | 12 | 1. Human Error ; 2. Tidak laik kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan | Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas | Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kecepatan respon penanganan, Sosialisasi call center fasilitas kesehatan, Sosialisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakaan | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |

| Tujuan/Sasaran Strategis PD | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD | Pernyataan Risiko | Skala Risiko | Sebab | Dampak | Rencana Tindak Pengendalian | Penanggung Jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Meningkatkannya Kualitas layanan angkutan umum | <i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi | Kemacetan lalu lintas | 4 | Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana) | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat | | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |
| | | Kerusakan kendaraan saat perjalanan | 12 | Belum optimalnya perawatan kendaraan | Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat | Monitoring berkala Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (Penerapan Check Point Kendaraan) | Kepala Dinas Perhubungan | 12 Bulan setiap tahun |